



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah berperan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan daerah sehingga tercipta perikehidupan masyarakat yang maju dan berkelanjutan;
- b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Pemalang yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai 2045.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis;
 - d. Visi dan Misi Daerah;
 - e. Arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJPD kepada Bupati.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG , PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-278/2024) Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana pembangunan jangka panjang Daerah disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, dan arahan secara garis besar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Dalam dua puluh tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Pemalang untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tingkat regional dan nasional. Kurun waktu RPJPD adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam tiap-tiap tahap RPJPD yaitu: RPJPD tahap pertama, RPJPD tahap kedua, RPJPD tahap ketiga, dan RPJPD tahap keempat. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati terpilih secara langsung oleh rakyat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan keuangan daerah

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah RPJPD adalah untuk: a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian kebijakan umum daerah, b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkelanjutan dan e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.

RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN sesuai karakteristik dan potensi Daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7

✓

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura), berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah timur, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas di sebelah selatan, serta Kabupaten Tegal di sebelah barat, dengan luas daratan 1.115,30 Km² atau ±3,31 persen dari luas Jawa Tengah. Secara administrasi Kabupaten Pemalang memiliki 14 kecamatan, 212 desa, dan 11 kelurahan.

Kabupaten Pemalang saat ini mengalami berbagai perkembangan dalam sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan upaya pembangunan, Kabupaten Pemalang terus menjaga warisan sejarahnya sambil bertransformasi menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang lebih modern. Melalui perubahan-perubahan yang ada, Kabupaten Pemalang perlu untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat juga sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan dan perumusan kebijakan perlu dituangkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan arah dan fokus pembangunan sehingga menciptakan perencanaan pembangunan yang baik dan menjadi pedoman dalam mengatur strategi pembangunan Kabupaten Pemalang.

Dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 yang akan memasuki periode baru melalui dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Rencana penyusunan dokumen ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 18 yang menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya

berakhir. Penyusunan dokumen RPJPD ini bertujuan untuk menghadirkan acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah 20 tahun mendatang. Dokumen ini pada intinya memuat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah. Secara teknis, RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun berdasarkan rekomendasi yang tertuang di dalam dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 serta memedomani dan memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana Pembangunan ini memiliki jangka waktu yang terbagi ke dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh semua unsur penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengamanatkan bahwa pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan RPJPD. Penyusunan dan penetapan RPJPD harus dilengkapi dengan rekomendasi hasil KLHS yang memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Perencanaan ini diharapkan dapat mewujudkan akselerasi pembangunan daerah melalui upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengakomodir masukan dari masyarakat sehingga perumusan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam dua puluh tahun ke depan dapat diwujudkan dalam bentuk dokumen RPJPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi – Pemalang Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor);

X

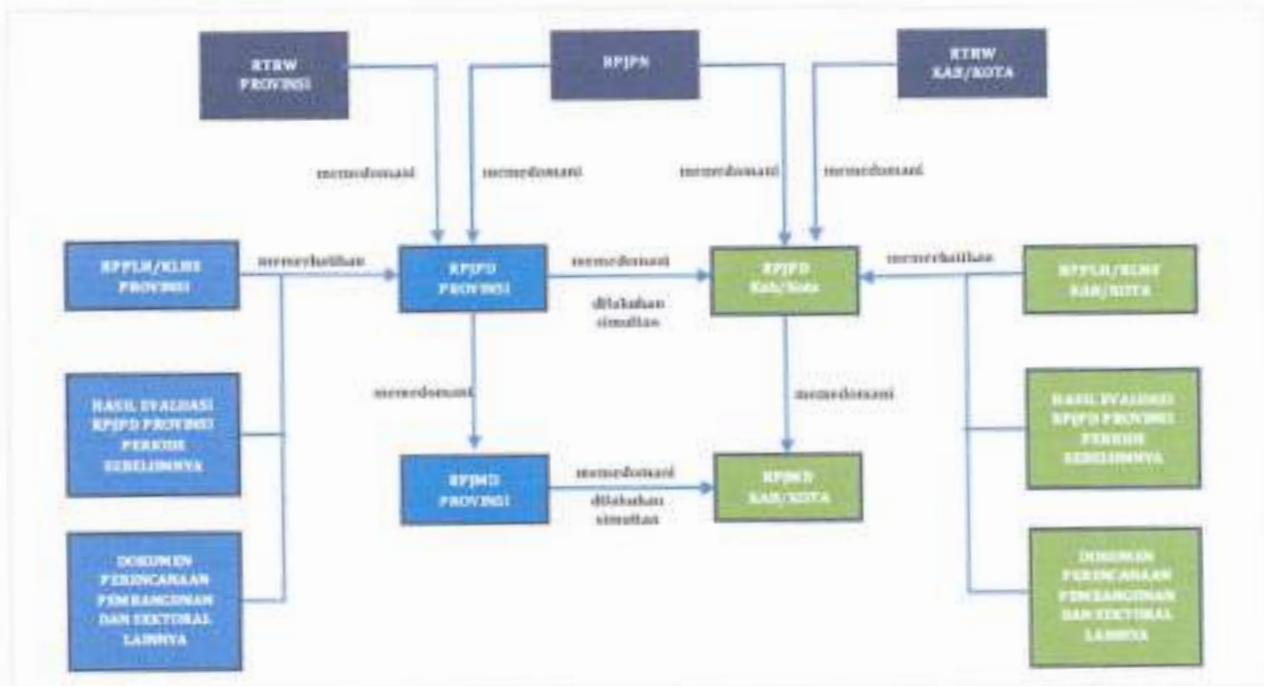
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJPD perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional agar menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), KLHS hingga RPJPD wilayah sekitar. Hal ini



disebabkan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antardokumen perencanaan. Secara ringkas dokumen RPJPD dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut.



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

Gambar I.1

Hubungan antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

a. Hubungan Antara RPJPD dan RPJPN

RPJPD perlu memedomani RPJPN agar terjadi sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan wilayah Pemalang. Dari sisi prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan dapat didasarkan kepada isu-isu dan strategi pembangunan nasional. Dengan demikian, penyusunan RPJPD perlu memerhatikan RPJPN melalui Penyelarasan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.

b. Hubungan Antara RPJPD dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah

RPJPD perlu memedomani RPJPD Provinsi Jawa Tengah untuk sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan. Sementara, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Jawa Tengah demi terciptanya sinkronisasi kebijakan. Selain itu, perlu juga upaya untuk memastikan dukungan pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN.

c. Hubungan Antara RPJPD dan RTRW Kabupaten Pemalang

Penyusunan RPJPD harus memerhatikan RTRW Kabupaten Pemalang. Hal ini mengingat strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang dalam RPJPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW. Fungsi dari RTRW adalah sebagai pedoman dalam memerhatikan dan menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan skema



perencanaan pembangunan yang berdimensi kewilayahan yaitu harus memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan kepada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

d. Hubungan Antara RPJPD dan KLHS RPJPD

Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJPD adalah untuk menghadirkan arahan dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita cita dan tujuan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan. Dari upaya ini diharapkan seluruh usaha yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

RPJPD disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2045.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD dan perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan RPJPD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

X

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Pemalang sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan sosial dan budaya, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 serta mencantumkan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan permasalahan dan isu strategis daerah. Permasalahan memuat pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Isu strategis memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Narasi yang disampaikan menguraikan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah. Tahapan pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana lima tahunan yang membagi RPJPD menjadi 4 (empat) RPJMD secara berkesinambungan. Sasaran Pokok RPJPD memuat Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan yang keseluruhannya sesuai dengan karakteristik Daerah yang mencerminkan keotonomian Daerah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan pembangunan daerah, terutama terkait dengan kaidah kerangka pengendalian dan evaluasi termasuk di dalamnya kerangka manajemen resiko dalam proses perencanaan dan pengendalian/evaluasi pembangunan daerah.

X

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pemalang terletak antara 109° 11' 13.452" – 109° 35' 45.969" Bujur Timur (BT) dan 6° 46' 22.17" – 7° 14' 55.879" Lintang Selatan (LS). Letak Kabupaten Pemalang terbilang strategis karena berada di jalur perekonomian utama di Indonesia, yaitu jalur Pantura Jawa, membentang dari pesisir, dataran rendah, perbukitan sampai pegunungan. Berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan di sebelah timur, Kabupaten Tegal di sebelah barat, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas di sebelah selatan, serta Laut Jawa di sebelah utara. Secara administrasi Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan dan 223 kelurahan/desa, dengan luas 1.115,30 Km². Keempat belas kecamatan tersebut adalah Moga, Warungpring, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal dan Ulujami.

2. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Pemalang memiliki keunikan wilayah, yang dapat dikelompokkan menjadi empat (4) kategori, yaitu:

- Daerah dataran pantai
Daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 1-5 meter di atas permukaan air laut (mdpl), meliputi 17 desa dan 1 kelurahan yang terletak di bagian utara yang termasuk kawasan pantai.
- Daerah dataran rendah
Daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 6-15 mdpl yang meliputi 69 desa dan 10 kelurahan di bagian selatan dari wilayah pantai.
- Daerah dataran tinggi
Daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 16-212 mdpl yang meliputi 76 desa, terletak di bagian tengah dan selatan.
- Daerah pegunungan, terbagi menjadi dua yaitu:
 - Daerah dengan ketinggian antara 213 – 924 mdpl, meliputi 39 desa yang terletak dibagian selatan.
 - Daerah berketinggian 925 mdpl yang terletak di bagian selatan. Daerah ini meliputi 10 desa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga.

3. Geologi

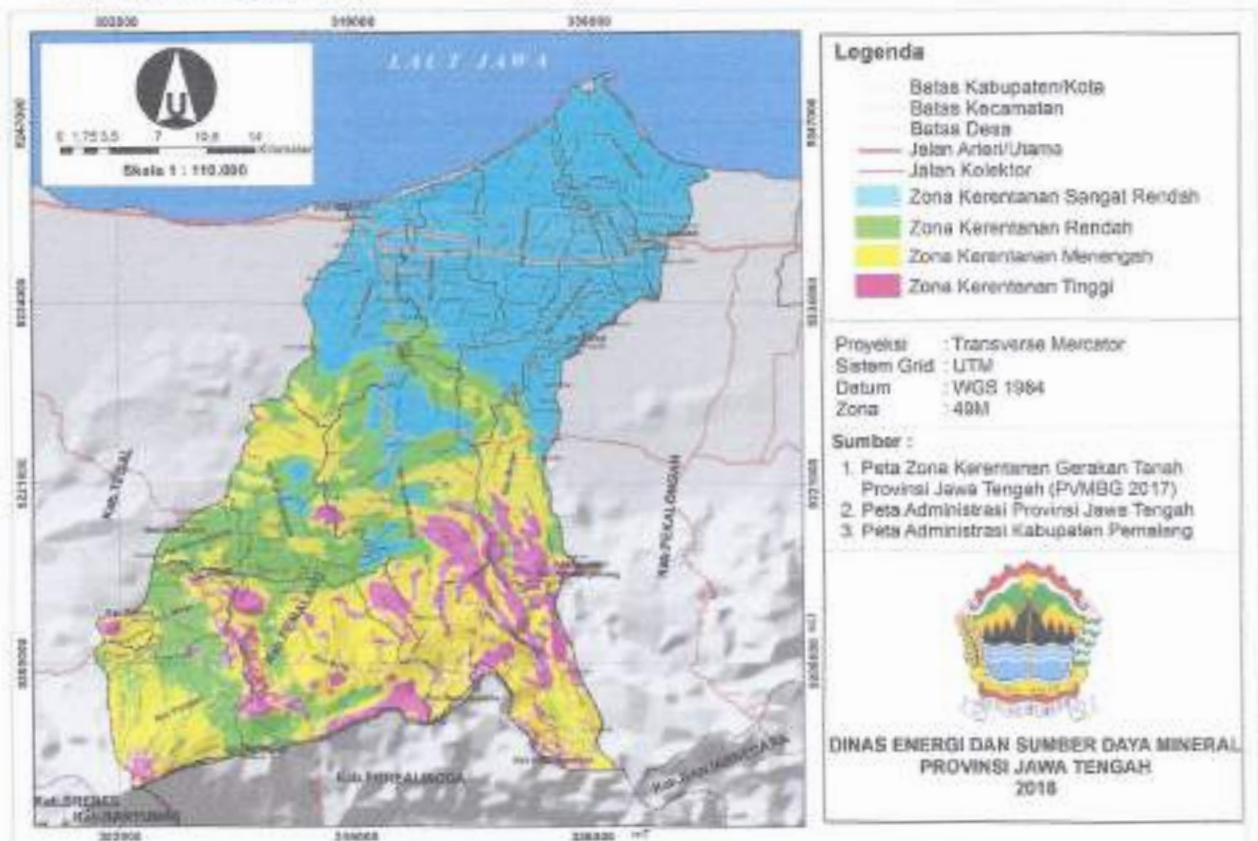
Jenis tanah di Kabupaten Pemalang secara garis besar terbagi menjadi endapan aluvial, kelompok litosol, latosol, regosol, andosol, dan podsolik.

- Jenis aluvial terdapat di wilayah Kecamatan Petarukan, Pemalang, Taman, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.
- Jenis tanah litosol dan kompleksnya terdapat di Kecamatan Pemalang, Randudongkal, Belik, Watukumpul, dan Bantarbolang.
- Jenis latosol dan sejenisnya terdapat di Kecamatan Bantarbolang, Pemalang, Moga, Pulosari, Randudongkal dan Belik.

Kabupaten Pemalang mempunyai potensi bencana geologi gerakan tanah yaitu:

- 1) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah: seluruh wilayah Kecamatan Petarukan, Comal dan Ulujami, sebagian besar wilayah Kecamatan Pemalang, Taman dan Ampelgading, sebagian wilayah Kecamatan Bantarbolang dan Bodeh dan sebagian kecil di wilayah Kecamatan Randudongkal;
- 2) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah: sebagian besar di wilayah Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal, Warungpring dan Moga, sebagian kecil wilayah Kecamatan Pulosari, Belik, Pemalang, Taman dan Ampelgading;
- 3) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah: sebagian besar wilayah Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari, sebagian di wilayah Kecamatan Bodeh, Bantarbolang dan Moga, sebagian kecil di wilayah Kecamatan Pemalang, Ampelgading dan Warungpring;
- 4) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi: sebagian di wilayah Kecamatan Watukumpul, Bodeh, Belik dan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang dan Moga.

Hal tersebut di atas disebabkan oleh struktur batuan/geologi, jenis tanah, gerakan vulkanis/aktifitas gunung berapi dan sesar. Sesar terdapat di Kecamatan Bodeh, Ampelgading, Bantarbolang dan Randudongkal. Disamping itu terdapat Sesar naik di Kecamatan Watukumpul dan sesar geser di Kecamatan Watukumpul dan Randudongkal. Berikut adalah Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Pemalang:



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Gambar II.1.
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Pemalang

4. Klimatologi

Kabupaten Pemalang mempunyai iklim tropis dengan dua musim silih berganti sepanjang tahun yakni musim penghujan dan musim kemarau, dengan suhu rata-rata berkisar antara 24°C sampai dengan 31°C. Tempat-tempat yang letaknya di daerah dataran tinggi mempunyai hari hujan relatif lebih banyak. Hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Geofisika Belik sebanyak 207 hari. Banyaknya hari hujan tertinggi di Bulan Februari dengan 23 hari hujan.

Tabel II.1.
Banyaknya Hari Hujan Perbulan Dirinci
Menurut Stasiun Pemantauan Tahun 2019-2023

No.	Stasiun	Hari Hujan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kejene	111	159	172	195	123
2	Warungpring	14	192	227	226	150
3	Kecepit	165	183	183	188	133
4	Randudongkal	123	164	189	221	154
5	Nambo	134	161	193	192	113
6	Moga	108	138	162	176	153
7	Pulosari	R	R	R	R	R
8	Belik	178	251	258	296	207
9	Banjardawa	46	113	143	157	110
10	Sungapan	93	166	172	178	115
11	Karangsuci	85	162	65	R	R
12	Klareyan	81	127	134	139	84
13	Karangtengah	51	123	113	133	87
14	Sokawati	110	162	175	183	130
15	Bantarbolang	104	160	174	202	103
16	Pedagung	124	98	203	203	101
17	Watukumpul	149	209	223	278	182
18	Sipedang	151	220	225	290	187
19	Bongas	143	226	233	293	188
Rata-Rata		117	159	171	187	122

Sumber: BPS, 2020-2024

Tabel II.2.
Banyaknya Curah Hujan Pertahun
Menurut Stasiun Pemantauan Tahun 2019-2023

No.	Stasiun	Curah Hujan (mm)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kejene	1.664	3.592	3.516	3.772	2.509
2	Warungpring	2.191	4.186	4.166	4.071	3.176
3	Kecepit	2.927	4.145	4.400	4.927	2.475
4	Randudongkal	3.058	4.269	4.371	5.144	2.995
5	Nambo	2.880	4.011	4.624	5.176	2.691
6	Moga	3.314	6.149	6.217	5.520	3.972
7	Pulosari	R	R	R	R	R
8	Belik	2.209	7.859	7.343	9.101	5.753
9	Banjardawa	821	1.474	2.622	2.093	1.720
10	Sungapan	1.225	2.864	2.811	2.545	1.921
11	Karangsuci	1.118	2.839	R	R	R
12	Klareyan	1.212	3.115	2.871	2.746	1.399
13	Karangtengah	1.337	2.655	2.675	1.906	1.604
14	Sokawati	1.506	3.051	2.615	2.681	1.910
15	Bantarbolang	2.119	4.301	3.441	3.313	2.079
16	Pedagung	2.772	2.803	4.149	4.276	2.237
17	Watukumpul	2.907	2.915	6.340	5.865	3.838
18	Sipedang	2.707	4.980	5.733	6.259	4.417
19	Bongas	3.080	6.387	6.740	7.141	4.802
Rata-Rata		2.169,28	3.977,47	4.390,21	4.502,13	2.911,65

Sumber: BPS, 2020-2024

X

5. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data tahun 2023 penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang sekitar 26,53 persen berupa sawah irigasi. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian lahan sawah menjadi salah satu aktifitas ekonomi masyarakat yang dominan. Adapun penggunaan lahan untuk bangunan dan sekitarnya sebesar 23,32 persen, tegalan atau kebun 12,05 persen dan tambak atau kolam 0,75 persen.

6. Kondisi Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan berfokus pada penggunaan sumber daya alam secara efisien, mengurangi pencemaran, dan melindungi keanekaragaman hayati. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Mulai tahun 2021 terjadi perubahan perhitungan IKL sehingga pada tahun tersebut terjadi penurunan yang signifikan. Terjadi peningkatan IKLH Kabupaten Pemalang dari tahun 2022-2023 sebesar 3,26 poin. Pada tahun 2022 IKLH Kabupaten Pemalang sebesar 62,89 dan di tahun 2023 mencapai 66,15 dan termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024, nilai IKLH Pemalang berubah dari 66,15 menjadi 76,43. Perubahan capaian ini dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan. Hal ini akan menjadi baseline dalam penyusunan target yang berlaku mulai tahun 2025.

Tabel II.3.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
Tahun 2019-2023

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Kriteria
2019	47,06	89,27	69,95	68,88	Sedang
2020	47,33	85,62	73,56	68,58	Sedang
2021	50	86,26	48,54	69,65	Sedang
2022	48,33	84,16	48,54	62,89	Sedang
2023	53,33	85,49	54,61	66,15	Sedang

Sumber: Laporan IKLH Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dan IKLH Online, 2023

Pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah terdiri dari pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendauran ulang sampah. Sedangkan penanganan sampah terdiri dari pemilahan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Persentase pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang meningkat sepanjang tahun 2019 – 2023. Pada tahun 2023 pengurangan sampah mencapai 56.768,00 ton per tahun atau 25,91% dan penanganan sampah mencapai 130.582,41 ton per tahun atau 59,60% dari total timbulan sampah.



Tabel II.4.
Neraca Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pemalang
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Nilai (Ton/Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Timbulan Sampah	142.657,91	142.970,65	214.837,39	216.694,51	219.110,08
2	Jumah Pengurangan Sampah	29.219,01	30.262,27	51.628,34	56.081,45	56.768,00
	a. Prosentase pengurangan sampah	20,48	21,17	24,03	25,88	25,91
	b. Jumlah pembatasan timbulan sampah	14.125,50	25.988,00	25.659,50	0,00	0,00
	c. Jumlah pemanfaatan kembali sampah	12.314,22	0,00	158,40	0,00	0,00
	d. Jumlah pendauran ulang sampah	2.779,29	4.274,27	25.810,44	56.081,45	56.768,00
3	Jumlah Penanganan Sampah	59.239,50	84.826,00	120.961,00	128.936,62	130.582,41
	a. Persentase penanganan sampah	41,53	59,33	56,30	59,50	59,60
	b. Pengolahan	839,50	876,00	511,00	8.486,62	11.321,30
	c. Pemrosesan akhir	58.400	83.950	120.450,00	120.450,00	129.261,11
4	Sampah Yang Dikelola	88.458,51	115.088,27	172.589,34	185.018,07	187.350,41
	- Persentase sampah terkelola	62,01	80,50	80,33	85,38	85,51
5	Sampah Tidak Dikelola	54.199,40	27.882,38	42.248,05	31.676,44	31.759,67
	- Persentase sampah tidak terkelola	37,99	19,50	19,67	14,62	14,49

Sumber: SIPSN, 2023

7.Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan Gas Rumah Kaca

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta sosial-ekonomi.

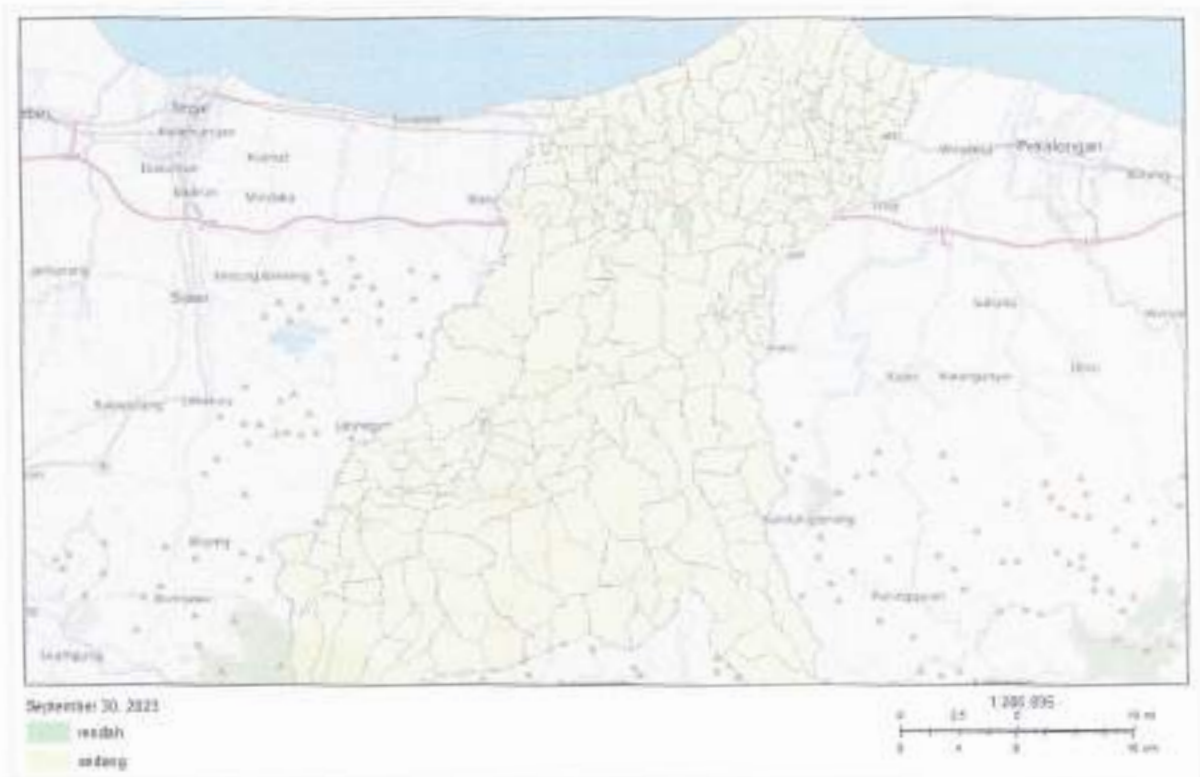
Berdasarkan tingkat kerentanan di atas menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Pemalang mayoritas berada pada tingkat kerentanan sedang sebanyak 220 desa (99%). Terdapat dua desa yang memiliki tingkat kerentanan rendah yaitu Desa Gondang yang berada di Kecamatan Taman dan Desa Susukan yang berada di Kecamatan Comal.

Tabel II.5.
Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim
di Kabupaten Pemalang

Kerentanan	Jumlah Desa	Persentase (%)
Rendah	2	1%
Sedang	220	99%
Total	222	100%

Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) KLHK, 2021

X



Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) KLHK, 2021

Gambar II.2.
Peta Kerentanan Iklim Kabupaten Pemalang

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dihasilkan dari penggunaan energi untuk kegiatan transportasi, perubahan lahan, kegiatan pertanian, dan pengelolaan limbah. Pengelolaan GRK sangat penting dilakukan dalam rangka pengelolaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Berikut tabel emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Pemalang:

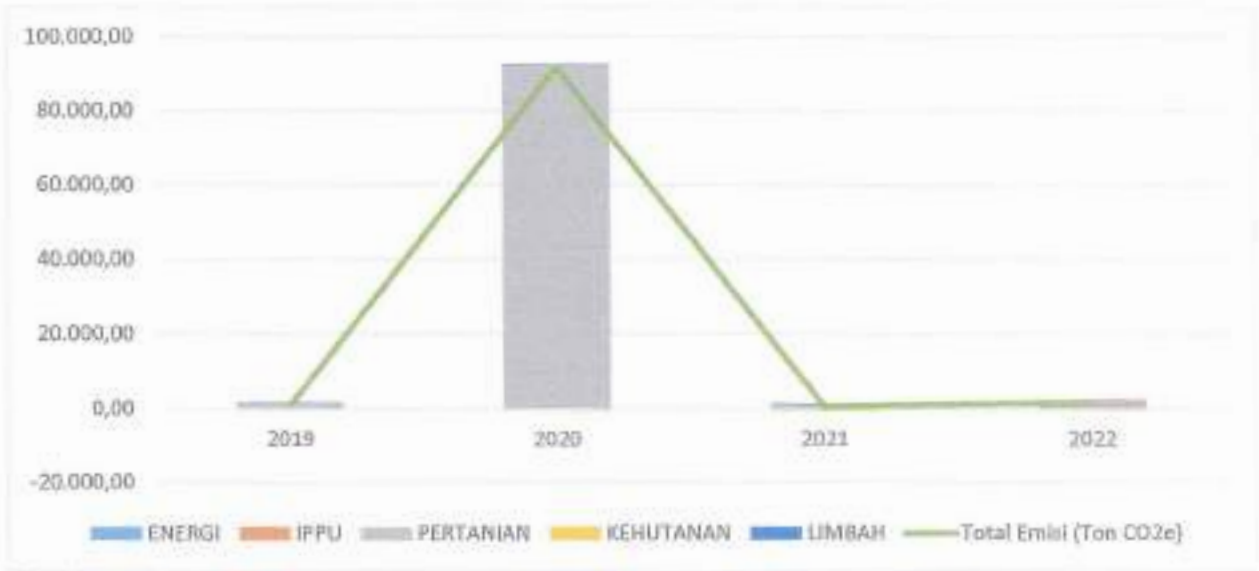
Tabel II.6.
Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Pemalang

NO.	SEKTOR	2019	2020	2021	2022
1	ENERGI	639,32	428,54	448,57	575,50
2	IPPU	0,37	0,44	0,47	796,90
3	PERTANIAN	844,65	91.667,51	623,07	615,91
4	KEHUTANAN	-559,36	-632,15	-619,83	-593,36
5	LIMBAH	0,26	239,82	275,83	237,23
Total Emisi (Gg CO2e)		925,25	91.704,15	728,11	1.632,18

Sumber: Sign Smart, 2023

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 2019-2022 mengalami tren yang fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 91.704,15 Gg CO₂eq. Pada tahun 2021 emisi GRK yang dihasilkan mengalami penurunan mencapai 728,11 Gg CO₂eq kemudian meningkat menjadi 1.632,18 Gg CO₂eq pada tahun 2022 dengan kontribusi emisi GRK terbesar bersumber dari sektor IPPU sebesar 796,90 Gg CO₂eq. Hingga tahun 2022 sektor kehutanan masih bisa menyerap emisi, sehingga dapat disimpulkan masih terdapat tutupan hijau atau hutan di Kabupaten Pemalang.





Sumber: Sign Smart, 2023

Gambar II.3.
Grafik Tren Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Pemalang

Dalam rangka komitmen untuk melakukan penurunan emisi GRK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang maka beberapa kegiatan telah dilaksanakan di sektor energi, lahan, dan pengelolaan limbah. Dalam sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan upaya penurunan emisi melalui aksi pembangunan rendah karbon dengan menggunakan sistem AKSARA yang dikelola oleh BAPPENAS, dalam kurun waktu 2019–2023 data Kabupaten Pemalang yang telah final dan disetujui berpotensi menurunkan emisi secara kumulatif mencapai 16.513,47 Ton CO2eq. Capaian tersebut memberikan kontribusi capaian penurunan emisi GRK di Kabupaten Pemalang relatif kecil yaitu hanya 0,017% secara kumulatif. Berikut upaya penurunan emisi yang telah dilakukan Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 2019 – 2023.

Tabel II.7.
Kegiatan Aksi Penurunan Emisi Kabupaten Pemalang Tahun 2019 – 2023

SEKTOR	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Persampahan		1,85			16.511,62	16.513,47
Bank Sampah		1,85				1,85
Pembangunan dan Operasional Bank Sampah					11.811,04	11.811,04
Pembangunan dan Operasional TPS3R					4.700,58	4.700,58
TOTAL PENURUNAN EMISI GRK (Ton CO2eq)		1,85			16.511,62	16.513,47
Emisi GRK (Sign Smart) Ton CO2eq	1.185.934	91.704.153	728.111	1.632.177	NA	94.745.988
% Penurunan Emisi GRK	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,017%

Sumber : <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>, 2024

8. Risiko Bencana

Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Bencana alam dan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang meliputi kebakaran, banjir, tanah



longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Pada tahun 2023 kejadian bencana di Kabupaten Pemalang mencapai 236 kejadian dengan tingkat kejadian paling banyak berupa kebakaran dengan 69 kejadian.

Untuk mengukur tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana digunakan indikator Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Kelas nilai IRBI dikategorikan menjadi tiga yaitu kelas tinggi (nilai IRBI >144), kelas sedang (nilai IRBI 13-144), dan kelas rendah (nilai IRBI <13). IRBI Kabupaten Pemalang tahun 2023 menunjukkan nilai 115,11 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, nilai tersebut menunjukkan kelas sedang. Apabila kelas sedang dibagi lagi menjadi tiga kelas yaitu kelas sedang menuju rendah (nilai IRBI 13-56,67), kelas sedang (nilai IRBI 56,68-100,33), dan kelas sedang menuju tinggi (nilai IRBI 100,34-144), maka nilai IRBI Kabupaten Pemalang tahun 2023 masuk dalam kelas menuju tinggi.



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

Gambar II.4.
Tren IRBI Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Kebencanaan suatu wilayah dapat dilihat pula melalui ketahanan daerah yaitu kemampuan suatu wilayah, baik tingkat lokal maupun regional, untuk menghadapi, menanggulangi, dan beradaptasi terhadap berbagai risiko dan tantangan yang mungkin timbul, khususnya terkait kebencanaan. Kondisi tersebut merujuk pada kemampuan wilayah untuk mengidentifikasi, mengelola, dan merespons bencana alam atau buatan manusia. Ini mencakup perencanaan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Adapun indikator yang merepresentasikannya adalah Indeks Ketahanan Daerah dimana Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan di setiap tahunnya dari tahun 2019-2023.

Tabel II.8.
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Daerah	0,48	0,55	0,66	0,76	0,79

Sumber: BPBD Kabupaten Pemalang

X

9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan dan daya dukung air. Besarnya kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan.

Daya Dukung Air

Perhitungan kebutuhan air untuk penetapan Daya Dukung Daya Tampung Air menggunakan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan air dari sektor rumah tangga dan sektor kegiatan ekonomi berbasis lahan. Perhitungan ketersediaan dilakukan melalui sistem grid yang mampu merepresentasikan daya dukung dan daya tampung air dalam bentuk spasial. Selanjutnya yaitu identifikasi status daya dukung dan daya tampung air tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan air tiap grid. Kondisi status Daya Dukung Daya Tampung Air terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan lebih tinggi jika dibandingkan ketersediaannya. Kondisi ini ditandai dengan hasil pengurangan ketersediaan terhadap kebutuhan air bernilai negatif (-), begitu sebaliknya.

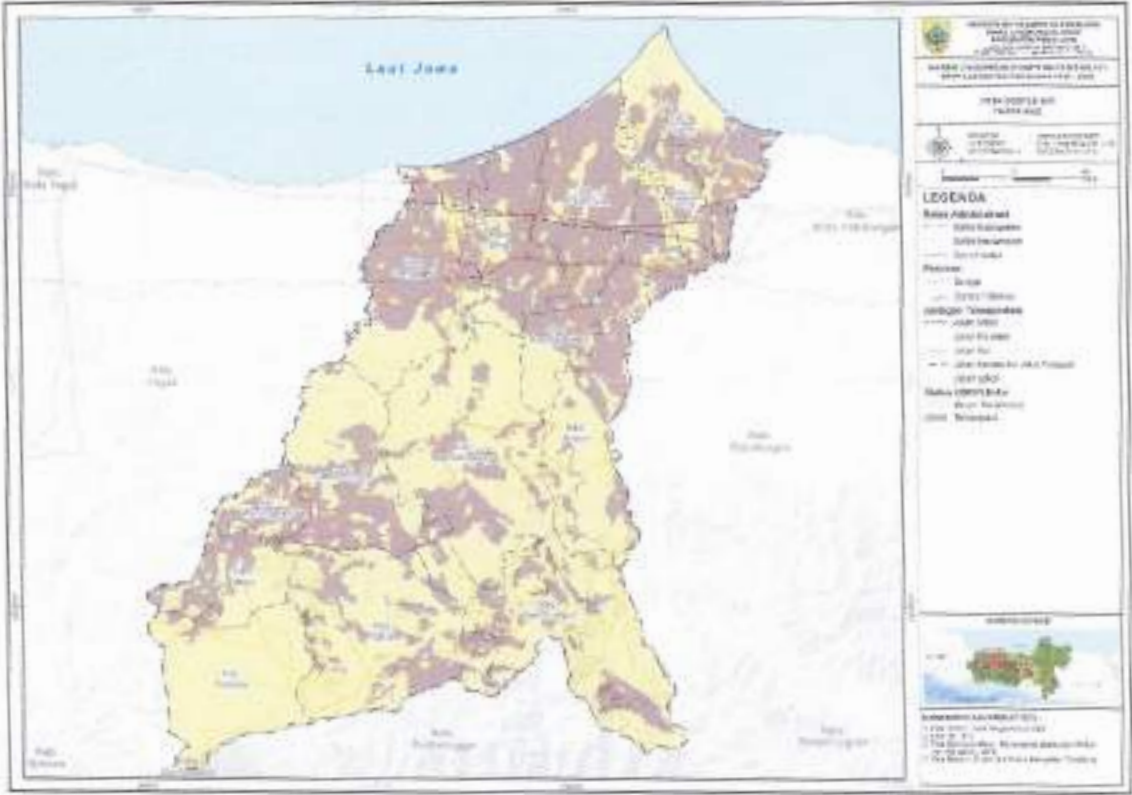
Kondisi daya dukung air dilakukan dengan perhitungan daya dukung air permukaan. Kondisi daya dukung air permukaan di Kabupaten Pemalang secara keseluruhan masih belum terlampaui atau surplus sebesar 85.279.756,14 m³/tahun, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan air di Kabupaten Pemalang lebih rendah jika dibandingkan dengan ketersediaan air permukaan atau sumber air yang berasal dari wilayah air Sungai (WAS). Namun, apabila ditinjau berdasarkan kecamatan, terdapat tujuh kecamatan yang memiliki status daya dukung air permukaan terlampaui yaitu Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Comal, Kecamatan Moga, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Warungpring. Dilihat dari persentase luas wilayahnya, sebesar 58,21% wilayah Kabupaten Pemalang berada pada status belum terlampaui, sedangkan sisanya sebesar 41,79% wilayah Kabupaten Pemalang berada pada status terlampaui. Berikut ditampilkan tabel perhitungan daya dukung air permukaan di Kabupaten Pemalang beserta persebarannya di setiap kecamatan.

Tabel II.9.
Perhitungan Daya Dukung Air Permukaan Kabupaten Pemalang

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Status	Belum Terlampaui	Terlampaui
1	Ampelgading	75.040.991,80	80.574.380,89	-5.533.389,09	Terlampaui	43,42%	56,58%
2	Bantarbolang	162.320.640,48	100.275.698,94	62.044.941,54	Belum Terlampaui	76,11%	23,89%
3	Belik	130.273.425,93	108.660.217,67	21.613.208,26	Belum Terlampaui	70,19%	29,81%
4	Bodeh	91.346.280,77	78.134.752,27	13.211.528,51	Belum Terlampaui	62,60%	37,40%
5	Comal	32.550.733,10	40.554.329,86	-8.003.596,76	Terlampaui	38,78%	61,22%
6	Moga	49.125.584,67	49.367.283,46	-241.698,79	Terlampaui	57,63%	42,37%

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun)	Status	Belum Terlampaui	Terlampaui
7	Pemalang	117.587.673,68	133.076.383,60	-15.488.709,92	Terlampaui	41,06%	58,94%
8	Petarukan	100.653.659,09	145.786.972,58	-45.133.313,46	Terlampaui	18,54%	81,46%
9	Pulosari	100.125.932,62	39.726.119,04	60.399.813,58	Belum Terlampaui	95,76%	3,24%
10	Randudongkal	99.060.167,84	96.846.471,77	2.213.696,07	Belum Terlampaui	53,58%	46,42%
11	Taman	77.019.623,66	106.236.396,18	-29.216.772,53	Terlampaui	23,73%	76,27%
12	Ulujami	78.822.984,76	78.800.472,42	22.512,34	Belum Terlampaui	49,29%	50,71%
13	Warungpring	23.187.607,45	32.600.316,27	-9.412.708,82	Terlampaui	32,31%	67,69%
14	Watukumpul	109.550.913,54	70.746.668,34	38.804.245,20	Belum Terlampaui	74,39%	25,61%
Total		1.246.666.219,39	1.161.386.463,25	85.279.756,14	Belum Terlampaui	58,21%	41,79%

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Gambar II.5.
Peta Status Daya Dukung Air Permukaan Kabupaten Pemalang

Perhitungan kebutuhan air untuk penetapan Daya Dukung Daya Tampung Air menggunakan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan air dari sektor rumah tangga dan sektor kegiatan ekonomi berbasis lahan. Perhitungan ketersediaan dilakukan melalui sistem grid yang mampu merepresentasikan daya dukung dan daya tampung air dalam bentuk spasial dengan mempertimbangkan kecenderungan jasa lingkungan pengatur air. Selanjutnya yaitu identifikasi status daya dukung dan daya tampung air tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan air tiap grid. Kondisi status Daya Dukung Daya Tampung Air terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan lebih tinggi jika dibandingkan ketersediaannya. Kondisi ini ditandai dengan hasil pengurangan ketersediaan terhadap kebutuhan air bernilai negatif (-), begitu sebaliknya.



Hasil perhitungan kecenderungan jasa lingkungan pengatur air tahun 2016 – 2020 menunjukkan penurunan 5,83% atau 1,46% per tahun. Sehingga, proyeksi ketersediaan air pada tahun 2045 mengalami penurunan. Proyeksi daya dukung air dihitung berdasarkan ketersediaan air permukaan. Pada ketersediaan air permukaan, terjadi penurunan ketersediaan dari tahun 2022 mencapai 1.246.666.219,39 m3/tahun diproyeksikan menjadi 792.196.057,86 m3/tahun pada tahun 2045. Dengan proyeksi kebutuhan air pada tahun 2045 untuk kebutuhan domestik sebesar 154.825.084,80 m3/tahun dan kebutuhan ekonomi berbasis lahan sebesar 760.434.153,54 m3/tahun sehingga total kebutuhan air mencapai 915.259.238,34 m3/tahun, maka status daya dukung air permukaan Kabupaten Pemalang total pada tahun 2045 terlampaui atau defisit 123.063.180,48 m3/tahun.

Tabel II.10.
Proyeksi Daya Dukung Air Tahun 2045 secara BAU di Kabupaten Pemalang

Keterangan	2022	2030	2045
Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	1.246.666.219,39	1.064.878.154,78	792.196.057,86
Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	1.161.386.463,25	902.045.567,94	915.259.238,34
Kebutuhan Domestik (KHL 43,20 m3/tahun/kapita)		141.611.414,40	154.825.084,80
Kebutuhan Ekonomi Berbasis Lahan		760.434.153,54	760.434.153,54
Selisih (m ³ /tahun)	85.279.756,14	162.832.586,84	-123.063.180,48
Status	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui
Rasio (ketersediaan/kebutuhan)	1,073	1,181	0,866

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Daya Dukung Pangan

Perhitungan ketersediaan pangan Kabupaten Pemalang dilakukan melalui pendekatan sistem grid dan menggunakan data jumlah produksi padi sawah (ton). Setelah mendapatkan jumlah ketersediaan pangan kemudian dilakukan perhitungan dengan peta indeks jasa lingkungan hidup penyedia pangan tiap grid di Kabupaten Pemalang. Sementara itu untuk perhitungan kebutuhan pangan untuk penetapan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (Daya Dukung Pangan) menggunakan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan dari sektor rumah tangga, dengan berbasis jumlah penduduk. Konsep yang diterapkan untuk menentukan distribusi penduduk tiap grid dengan mempertimbangkan pembobotan tiap tipe penutupan lahan dan jaringan jalan. Asumsinya adalah penutupan lahan berupa pemukiman mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan penutupan lahan lainnya.

Identifikasi status daya dukung daya tampung pangan tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan pangan tiap grid. Kondisi status daya dukung pangan terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaannya. Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Pemalang jika dihitung menggunakan sistem grid maka kondisinya masih surplus sebesar 182.006,55 ton/tahun, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Pemalang lebih besar dibandingkan kebutuhannya. Dilihat dari persentase



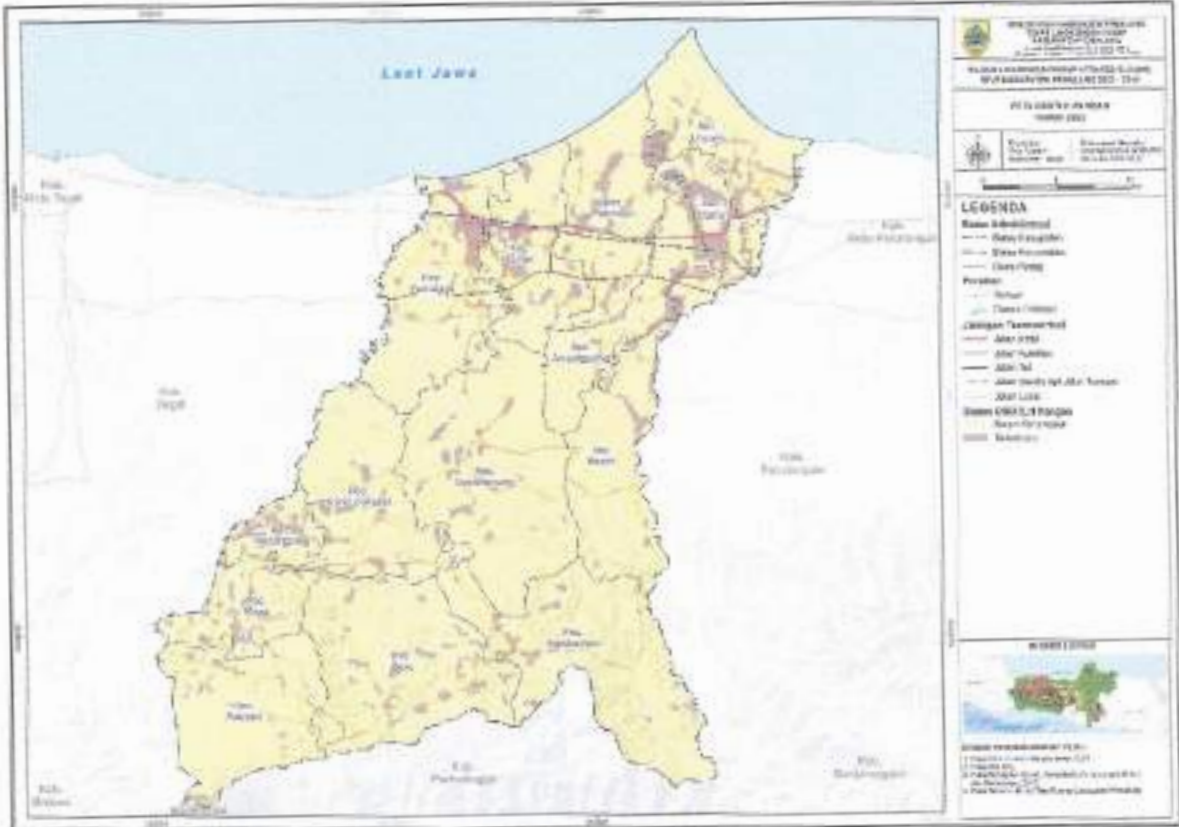
luas wilayahnya, sebesar 89,30% wilayah Kabupaten Pemalang berada pada status belum terlampau, sedangkan, 10,70% wilayah Kabupaten Pemalang berada pada status terlampau. Rincian status daya dukung pangan per kecamatan di Kabupaten Pemalang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel II.11.
Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Pemalang (Sistem Grid)

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (ton/tahun)	Kebutuhan Pangan (ton/tahun)	Selisih (ton/tahun)	Status	Belum Terlampau	Terlampau
1	Ampelgading	18.166,22	7.877,58	10.288,64	Belum Terlampau	82,89%	17,11%
2	Bantarbolang	35.819,87	8.859,31	26.960,56	Belum Terlampau	96,17%	3,83%
3	Belik	30.650,47	10.812,68	19.837,78	Belum Terlampau	92,66%	7,34%
4	Bodeh	20.345,57	7.101,12	13.244,45	Belum Terlampau	92,23%	7,77%
5	Comal	7.931,00	5.950,35	1.980,65	Belum Terlampau	60,08%	39,92%
6	Moga	12.076,09	5.134,51	6.941,49	Belum Terlampau	85,31%	14,69%
7	Pemalang	28.823,47	12.076,20	16.747,27	Belum Terlampau	86,35%	13,65%
8	Petarukan	25.790,74	11.983,28	13.807,46	Belum Terlampau	83,23%	16,77%
9	Pulosari	20.895,35	5.612,89	15.282,46	Belum Terlampau	95,82%	4,18%
10	Randudongkal	23.687,41	8.062,16	15.625,26	Belum Terlampau	91,87%	8,13%
11	Taman	19.419,83	9.142,76	10.277,07	Belum Terlampau	82,15%	17,85%
12	Ulujami	20.891,63	9.360,54	11.531,08	Belum Terlampau	84,51%	15,49%
13	Warungpring	5.782,44	3.606,56	2.175,88	Belum Terlampau	74,63%	25,37%
14	Watukumpul	24.883,39	7.576,89	17.306,50	Belum Terlampau	95,07%	4,93%
Total		295.163,40	113.156,85	182.006,55	Belum Terlampau	89,30%	10,70%

Sumber: Hasil Analisis, 2024

✓



Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Gambar II.6.
Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Pemalang

Perhitungan proyeksi daya dukung pangan diproyeksikan berdasarkan rencana pola ruang. Berdasarkan proyeksi luas lahan pertanian pangan pada pola ruang, maka dapat diproyeksikan produksinya yang kemudian dispasialkan melalui sistem grid. Sementara itu untuk perhitungan kebutuhan pangan untuk penetapan daya dukung pangan menggunakan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan dari sektor rumah tangga, dengan berbasis jumlah penduduk.

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan beras pada tahun 2045 diproyeksikan mengalami penurunan dari yang sebelumnya pada tahun 2022 mencapai 295.163,40 ton/tahun menjadi 221.634,57 ton/tahun di tahun 2045. Namun demikian, dengan kebutuhan pangan pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai 135.113,56 ton/tahun, kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2045 secara total tetap belum terlampaui atau kebutuhan pangan masih dapat tercukupi di tahun 2045, meskipun secara agregat terdapat satu kecamatan dengan daya dukung pangan terlampaui yaitu di Kecamatan Comal.

Tabel II.12.
Proyeksi Daya Dukung Pangan Tahun 2045 secara BAU
di Kabupaten Pemalang

Keterangan	2022	2030	2045
Ketersediaan Pangan Beras (ton/tahun)	295.163,40	221.634,57	221.634,57
Kebutuhan Pangan Beras (ton/tahun)	113.156,85	123.582,18	135.113,56
Selisih (ton/tahun)	182.006,55	98.052,39	86.521,01
Status	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Rasio (ketersediaan/kebutuhan)	2,61	1,79	1,64

Sumber: Hasil Analisis, 2024



10. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu wilayah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Konsep ketahanan pangan melibatkan beberapa aspek yang saling terkait, termasuk produksi pangan, distribusi, aksesibilitas, dan konsumsi pangan. Pada analisis ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang, dilakukan pendekatan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan.

Terlihat bahwa skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2019 skor IKP Kabupaten Pemalang ada pada angka 76,87 dan pada tahun 2023 skor IKP Kabupaten Pemalang naik menjadi 80,84. Capaian ini dapat menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang terus membaik. Kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat terus membaik dan keamanan pangan yang dikonsumsi juga membaik.

Tabel II.13.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang
Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	76,87	79,19	78,35	78,51	80,84
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	10,06	10,26	10,59	11,54	9,47

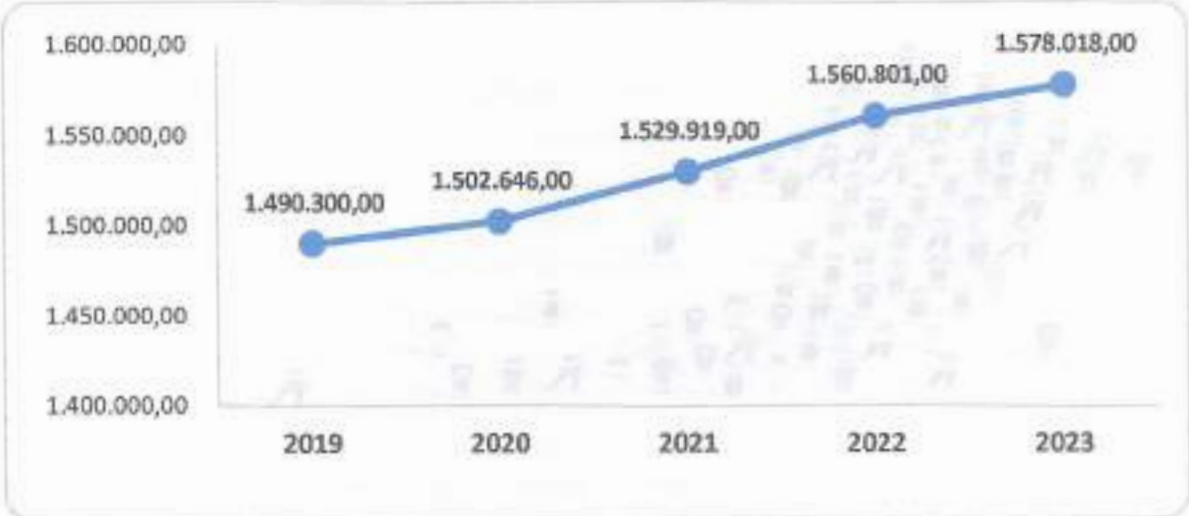
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Untuk menggambarkan seberapa banyak penduduk yang tidak ataupun belum memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang bergizi dan jumlah yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan aktif, terdapat indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) atau lebih dikenal dengan PoU. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, PoU Kabupaten Pemalang berkisar pada pada angka 11,54–9,47%. Dengan kata lain masih terdapat sekitar 142 ribu jiwa penduduk Pemalang belum bisa mengakses makanan bergizi baik dan jumlah yang dibutuhkan untuk menjalani hidup yang sehat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti kemiskinan, ketersediaan pangan, harga pangan, kualitas pangan dan bencana alam.

2.1.2 Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil), jumlah penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebesar 1.578.018 jiwa meningkat sekitar 1,10% dari jumlah penduduk pada Tahun 2022. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar berikut:

X



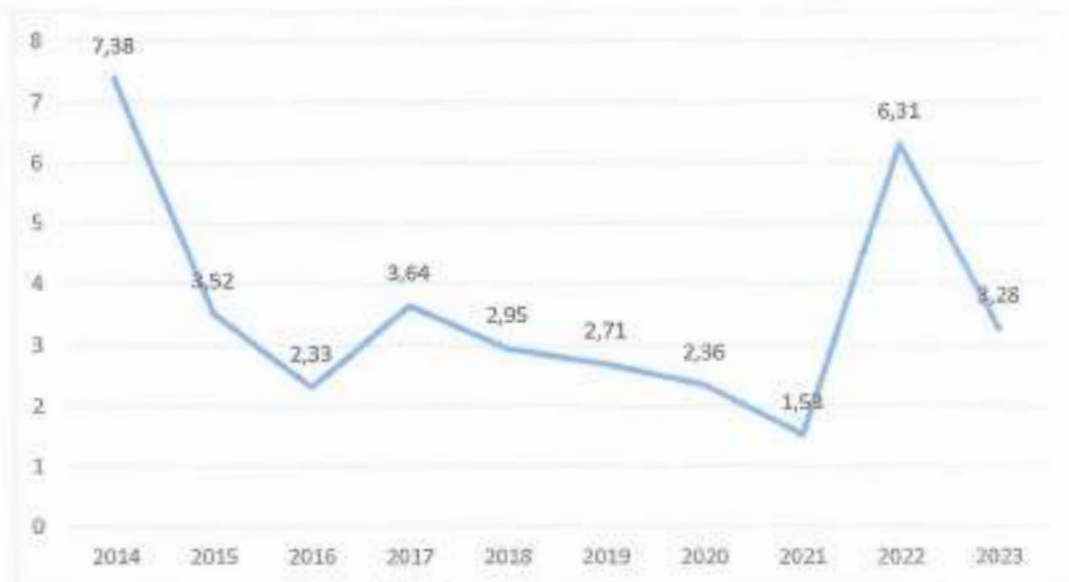
Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, Tahun 2024

Gambar II.7.
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pemalang
Tahun 2019-2023

Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2023 mencapai 1.578.018 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 802.235 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 775.783 jiwa. Rasio jenis kelamin sebesar 103,43%. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk, pada tahun 2023 sebesar 1.414,88 jiwa/km². Penduduk Kabupaten Pemalang tersebar di 14 kecamatan dengan jumlah yang bervariasi. Persebaran penduduk di Kabupaten Pemalang tidak merata, yaitu terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Ketiga kecamatan tersebut terletak di daerah pusat kota dan daerah penyangga, yaitu Kecamatan Pemalang, Taman, dan Petarukan. Jumlah penduduk pada ketiga kecamatan tersebut mencapai 595.407 jiwa atau sebesar 37,73% dari total seluruh penduduk di Kabupaten Pemalang. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Warungpring sebesar 3,03% dari total seluruh penduduk di Kabupaten Pemalang.

Struktur umur penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2023 didominasi kelompok umur produktif (15-64) tahun sebesar 70,02 persen penduduk usia produktif, dan 29,98 persen penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65+) tahun. Dengan demikian rasio ketergantungan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 sebesar 42,81, yang artinya setiap 100 orang produktif di Kabupaten Pemalang menanggung sekitar 42-43 penduduk usia non produktif.

X



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2023 (diolah)

Gambar II.10.
Inflasi di Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2023

Tingkat inflasi Kabupaten Pemalang selama satu dasawarsa terakhir secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 perkembangan laju inflasi di Kabupaten Pemalang cukup moderat tercatat sebesar 3,28 persen. Pandemi yang melanda hampir di seluruh dunia membuat banyak negara melakukan *lockdown* sebagai upaya pengendalian penyebaran infeksi. Kebijakan tersebut membuat permintaan akan barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, di pasar meningkat signifikan. Di sisi lain jumlah pasokan masih terbatas karena kelangkaan tenaga kerja maupun faktor lainnya pascapandemi. Permintaan yang lebih tinggi inilah yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan atau kelangkaan produk, yang kemudian menjadi penyebab terjadinya inflasi tinggi di tahun 2022.

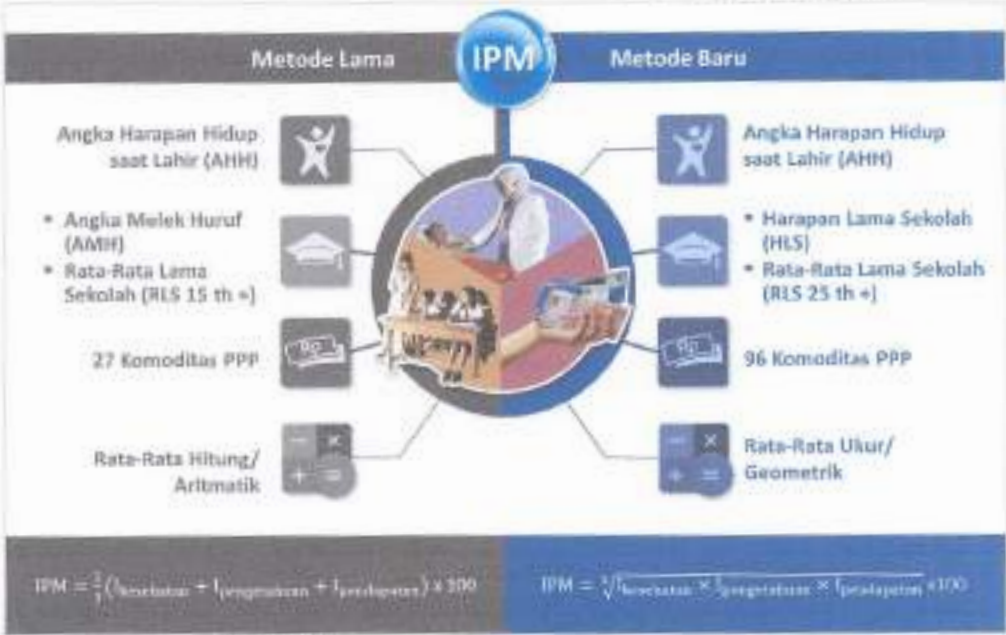
3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat di suatu wilayah. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indeks tersendiri. Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator usia harapan hidup (*expectancy of life at birth*) yang menghasilkan indeks kesehatan. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan indikator harapan lama sekolah dari penduduk usia 7 tahun ke atas yang menghasilkan indeks pengetahuan. Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan yang menghasilkan indeks pendapatan.

IPM pertama kali diperkenalkan oleh UNDP sejak tahun 1990 dan beberapa kali mengalami perubahan metode. Tahun 2011 diperkenalkan metode baru dalam penghitungan IPM dengan merubah metode penghitungan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik. Perubahan rata-rata ini didasari kondisi bahwa kelemahan

X

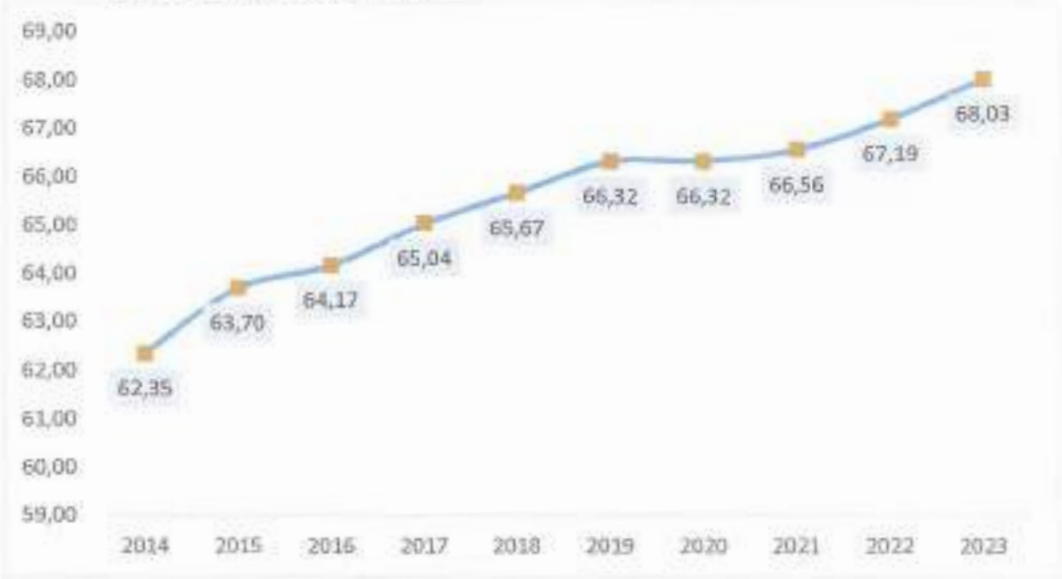
di satu dimensi tidak dapat digantikan oleh kelebihan dari dimensi yang lain. Perubahan juga terjadi pada indikator pembentuk indeks pengetahuan, yaitu penggunaan indikator harapan lama sekolah sebagai pengganti indikator melek huruf. Angka melek huruf mayoritas wilayah sudah berada pada capaian yang tinggi sehingga sudah tidak sensitif dan tidak relevan lagi dalam mengukur kualitas pendidikan. Perubahan metodologi yang diperkenalkan UNDP menghasilkan konsekuensi bahwa angka IPM sebelum tahun 2010 tidak dapat dibandingkan dengan angka IPM tahun 2010 dan setelahnya.



Sumber: UNDP, 2010

Gambar II.11.
Perubahan Metodologi IPM

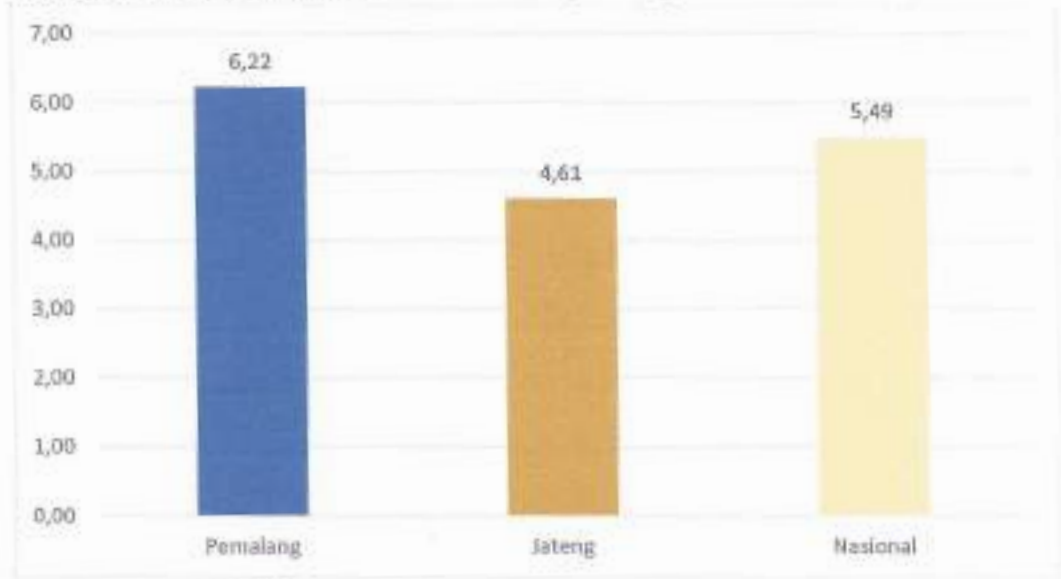
Perkembangan angka IPM di Kabupaten Pemalang selama periode 2014-2023 terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat di gambar berikut, di mana pada tahun 2023 IPM Kabupaten Pemalang meningkat menjadi 68,03.



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.12.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2023

Dilihat dari kategorinya, IPM Kabupaten Pemalang telah masuk dalam kategori wilayah dengan tingkat pembangunan manusia kategori "sedang" (IPM antara 60-70). Meskipun IPM Kabupaten Pemalang tahun 2023 masih lebih rendah dari IPM Jawa Tengah yang sebesar 73,39 dan IPM Nasional yang sebesar 74,39, namun dalam periode satu dasawarsa terakhir yaitu tahun 2014-2023, laju kenaikan IPM Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.13.
Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2023

Sebagai indeks yang bersifat komposit, evaluasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat berdasarkan capaian dari masing-masing komponen pembentuknya, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pendapatan. Selama 12 tahun terlihat bahwa komposisi indeks tidak banyak berubah. Capaian indeks kesehatan menjadi indeks tertinggi sejak tahun 2010 (80,40) hingga tahun 2022 (82,54). Kendati demikian, indeks kesehatan hanya tumbuh 2,66 persen yang menjadikan indeks paling lambat diantara indeks yang lain. Sementara indeks pendapatan menempati posisi pertengahan dengan pertumbuhan indeks sebesar 19,82 persen. Dimensi terendah dari pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang adalah dimensi pengetahuan yang ditunjukkan oleh capaian indeks pendidikan yang paling rendah dibanding indeks yang lain. Indeks pendidikan mampu tumbuh 22,25 persen dan merupakan indeks yang tumbuh paling cepat dibanding indeks yang lain. Hal ini wajar karena semakin tinggi nilai indeks maka pertumbuhannya akan semakin lambat, begitu pula sebaliknya, nilai indeks yang rendah cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih cepat.



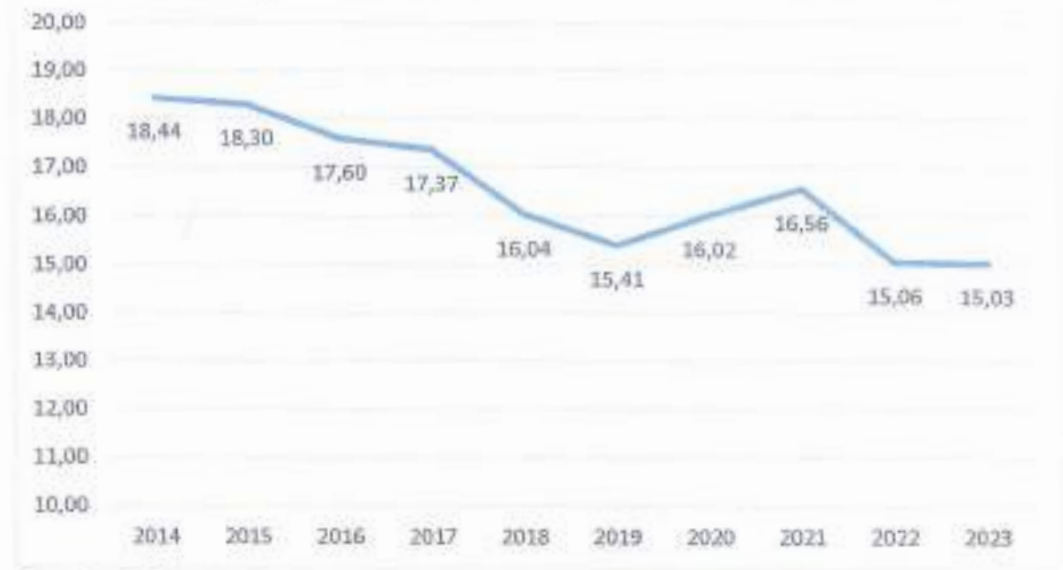


Sumber: BPS, diolah.

Gambar II.14.
Perbandingan Indeks Pembentuk IPM Kabupaten Pemalang, Kondisi Awal Metode Baru (2010) dan Kondisi Saat Ini (2022)

4. Angka Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Besarnya pengeluaran (dalam rupiah) yang merupakan nilai minimum kebutuhan dasar dinamakan garis kemiskinan. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.



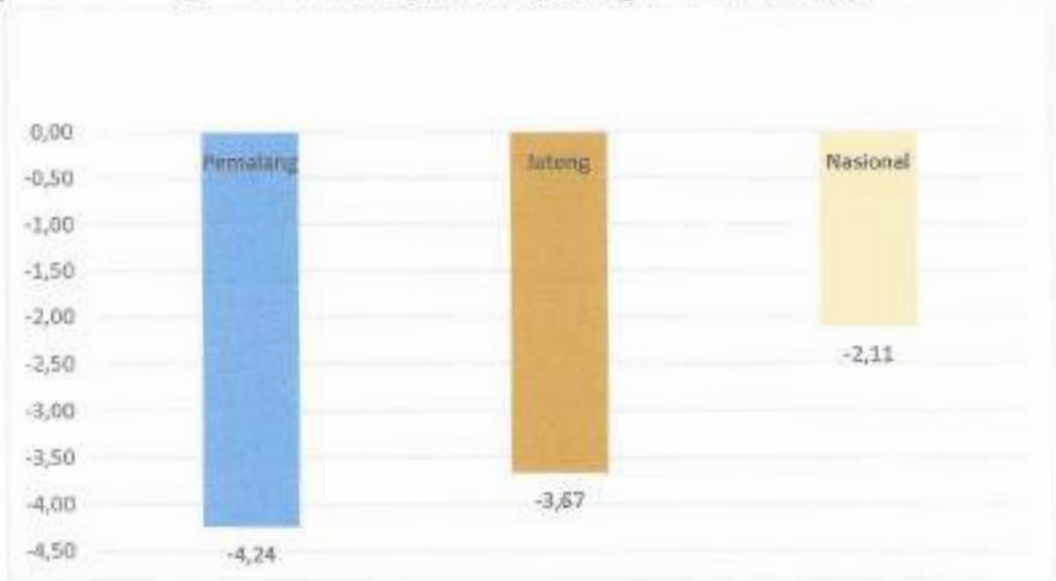
Sumber: BPS, diolah

Gambar II.15.
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2023

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang secara umum memiliki tren menurun. Tahun 2014 kemiskinan sebesar 18,44

persen dan tahun 2023 tingkat kemiskinan turun menjadi 15,03 persen. Dari sisi jumlah, penduduk miskin Kabupaten Pemalang di tahun 2023 sebanyak 195,57 ribu jiwa, berkurang sebesar 41,41 ribu jiwa dari 236,98 ribu jiwa di tahun 2014.

Namun demikian, meski tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang tahun 2023 lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 10,77 persen dan Nasional yang sebesar 9,36 persen, tetapi kinerja penurunan kemiskinan Kabupaten Pemalang selama satu dasawarsa terakhir lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang turun sebesar 4,24 poin persen, sedangkan Jawa Tengah turun 3,67 poin persen dan Nasional turun sebesar 2,11 poin persen sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.16.
Penurunan Kemiskinan
Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa persen dan berapa banyak jumlah penduduk miskin, namun juga terkait seberapa dalam dan seberapa parah kemiskinan terjadi. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kesenjangan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin jauh jarak rata-rata pengeluaran perkapita penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan seberapa besar variasi pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin besar nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sepanjang periode 2014-2023 terlihat bahwa indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan memiliki pola fluktuasi yang sama. Pada tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Pemalang sebesar 2,40 dan Indeks Keparahannya sebesar 0,61. Berikut perkembangan indikator kemiskinan di Kabupaten Pemalang selama periode 2014-2023.

X

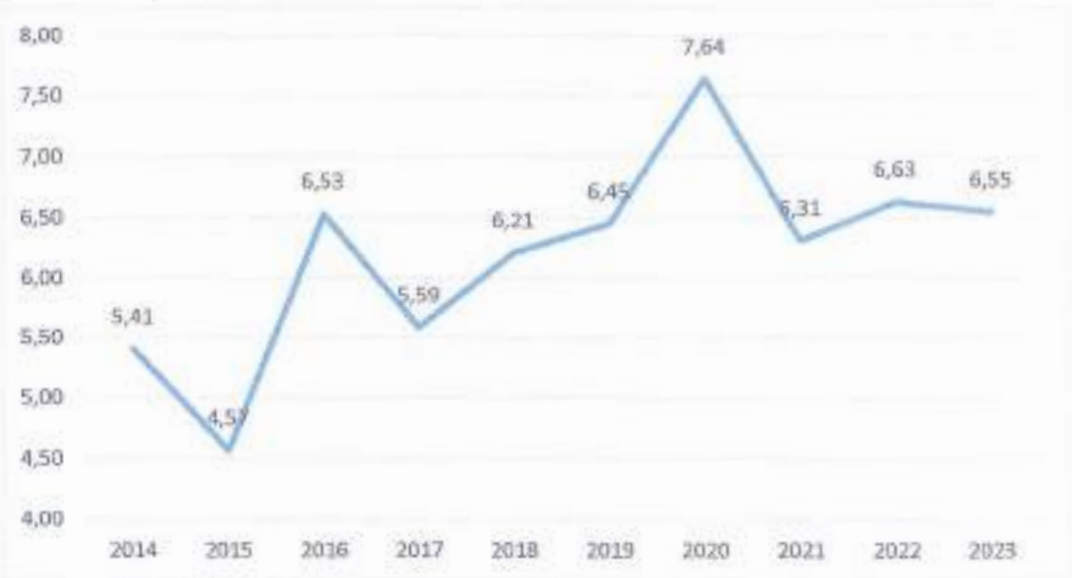
Tabel II.14.
Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Pemalang
Tahun 2014-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2014	287.358	236,98	18,44	2,39	0,53
2015	298.622	235,53	18,30	3,93	1,24
2016	319.434	227,08	17,60	3,04	0,80
2017	331.587	225,00	17,37	3,52	1,00
2018	351.183	208,34	16,04	2,96	0,83
2019	372.115	200,67	15,41	2,55	0,57
2020	389.209	209,03	16,02	2,86	0,68
2021	401.857	215,08	16,56	2,92	0,77
2022	429.549	195,84	15,06	2,43	0,57
2023	467.204	196,57	15,03	2,40	0,61

Sumber: BPS, diolah

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (a) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (c) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.17.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang
Tahun 2014-2023

TPT Kabupaten Pemalang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu 2014 sampai 2023. Pada tahun 2014, TPT menunjukkan angka 5,41 persen dan mencapai 6,55 persen pada tahun 2023. Penurunan ini tentu perlu diperhatikan kembali terkait kualitas tenaga kerja dan angkatan kerja di Kabupaten Pemalang agar



nantinya mampu menjadi tenaga kerja yang lebih produktif dan menyejahterakan keluarganya.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan keberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan aspek integral dari pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan dan hak-hak anak-anak. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan pencapaian kesejahteraan sosial, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Pada dasarnya, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, sektor swasta, dan lembaga-lembaga internasional. Kolaborasi dan upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan perlindungan anak-anak secara holistik. Adapun indeks kekerasan anak yang menjadi salah satu indikator analisis perlindungan anak, mengalami fluktuasi dimana pada lima tahun terakhir sempat mengalami kenaikan di tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 0,01 di tahun 2023.

Tabel II.15.
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Indikator	Indikator Proksi	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Perlindungan Anak	Indeks Kekerasan Anak	(0,08)34	(0,08)52	(0,15)62	(0,09)42	(0,01)48

Sumber: DinsosKBPP, 2024

2. Pembangunan Gender

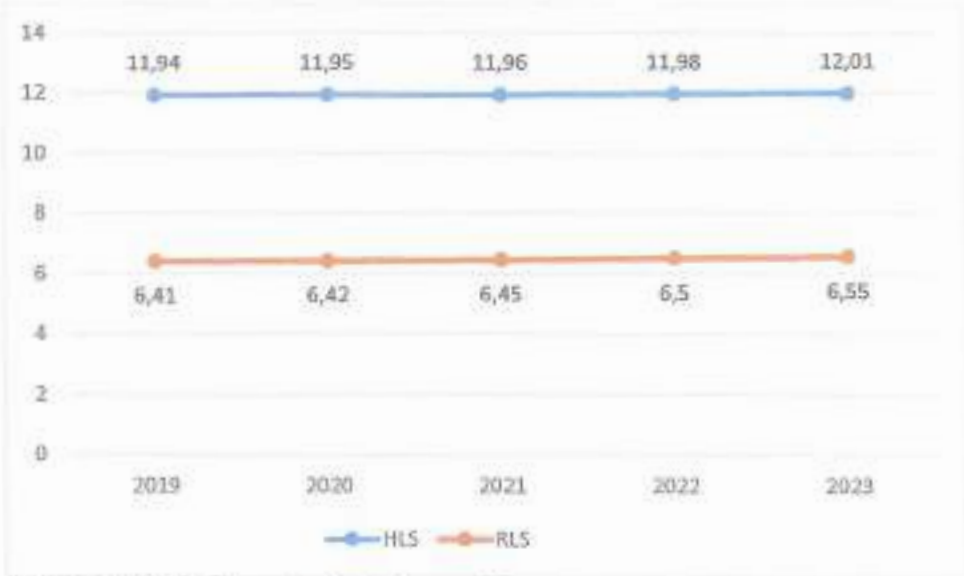
Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat



hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Indeks pembangunan gender di Kabupaten Pemalang sudah cukup tinggi dimana pada tahun 2019 memiliki capaian 85,81 dan meningkat hingga mencapai 87,14 di tahun 2023.

Adapun pada indeks pemberdayaan gender (IDG) yang melihat sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, maka dari capaian yang ada masih jauh dari harapan. Terlihat indeks pemberdayaan gender pada tahun 2019 mencapai 80,08 dan pada saat di tahun 2022 meningkat menjadi 81,57. Pada tahun 2023 IPG sudah tidak dirilis oleh Badan Pusat Statistik.



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2019-2023

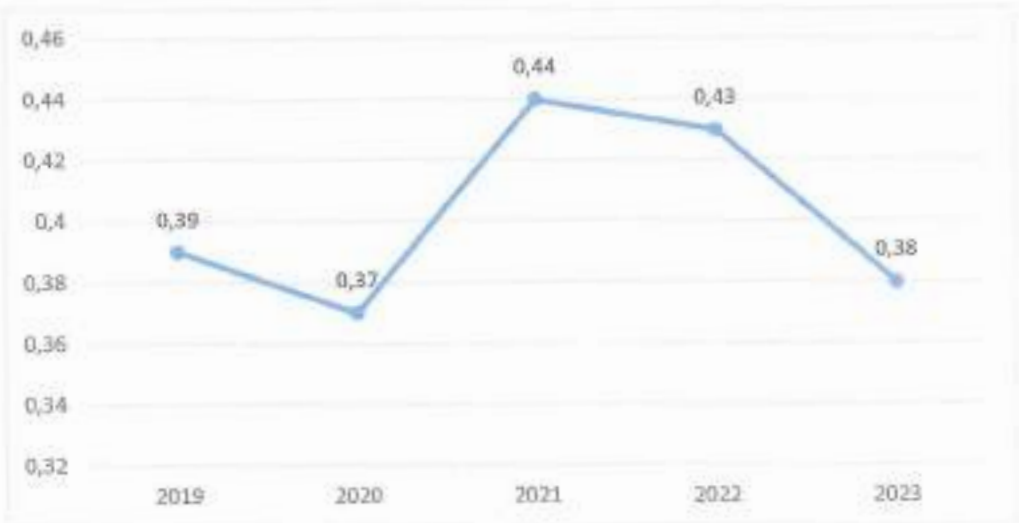
Gambar II.18.
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

3. Ketimpangan Gender

Kesetaraan gender menjadi target pembangunan di banyak negara terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar



tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender bernilai antara 0 dan 1. IKG sebesar 0 (nol) mencerminkan adanya kesetaran gender yang sempurna yang menyebabkan pencapaian pembangunan ada pada tingkat optimalnya. IKG sebesar 1 (satu) mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender tersebut.



Sumber: BPS, diolah

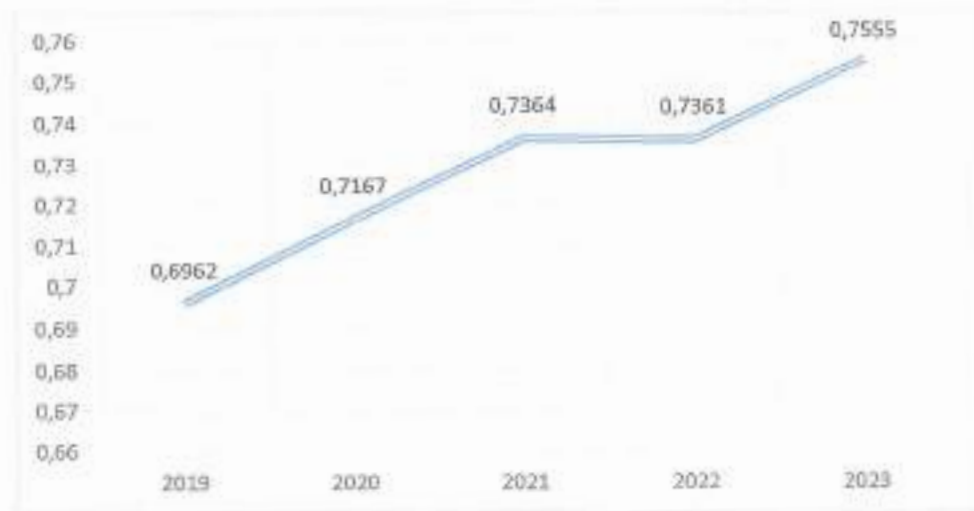
Gambar II.19.
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Hasil penghitungan BPS menunjukkan bahwa nilai IKG Kabupaten Pemalang tahun 2023 sebesar 0,38. Nilai ini mencerminkan bahwa kerugian/ kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender adalah sebesar 38 persen. Perkembangan nilai IKG Kabupaten Pemalang sejak tahun 2019 cenderung fluktuatif. IKG sempat menurun hingga 0,37 (2020) kemudian kembali meningkat menjadi 0,44 (2021). Capaian IKG tahun 2022 meskipun turun menjadi 0,43, namun masih lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 lalu.

4. Pembangunan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. IDM dapat menentukan status desa menjadi Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal berdasarkan nilai dari indeks-indeks tersebut. Capaian indeks pembangunan desa di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:





Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/>

Gambar II.20.
Indeks Desa Membangun Kabupaten Pemalang
Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar di atas, nilai IDM Kabupaten Pemalang dari Tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022, IDM mengalami penurunan. Adapaun penyebab menurunnya IDM tahun 2022 adalah karena persentase anggaran untuk penanganan dampak Covid 19 dan BLT DD masih tinggi sehingga menyebabkan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana desa menjadi berkurang, termasuk pembangunan untuk infrastruktur ekonomi seperti jaringan irigasi, pasar desa, BUMDes/BUMDesMa. Sehingga banyak sarana dan prasarana desa terutama jalan yang kurang terpelihara sehingga mempengaruhi nilai IDM.

Indeks Desa akan menjadi indikator kinerja pembangunan desa yang universal, sejalan dengan implementasi pemerataan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045. Indeks Desa mengukur pembangunan desa melalui enam dimensi, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa. Hasil perhitungan Indeks Desa akan digunakan secara resmi pada tahun 2025.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

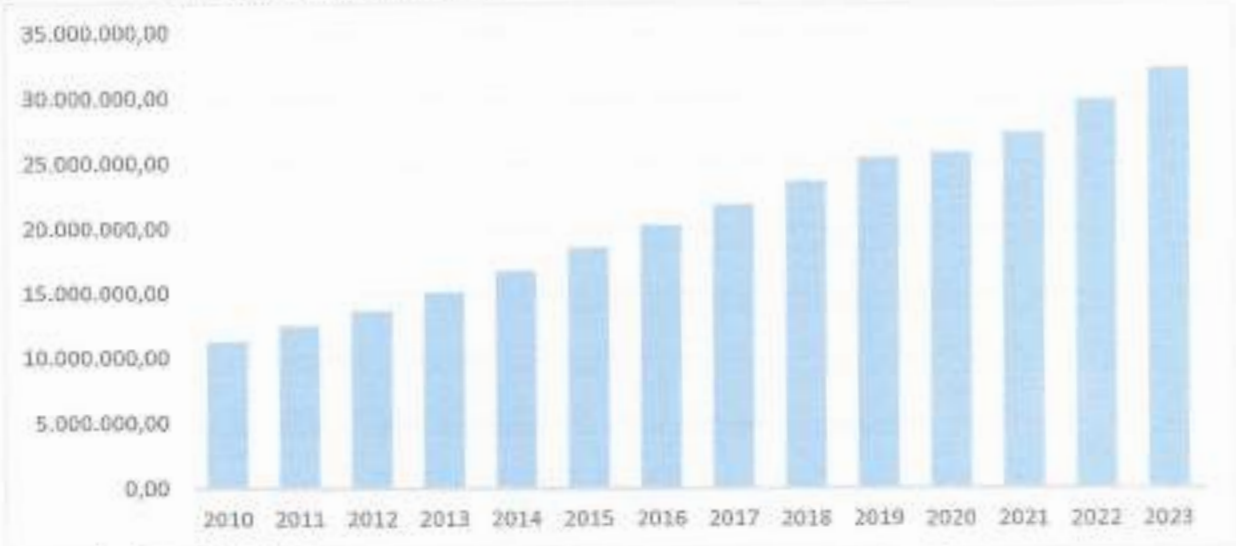
Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi pembangunan 2045.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Suatu daerah memiliki karakteristik, pola, struktur masing-masing yang menjadi keunggulan daerah untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan ini menjadi daya tarik atau potensi yang dapat mengangkat daya perekonomian. Hal inilah yang disebut sebagai potensi ekonomi.

Salah satu indikator yang menggambarkan daya saing ekonomi daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa

yang dihitung menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun tertentu sebagai dasar. Untuk melihat struktur serta pergeseran ekonomi menggunakan PDRB ADHB sedangkan ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2010-2024

Gambar II.21.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2023 (Juta Rupiah)

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Pemalang memiliki pola peningkatan dari pada pelaksanaan pembangunan. Peningkatan tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 11.282.196,10 pada tahun 2010; Rp 20.213.315,71 pada tahun 2016, Rp 27.443.892,73 pada tahun 2021, dan terakhir berada pada angka Rp 32.355.023,82 di tahun 2023 (dalam juta rupiah).

Distribusi PDRB ADHB menggambarkan struktur dan pergeseran jenis lapangan usaha yang sedang menonjol di suatu daerah. Kabupaten Pemalang selama ini memiliki keunggulan ekonomi di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Ketiga kategori lapangan usaha tersebut mendominasi dalam struktur ekonomi di Kabupaten Pemalang selama pelaksanaan pembangunan.

Tabel II.16.

Distribusi Persentase PDRB (ADHB) Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

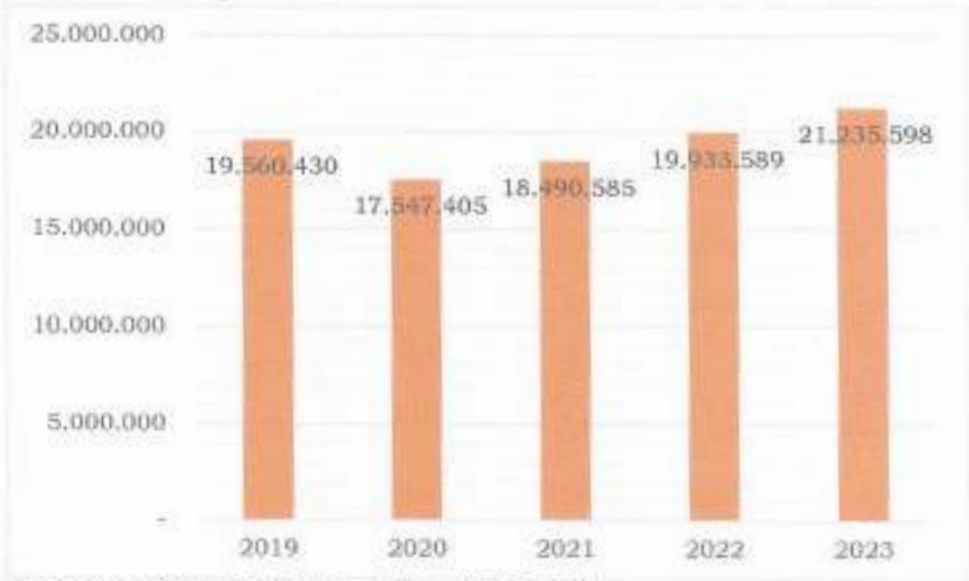
KATEGORI LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,44	27,02	27,04	26,57	25,93
B. Pertambangan dan Penggalian	3,99	4,06	3,98	3,77	3,66
C. Industri Pengolahan	21,99	21,94	21,96	21,99	22,38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
F. Konstruksi	4,60	4,44	4,67	4,47	4,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi...	15,45	14,83	15,29	15,33	15,36
H. Transportasi dan Pergudangan	2,69	1,88	1,85	2,98	3,18



KATEGORI LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,20	5,01	5,14	5,42	5,63
J. Informasi dan Komunikasi	2,21	2,57	2,55	2,42	2,42
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,05	3,07	3,10	3,13	3,01
L. Real Estate	1,68	1,68	1,66	1,62	1,62
M,N. Jasa Perusahaan	0,38	0,35	0,35	0,35	0,35
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan...	3,08	3,04	2,79	2,67	2,60
P. Jasa Pendidikan	6,07	6,09	5,78	5,40	5,32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,18	1,13	1,06	1,05
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,88	2,65	2,53	2,64	2,68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2019-2023

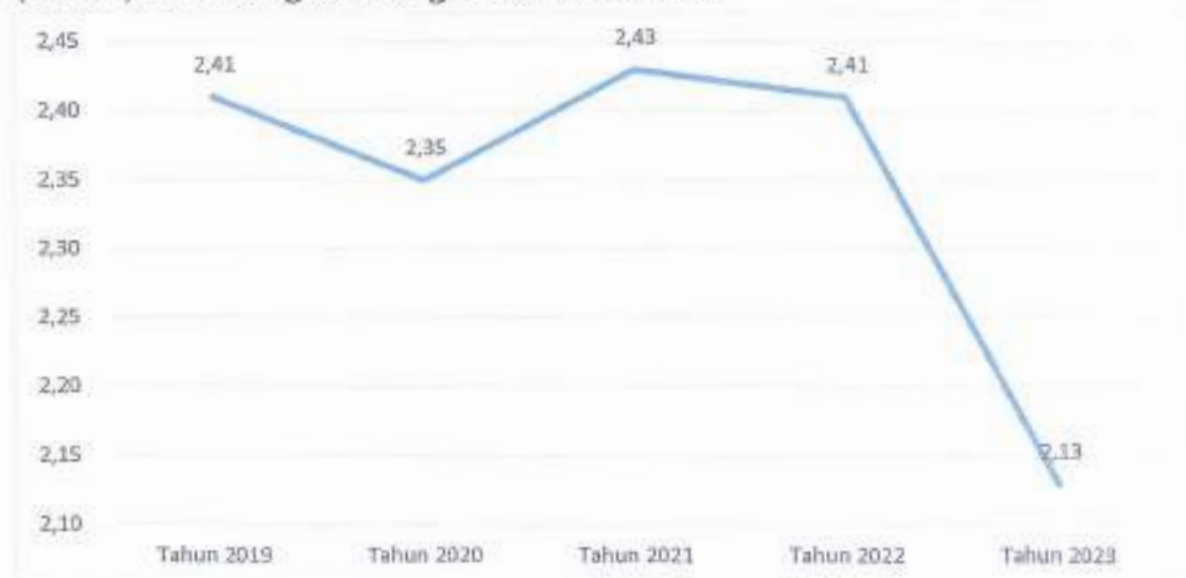
Gambar II.22.
PDRB per Kapita Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023 (Ribu Rp)

Pergerakan PDRB per kapita di Kabupaten Pemalang dapat dilihat melalui grafik di atas, diketahui bahwa PDRB per kapita mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023. Namun Pada tahun 2020, PDRB per kapita turun menjadi 17,54 juta rupiah karena terdampak pandemi Covid-19. Kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 18,49 juta rupiah, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2023 di angka 21,23 juta rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian khususnya



pendapatan masyarakat di Kabupaten Pemalang sudah berjalan cukup baik walaupun sempat terpuruk pada saat Pandemi Covid-19 melanda.

Rasio kewirausahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat aktivitas kewirausahaan pada suatu wilayah. Rasio kewirausahaan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika kewirausahaan dalam suatu wilayah. Secara umum, rasio kewirausahaan di Kabupaten Pemalang cukup dinamis atau fluktuatif berada di angka 2,00 – 2,50 dimana pada tahun 2019 sebesar 2,41 turun menjadi 2,235 pada tahun 2020 dikarenakan dampak negatif dari pandemi Covid-19. Namun pasca pandemi, seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi Kabupaten Pemalang, rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Pemalang membaik menjadi 2,43 pada tahun 2021 dan 2,41 pada tahun 2022. Rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Pemalang kembali turun cukup dalam pada tahun 2023 di angka 2,13. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Pemalang lebih cenderung memilih bekerja pada sektor formal (buruh) dibandingkan dengan berwirausaha.



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang

Gambar II.23.

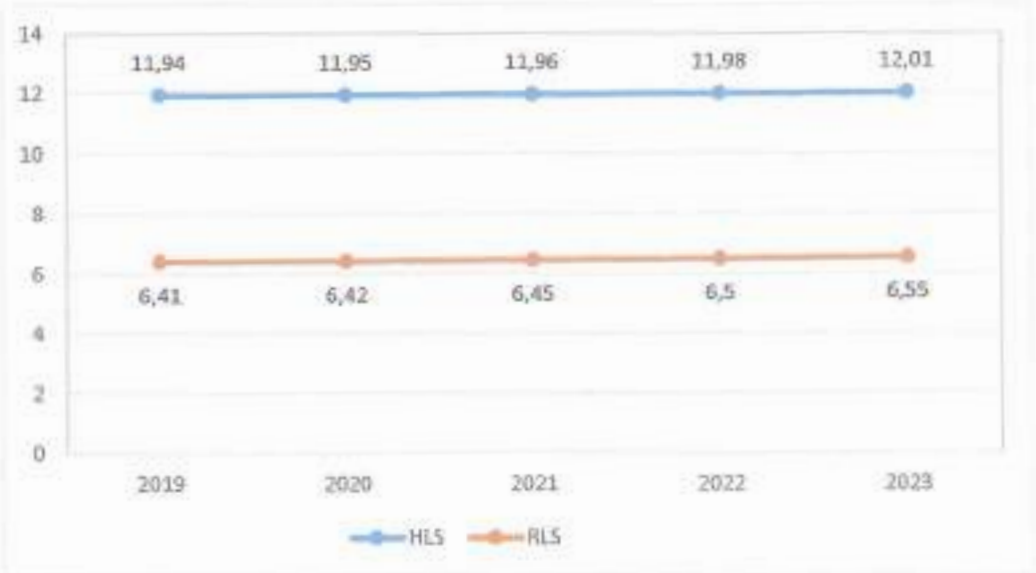
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

2.3.2 Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Daya saing SDM ini akan menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dimana berfokus pada analisis terkait kompetensi masyarakat Pemalang. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sebagai komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang

semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Selama periode 2019-2023 angka RLS mampu tumbuh dari 6,14 menjadi 6,55 pada tahun 2023. Pada tahun 2019 penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata menjalani pendidikan formal hanya selama 6,14 tahun atau setara kelas 6 Sekolah Dasar. Angka ini terus meningkat hingga 6,55 tahun di tahun 2023, atau setara tamat Sekolah Dasar.



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.24.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Indikator harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan pola yang hampir sama. Pada tahun 2023 penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Pemalang memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan formal selama 12,01 tahun atau setara kelas 3 SMA.

Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Indikator ini mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Adapun capaian angka harapan hidup di Kabupaten Pemalang mencapai 73,98 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki harapan untuk hidup hingga usia 73-74 tahun.

Tabel II.17.
Harapan Lama Sekolah Dan Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata Lama Sekolah	6,41	6,42	6,45	6,50	6,55
2	Harapan Lama Sekolah	11,94	11,95	11,96	11,98	12,01
3	Angka Harapan Hidup	73,22	73,40	73,53	73,65	73,98

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2019-2023

Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis dan memahami informasi. Namun, dalam konteks yang lebih luas, literasi juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai



bentuk informasi, termasuk literasi numerasi (kemampuan matematika) dan literasi digital (kemampuan menggunakan teknologi dan informasi digital). Adapun pembangunan literasi di Kabupaten Pemalang masih belum optimal. Namun progress dari pelaksanaan program pembangunan selama ini berdampak positif dimana budaya literasi masyarakat meningkat hingga mencapai 35,05 pada tahun 2023 dan indeks pembangunan literasi masyarakat capaiannya sebesar 11,00 pada tahun 2023.

Tabel II.18.

Indikator Literasi Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Indikator	Indikator Proksi	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Literasi/Numerasi	Budaya Literasi Masyarakat	NA	NA	22,38	28,98	35,05
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	NA	7,033	9,96	15,47	11,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang, 2023

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pemalang memiliki tren fluktuatif pada beberapa tahun terakhir dimana pada tahun 2023 mencapai 69,48 lebih besar bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 66,27. Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja yang menurun menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi tidak semakin baik.

Tabel II.19.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,27	65,57	65,9	69,91	69,48

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang

2.3.3 Aspek Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Gambaran terkait infrastruktur di Kabupaten Pemalang menyajikan data tentang infrastuktur pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar lainnya.

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

IKLI merupakan Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap 12 jenis layanan infrastruktur diantaranya jalan, irigasi, air minum, drainase, persampahan, RTH, LPJU, rumah susun, APILL, perparkiran, terminal, hotspot.



Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik infrastruktur merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat.

Sebagai bagian dalam sistem pelayanan masyarakat, penyediaan infrastruktur yang memadai sudah menjadi keharusan hal ini di dorong oleh permintaan masyarakat akan layanan infrastruktur yang harus semakin baik. Sebaliknya penyediaan infrastruktur yang kurang optimal dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi berkurang, tingginya biaya ekonomi serta mempunyai implikasi sulitnya Daerah dalam berkompetisi menarik investor dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kualitas infrastruktur lebih baik.

Peran infrastruktur yang sangat strategis tersebut menjadikan pembangunan infrastruktur bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.

IKLI sebagai salah satu indikator tujuan daerah dalam jangka menengah yang ditargetkan untuk terus meningkat sampai dengan tahun 2026 menjadi 71,33. Terdapat 12 (dua belas) layanan infrastruktur yang menjadi pengukuran kepuasan masyarakatnya yaitu irigasi, jalan, air minum, drainase, persampahan, RTH/Taman Kota, LPJU, Rumah Susun, APILL, perparkiran, terminal dan hotspot. Capaian IKLI yaitu:

Tabel II.20.
Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

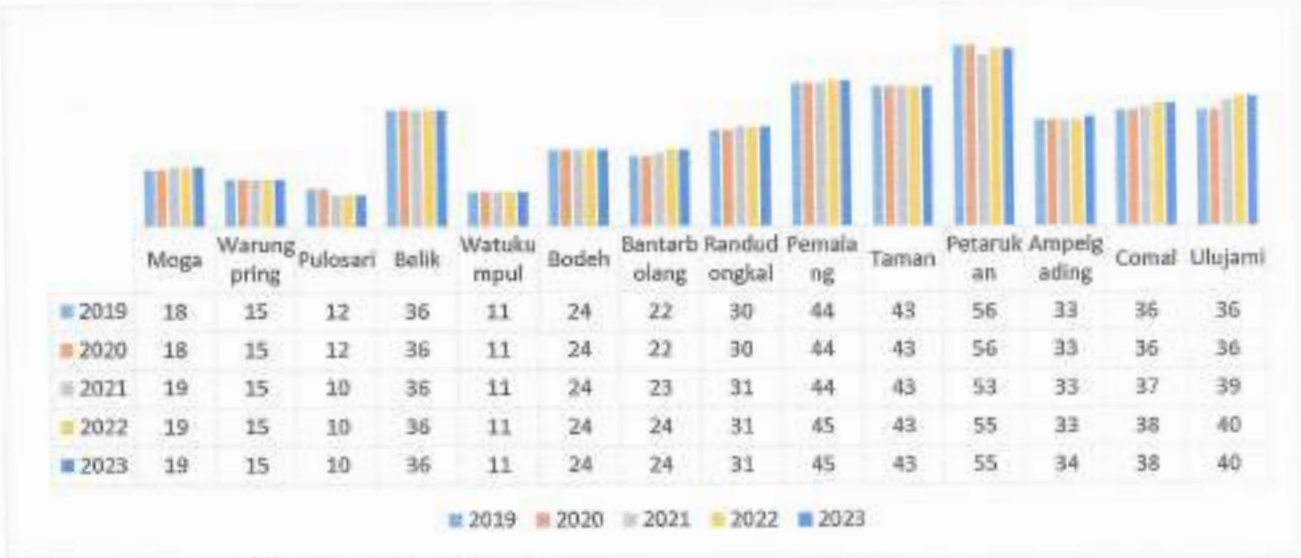
No	Tahun	Target	Capaian
1	2019	-	73,88
2	2020	71,03	71,03
3	2021	71,08	74,87
4	2022	71,13	74,02
5	2023	71,18	72,17

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang, 2023

2. Infrastruktur Pendidikan

Jumlah TK/ sederajat di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019, jumlah TK/ sederajat secara keseluruhan sejumlah 416 unit dan bertambah menjadi 425 di tahun 2023. Jumlah TK/ sederajat di tiap kecamatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Gambar berikut.

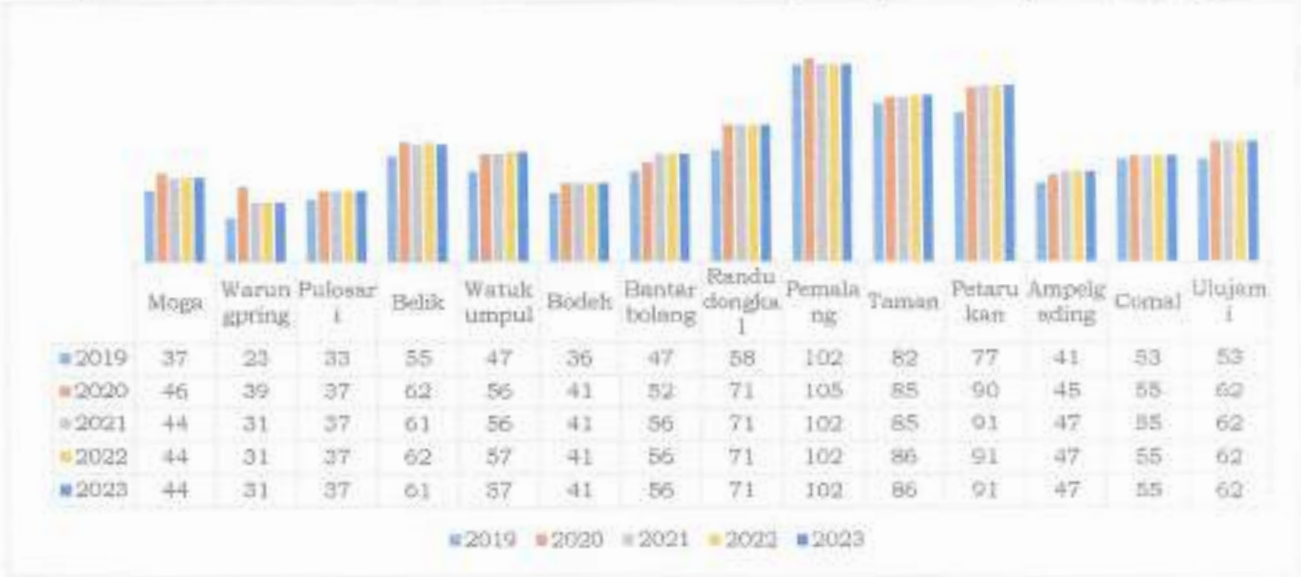
✓



Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka 2023

Gambar II.25.
Jumlah TK/Sederajat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Jumlah SD/ sederajat di Kabupaten Pemalang juga menunjukkan kenaikan. Bangunan SD/ sederajat yang pada tahun 2019 berjumlah 744 unit bertambah menjadi 841 unit di tahun 2023. Jumlah SD/ sederajat tiap kecamatan dari tahun 2019 sampai 2023 disajikan pada diagram berikut.

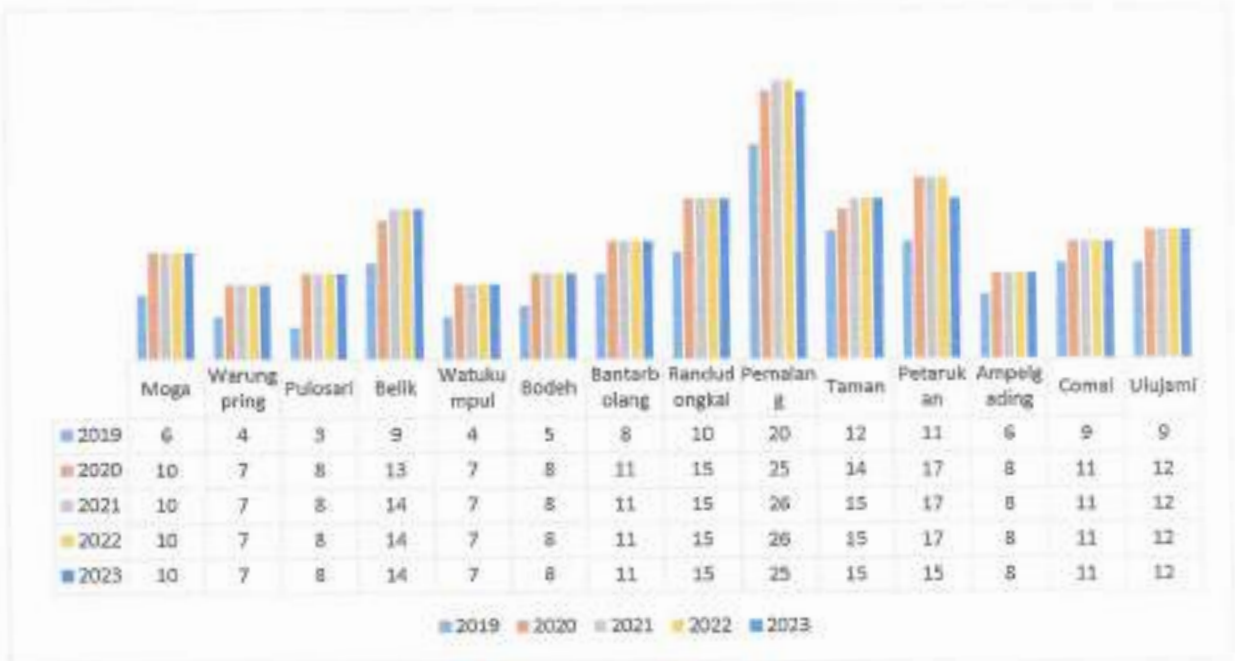


Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka 2023

Gambar II.26.
Jumlah SD/ Sederajat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Jumlah SMP/ sederajat di Kabupaten Pemalang juga mengalami peningkatan dalam waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah SMP/ sederajat sebanyak 116 unit yang meningkat menjadi 166 unit di tahun 2023. Perkembangan jumlah SMP/ sederajat masing-masing kecamatan dalam kurun waktu 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada Gambar berikut.



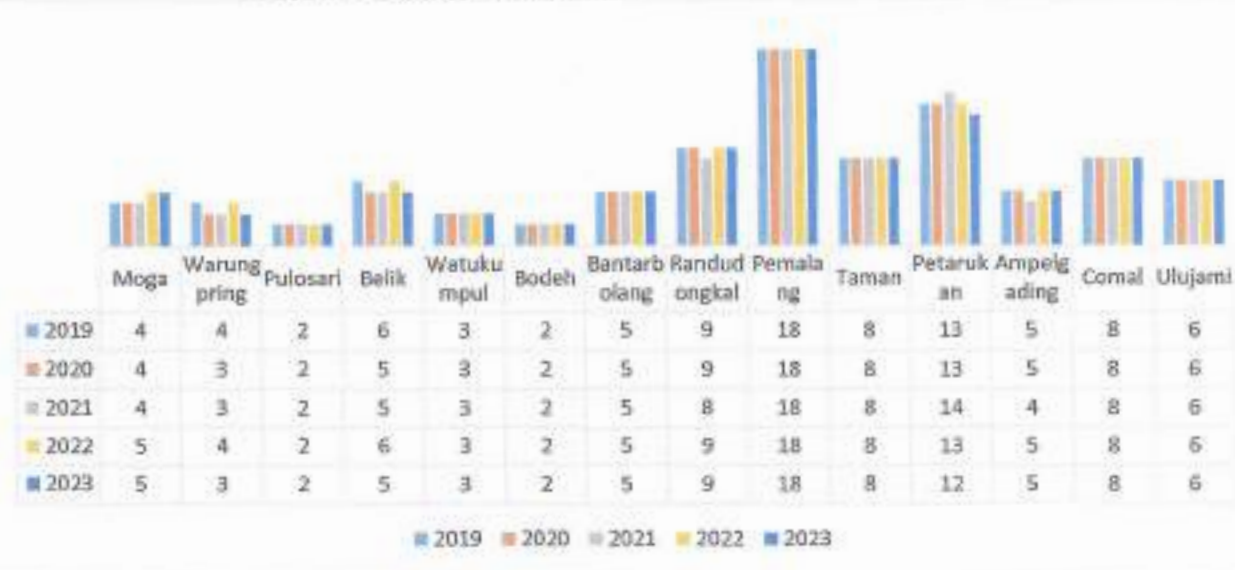


Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka 2023

Gambar II.27.

Jumlah SMP/ Sederajat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Selama kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2023, jumlah SMA/ sederajat di Kabupaten Pemalang berkurang 2 unit sekolah. Pada tahun 2019, terdapat 93 unit sekolah dan pada tahun 2023 menjadi 91 unit sekolah. Data perkembangan jumlah sekolah SMA/ sederajat tiap kecamatan disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka 2023

Gambar II.28.

Jumlah SMA/ Sederajat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

3. Infrastruktur Kesehatan

Infrastruktur kesehatan adalah rangkaian fasilitas, sumber daya, dan sistem yang dibangun untuk menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Infrastruktur ini mencakup berbagai elemen yang membentuk dasar penyelenggaraan layanan kesehatan dan membantu mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Infrastruktur kesehatan yang baik merupakan



prasyarat untuk memberikan layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas kepada masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kesehatan memerlukan investasi yang berkelanjutan dari pemerintah dan pihak terkait guna memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat konsisten meningkat.

Tabel II.21.
Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,005 37	0,005 43	0,006 92	0,006 92	0,005 83
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,017	0,017	0,017	0,019	0,019
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	92	100	100	100	100
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	83,05	84,83	83,53	84,32	86,61
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (puskesmas)	92	92	92	92	100
Persentase rumah sakit terakreditasi	87,5	87,5	77,78	100	100
Persentase sarana kefarmasian dan alkes yang memenuhi standar	98	98	98	98	98
Persentase PIRT yang memenuhi syarat keamanan pangan	70	75	80	82	85

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tahun 2023 capaian rasio rumah sakit per satuan penduduk sebesar 0,00583. Sedangkan rasio puskesmas persatuan penduduk yang capaiannya tahun 2023 sebesar 0,019 masih sama dengan capaian tahun 2022. Selain itu ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2023 sudah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jenis obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap di puskesmas sudah terpenuhi. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan tahun 2023 sebesar 86,61 persen. Pada bulan Desember tahun 2023, Kabupaten Pemalang telah menerapkan UHC dengan syarat kepesertaan 95 persen keaktifan 75 persen.

Selama Tahun 2019-2023, terjadi peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, meliputi Puskesmas yang terakreditasi sebesar 92 persen di tahun 2019 dan pada tahun 2023 naik menjadi sebesar 100 persen. Sarana farmasi dan alat kesehatan yang sesuai standart di tahun 2019 sebesar 98 masih sama di tahun 2023. Persentase PIRT yang memenuhi syarat keamanan pangan sebesar 70 persen di tahun 2019 naik menjadi sebesar 85 persen di Tahun 2023. Sedangkan untuk rumah sakit yang terakreditasi mengalami peningkatan dari sebesar 87,5 persen di tahun 2019 naik menjadi sebesar 100 persen di tahun 2023 yang menunjukkan seluruh rumah sakit yang ada telah terakreditasi dengan baik.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kebijakan pemerintah untuk memperkuat fungsi pusat kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, salah satunya dengan adanya pengaturan tentang rasio ideal puskesmas terhadap jumlah penduduk yaitu 1 puskesmas banding 30.000 penduduk. Jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Pemalang saat ini sebanyak 25 puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan. Dengan kondisi sekarang masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan yaitu dokter,



perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan, tenaga sanitasi lingkungan, tenaga ahli gizi, tenaga kefarmasian, tenaga ahli laboratorium dan tenaga non kesehatan. Dalam rangka memenuhi rasio ideal jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk yaitu 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk, maka jika diasumsikan penduduk Kabupaten Pemalang berjumlah 1.500.000 maka jumlah puskesmas di Kabupaten Pemalang masih mengalami kekurangan 25 puskesmas.

4. Prasarana dan Sarana Lainnya

Persentase penduduk yang memiliki akses air minum menunjukkan kenaikan dari 88,01 persen di tahun 2022 menjadi 90,05 persen pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan intervensi program penambahan sambungan rumah yang dilaksanakan pada tahun 2023 baik yang dilakukan oleh BP/KPSPAMS maupun penambahan jaringan PDAM yang mampu menambah layanan kepada masyarakat. Namun demikian persentase penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik menunjukan penurunan dari 95,49 persen di Tahun 2022 menjadi 91,75 persen di Tahun 2023. Selanjutnya, persentase drainase dalam kondisi baik juga menunjukan peningkatan dari 75,06 persen di Tahun 2022 menjadi 76,55 persen di Tahun 2023.

Terkait dengan infrastruktur konektivitas wilayah, persentase panjang jalan kondisi mantap di Kabupaten Pemalang mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 menjadi hanya 69,43 persen. Kondisi ini menurun dari tahun sebelumnya yakni 2022 yang mencapai 73 persen. Selain itu, pemanfaatan tata ruang wilayah yang sesuai dengan RTRW mencapai 100 persen.

Dari sisi pengentasan kawasan kumuh, maka terlihat berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh, dimana di Tahun 2017 seluas 2,43 persen wilayah Kabupaten Pemalang merupakan kawasan permukiman kumuh dan di Tahun 2023 hanya tinggal seluas 0,91 persen wilayah Kabupaten Pemalang yang masih merupakan kawasan permukiman kumuh. Adapun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani di Kabupaten Pemalang di Tahun 2023 sebesar 30,66 meningkat dari Tahun 2022 sebesar 29,09 persen. Dimana jumlah RTLH yang ditangani dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sebanyak 14.742, khusus tahun 2023 RTLH yang ditangani sebanyak 1.180 rumah (1,57 persen).

Tabel II.22.
Capaian Penanganan Rumah Layak Huni Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Tahun	Banyaknya Rumah Layak Huni	
	Jumlah	Satuan
2019	4.701	Unit
2020	3.358	Unit
2021	3.037	Unit
2022	2.466	Unit
2023	1.180	Unit
Total	14.742	Unit

Sumber: Disperkim Kabupaten Pemalang 2024



Tabel II.23.
Jumlah Rumah Layak Huni Kabupaten Pemalang
Tahun 2019-2023

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Moga	16.582	17.411	18.282	18.342	18.480
2	Pulosari	13.913	14.609	15.339	15.618	15.752
3	Belik	25.501	26.776	28.115	29.069	29.314
4	Watukumpul	18.709	19.644	20.628	21.137	21.434
5	Bodeh	12.410	13.031	13.683	13.724	13.897
6	Bantarbolang	18.511	19.437	20.409	20.439	20.601
7	Randudongkal	28.198	29.608	31.088	31.124	31.364
8	Pemalang	52.246	54.858	57.601	57.607	57.820
9	Taman	32.242	33.854	35.547	35.584	35.830
10	Petarukan	48.152	50.560	53.088	53.113	53.152
11	Ampelgading	32.242	33.854	35.547	35.601	35.685
12	Comal	19.535	20.512	21.538	21.560	21.647
13	Ulujami	23.003	24.153	25.361	25.415	25.475
14	Warungpring	10.042	10.844	11.386	11.776	11.801
Total		351.286	369.151	387.612	390.109	392.252

Sumber: Disperkim Kabupaten Pemalang 2024

2.3.4 Aspek Daya Saing Iklim Investasi

Aspek daya saing iklim investasi mencakup sejumlah faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi. Daya saing iklim investasi menjadi krusial karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan perkembangan sektor bisnis.

1. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban mendukung dalam penciptaan iklim investasi. Ketika suatu daerah aman dan tertib, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi di saerah tersebut. Salah satu indikator keamanan dan ketertiban adalah kasus kejahatan.



Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2019-2023

Gambar II.29.
Jumlah Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang Masuk
Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023



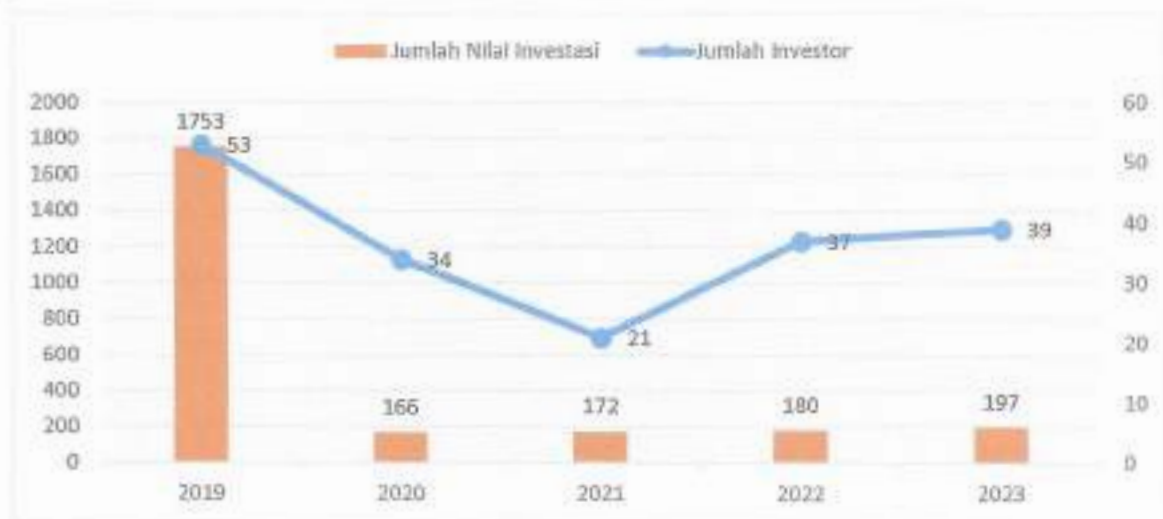
Jumlah perkara pidana dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Jumlah tertinggi terjadi di tahun 2020 sebanyak 221 perkara, dan pada tahun 2019 menunjukkan angka terendah (154 perkara) dalam kurun waktu tersebut. Jumlah perkara perdata mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019, terdapat 49 perkara perdata yang masuk dan berkurang terus sampai mencapai angka 35 perkara di tahun 2023.

2. Kemudahan Perijinan

Beberapa komponen dalam mendukung kemudahan perijinan adalah regulasi dan pelayanan perijinan. Dari segi regulasi, beberapa regulasi yang mendukung, yaitu Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang dirubah melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelaksanaan pelayanan perijinan yang efektif diperlukan untuk lebih menarik investor. Penerapan aplikasi *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) akan lebih mempermudah dalam pengurusan perijinan. Dalam perkembangannya, aplikasi ini akan diintegrasikan dengan data spasial, yaitu peta Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Untuk melihat kondisi investasi di Kabupaten Pemalang berikut adalah grafik terkait Jumlah Investor dan Nilai Investasi pada tahun 2019 – 2023.



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2024

Gambar II.30.
Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Pemalang
Tahun 2019 - 2023

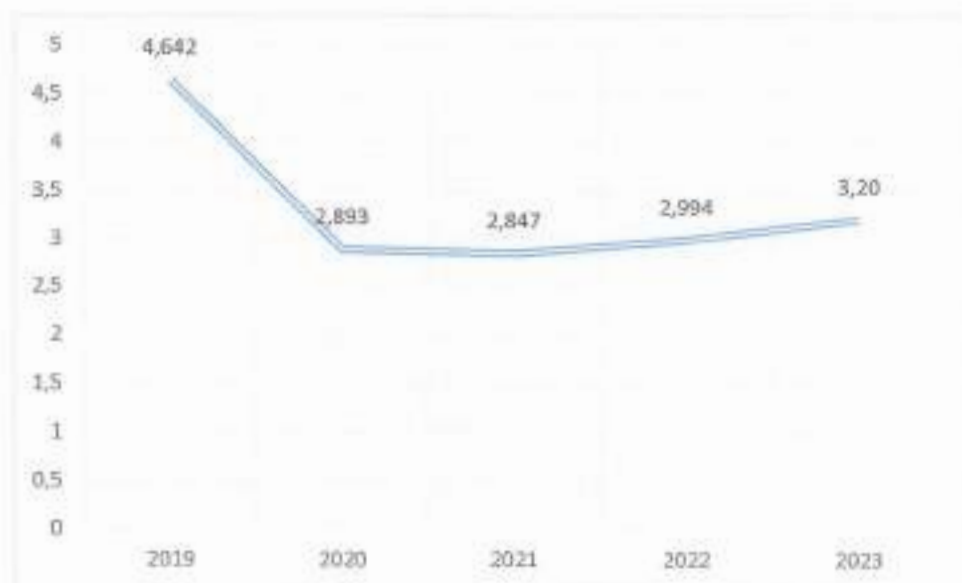
Pada tahun 2019, nilai investasi di Kabupaten Pemalang cukup tinggi mencapai Rp. 1,75 Trilyun. Namun demikian pada tahun tersebut terjadi Pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian dan mengakibatkan Nilai Investasi di Kabupaten Pemalang turun drastis pada tahun 2020 menjadi Rp. 166 Milyar. Seiring pulihnya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19, kondisi investasi Kabupaten Pemalang juga ikut membaik. Hal ini terlihat pada peningkatan nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp. 172 Milyar dan tahun 2023 sebesar Rp. 197 Milyar.

3. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah, baik tingkat lokal maupun regional, untuk bersaing dan berhasil dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Daya saing daerah bukan hanya tentang keunggulan ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan. Upaya untuk meningkatkan daya saing daerah biasanya melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi.

Daya saing daerah dapat terlihat dari indikator indeks daya saing daerah. Adapun indeks daya saing daerah di Kabupaten Pemalang secara umum mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun yang lalu dimana pada tahun 2019 sempat mencapai 4,642 dan menurun hingga tahun 2023 menjadi sebesar 3,20. Pencapaian nilai daya saing daerah Kabupaten Pemalang di setiap tahun masih termasuk kategori tinggi, dengan beberapa dukungan beberapa komponen komposit pembentuk nilai daya saing daerah. Komponen-komponen Daya Saing Daerah adalah satu kesatuan sistem yang membentuk daya saing daerah secara keseluruhan. Indikator membentuk nilai komposit dimensi. Dimensi membentuk nilai komposit Pilar. Pilar membentuk nilai komposit faktor/aspek utama. Aspek utama inilah yang membentuk nilai komposit Daya Saing Daerah.

Pada tahun 2023 aspek pembentuk utama yang mendukung tingginya nilai daya saing daerah adalah di aspek Faktor Penguat/*enabling environment*, hal ini menggambarkan bahwa saat ini Kabupaten Pemalang memiliki kekuatan di pilar kelembagaan, infrastruktur dan perekonomian daerah yang menjadi komposit pembentuk aspek Faktor penguat/*Enabling environment* tersebut. Namun Kabupaten Pemalang memiliki kelemahan di aspek pasar/market, ekosistem inovasi dan sumber daya manusia, hal ini tergambar dari rendahnya nilai beberapa pilar pendukungnya antara lain, efesiensi pasar, pendidikan dan ketrampilan dan kapasitas inovasi.



Sumber: BRIN, Tahun 2019-2023

Gambar II.31.
Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023



Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu dari berbagai daya saing yang dimiliki suatu daerah. Keberadaan BUMD ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong ataupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan UMKM, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan citra daerah.

Kabupaten Pemalang memiliki 7 (tujuh) BUMD yaitu PT. BPD Jateng (Bank Jateng), PERUMDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, PT. Aneka Usaha, PT. BPR BKK Taman, PT. BPR BKK Jateng, PT. BPR Bank Pemalang dan PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang. Hal ini sesuai dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Pemalang di masing – masing BUMD. Namun demikian hanya 5 (lima) BUMD yang secara kepemilikan sahamnya didominasi oleh saham milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu PT. Aneka Usaha, PT. PERUMDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, PT. BPR BKK Taman, PT. BPR Bank Pemalang dan PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang. Keberadaan BUMD tersebut tidak hanya untuk kepentingan profit ataupun pendapatan daerah namun juga untuk kepentingan sosial – ekonomi masyarakat Kabupaten Pemalang secara luas.

Untuk melihat kondisi BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang berikut adalah data *Return on Asset (RoA)* BUMD

Tabel II.24.
Data *Return on Asset (RoA)* BUMD Kabupaten Pemalang
Tahun 2019-2023

Nama BUMD	Return on Asset (RoA)				
	2019	2020	2021	2022	2023
PT LKMD BKD	0	2,54	2,66	2,73	2,23
PT ANEKA USAHA	2,64	0,13	-11,70	-5,21	-1,48
PT BPR BANK PEMALANG	1,72	1,27	1,06	0,22	-7,96
PT BPR BKK TAMAN	2,73	1,86	1,67	1,27	1,16
PERUMDAM TIRTA MLIA	6,62	6,5	4,97	5,50	5,55

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pemalang

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum akan menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Penunjang Pemerintahan

Kinerja utama urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), komponen perencanaan dan persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang baik. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arah Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Pelaksanaan



Reformasi Birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada Tahun 2023, IRB Kabupaten Pemalang sebesar 68,97 (kategori B).

Indeks Perilaku Anti Korupsi mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi yaitu penyuapan, pemerasan dan nepotisma. Nilai Indeks Perilaku berkisara pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti masyarakat semakin anti korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi disusun berdasarkan dua dimensi yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat. Indeks Perilaku Anti Korupsi mengalami kenaikan capaian apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Dari sisi pelayanan publik kepada masyarakat, terlihat adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pemalang dimana Indeks Pelayanan Publik meningkat menjadi 4,41 di tahun 2023. Sedangkan indeks inovasi daerah yang di tahun 2023 menjadi 40,36, dimana pada tahun sebelumnya mencapai 48.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, maka diselenggarakan penilaian Indeks reformasi Hukum. Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Data Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Pemalang baru rilis pada tahun 2023 sebesar 57.

Indeks Integritas Nasional merupakan pemetaan resiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/D. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Indeks Intergritas Nasional Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 sebesar 68,34.

Tabel II.25.
Indeks Penunjang Pemerintahan Kabupaten Pemalang
Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SAKIP	65,81	67,7	68,88	68,93	69,01
IRB	60,20	61,09	62,91	61,76	68,97
Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,70	3,84	3,88	3,93	3,92
SPBE	2,91	2,91	2,49	2,23	2,94
Indeks Kepuasan layanan Kelitbangan	80	85	82,91	83,34	83,35
Indeks Pelayanan Publik	NA	NA	3,94	4,01	4,41
Indeks Inovasi Daerah	170	796	30,32	48	40,36
Indeks Reformasi Hukum	NA	NA	NA	NA	57
Indeks Integritas Nasional	NA	NA	72,40	66,95	68,34

Sumber: RKPD Kabupaten Pemalang, 2025

Digitalisasi Pemerintahan di Kabupaten Pemalang meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang meliputi Layanan



Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai.

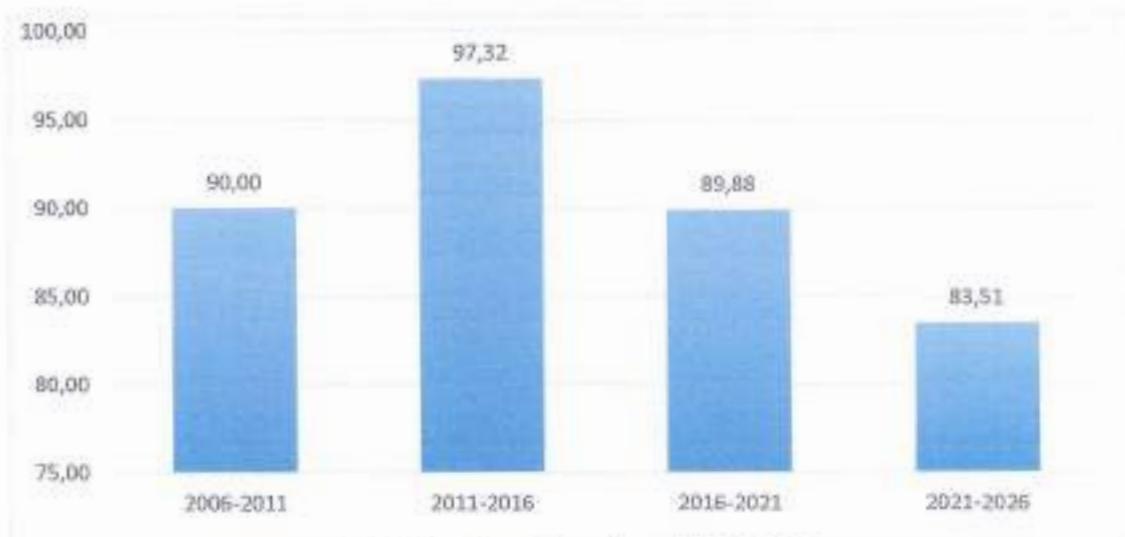
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Pemalang dibuktikan dengan penggunaan berbagai aplikasi standar nasional dengan kapabilitas fungsi teknis kolaborasi dan juga telah dilakukan optimalisasi. Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Pemalang meliputi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik SIMDU (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik Terpadu), Layanan Kesejahteraan Sosial menggunakan Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), dan Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang 2005-2025. RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikan arah RPJPN.

Adapun dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, Kabupaten Pemalang memiliki visi yaitu "Kabupaten Pemalang Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera". Dalam mewujudkan visi tersebut, pembangunan jangka panjang dibagi menjadi empat tahapan pembangunan jangka menengah yaitu:

1. RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011;
2. RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016;
3. RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
4. RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.



Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang 2005-2025

Gambar II.32.

Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja RPJPD Kabupaten Pemalang pada RPJMD Periode I (2006-2011) adalah Tinggi (90 persen). Sementara itu, tingkat capaian kinerja RPJPD Kabupaten Pemalang pada RPJMD Periode II (2011-2016) adalah Sangat Tinggi (97,32 persen) dan tingkat capaian kinerja RPJPD Kabupaten Pemalang pada RPJMD Periode III (2016-2021) dan Periode IV (2021-2026) adalah tinggi dengan skor berturut-turut 89,88 persen dan 83,51 persen.

Jika dijabarkan, maka tingkat capaian kinerja pada sasaran pembangunan RPJMD periode I (2006-2011) sebesar 90 persen dengan Predikat kinerja Tinggi. Hal ini dikarenakan dari 10 sasaran RPJMD dengan 72 indikator sasaran yang rata-rata bersifat kualitatif, hanya ada 7 indikator sasaran yang bersifat kuantitatif. Sehingga perhitungan capaian kinerja berdasarkan 7 indikator sasaran yang memiliki target capaian kinerja. Sedangkan dari pembangunan RPJMD periode II, dari 37 sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, terdapat total 68 indikator sasaran. Dari indikator sasaran tersebut ditemukan indikator sasaran yang tidak memiliki target yaitu sejumlah 19. Tingkat capaian kinerja pada sasaran pembangunan RPJMD periode II (2011-2016) ialah sebesar 97,32 persen atau Sangat Tinggi.

Pembangunan jangka menengah periode III terlihat dari 25 sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, dimana terdapat total 56 indikator sasaran. Dari indikator sasaran tersebut ditemukan indikator sasaran yang tidak memiliki nilai yaitu Indeks Gini dikarenakan indeks tersebut hanya sampai di tingkat Provinsi, tidak sampai ke level kabupaten dan tidak tersedianya data PDRB di tingkat Kecamatan. Tingkat capaian kinerja pada sasaran pembangunan RPJMD periode III (2016-2021) adalah sebesar 89,88 persen atau tinggi. Sedangkan pada RPJMD tahap terakhir dengan menggunakan dasar hitung pencapaian tahun 2022, dari 21 sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, terdapat total 34 indikator sasaran. Data capaian/realisasi indikator sasaran menggunakan data tahun 2022 sementara target pencapaian yang digunakan tetap tahun 2026 sehingga masih banyak ditemukan tingkat capaian yang rendah. Secara

umum, tingkat capaian kinerja pada sasaran pembangunan RPJMD periode IV (2021-2026) adalah sebesar 83,51 persen atau Tinggi.

Sebagai salah satu masukan untuk penyusunan kebijakan pembangunan ke depan, maka perlu ditelaah faktor penghambat dan faktor pendorong pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang. Pada pencapaian target RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025, dapat ditemui 4 (empat) aspek faktor pendorong yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Pemerintahan

Secara garis besar faktor-faktor dalam aspek pemerintahan dalam pelaksanaannya berkaitan dengan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaannya, program-program apa saja yang dicanangkan dan dilaksanakan, regulasi atau kebijakan yang diambil, dan anggaran pemerintah dalam penunjang kegiatan tersebut. Beberapa dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 yang tercapai didukung oleh aspek pemerintahan. Contoh faktor pendorong ini yaitu adanya kebijakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan yang mewajibkan semua perangkat daerah mempunyai minimal satu desa dampingan. Namun pada perkembangannya, dalam rangka pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pemalang, Satu Perangkat Daerah melakukan pendampingan terhadap tiga sampai empat desa. Selain itu, faktor tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 dari aspek pemerintah yaitu adanya faktor pendorong dari segi perencanaan dan penganggaran sudah menggunakan aplikasi yang terintegrasi yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sesuai amanat Permendagri Nomor 70 tahun 2019 sehingga terdapat konsistensi dan integrasi program dalam dokumen RPJMD, RKPD dan APBD.

Faktor pendorong lainnya di bidang pemerintahan dapat dilihat dari persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan indeks inovasi daerah. Indeks inovasi daerah di Kabupaten Pemalang diukur mulai tahun 2019 dengan nilai 170 dan meningkat pada tahun 2020 dengan nilai 796 masuk kategori inovatif. Di Tahun 2021, metode pengukuran berubah dan tidak dapat disetarakan, Kabupaten Pemalang mendapat nilai sebesar 30,32 tetap masuk dalam kategori inovatif. Untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah, perangkat daerah, kecamatan, pemerintahan desa, dan masyarakat telah didorong untuk melakukan inovasi. Di antaranya melalui lomba Kreativitas dan Inovasi tingkat Kabupaten Pemalang, maupun lomba inovasi pelayanan publik, dan inovasi-inovasi tersebut telah diterapkan. Inovasi-inovasi tersebut diantaranya adalah :

- a. E-Commerce AMANDEWI (Disparpora);
- b. Si Bolang Mahir Plus Plus (Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran Plus KK & KIA Plus JKN-KIS – Puskesmas Rowosari);
- c. Gebrak Kaki (Gerakan Bersama Baca Buku KIA untuk Menekan Kematian Ibu – Puskesmas Kalimas);
- d. SITIRTA (Sistem Informasi Terpadu Tirta Mulia – PDAM Kabupaten Pemalang);
- e. PIMPRO (Pengendalian Multi Proyek – DPU TR Kabupaten Pemalang);
- f. Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD – Disdukcatpil

- Kabupaten Pemalang);
- g. SIEMAS (Sistem Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan - Bakesbangpol Kabupaten Pemalang);
 - h. Batu Akik (bayar non tunai uji KIR Kendaraan - Dishub Kabupaten Pemalang);
 - i. Sambatsung (Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Elektronik Langsung - DPMPTSP Kb. Pemalang);
 - j. Aplikasi www.gelanganting.com (Gerakan penanggulangan Stunting - Desa Losari Kec. Ampelgading);
 - k. Aplikasi Anak Bunda (Aplikasi anak balita untuk data antropometri dengan kartu - Desa Bulakan kec. Belik);
 - l. Gemari Ceting Kayu (Gerakan Makan Ikan Cegah Stunting Kakang Mbakyu - Desa Kalirandu Kec. Petarukan);
 - m. Nasi Ceting (Nutrisi untuk cegah stunting - Desa Surajaya kec. Pemalang)
 - n. Klanting (Kelompok Laki-laki anti Stunting - Desa Tumbal Kec. Comal);
 - o. Buka Cawet (Basis Terpadu Keterbukaan Data Desa Cawet - desa Cawet Kec. Watukumpul);
 - p. SIPILKETOS (Sistem Pemilihan Ketua Osis - SMPN 1 Randudongkal);
 - q. POC TENNAS (pupuk organik cair tempe nasi nanas - Siti Rokhamah desa Gunungtiga Kec. Belik);
 - r. WEDUS SI DALANG (WISATA EDUKASI SENI DAN BUDAYA PEMALANG - Anggi Supriyono desa Gombong Kec. Belik);
 - s. FAN PLASMIDIUM FLINDER AIR (Kipas Pembasmi Kuman Di Dalam Ruang - Maghfiroh & Muchsolih Desa Moga Kec. Moga);
 - t. TEPABINGLE (Teknologi Paving Biopori Single - Dias Fajar Fathan Al Azka siswa SMAN 2 Pemalang);
 - u. Salep Ketajamer (Limbah Daun Ketapang Gugur & Rimpang Jahe Merah - Susyatun Amanah, Kun Mustafid, Rofiatun Ikhsaniah siswa SMK PGRI 3 Randudongkal).

Adanya kerja sama dengan perguruan tinggi, beberapa UMKM di Kabupaten Pemalang telah diberikan fasilitasi dalam pengelolaan usahanya, dari kepemilikan perizinan, manajemen, bahkan digitalisasi pemasaran melalui *marketplace*.

Selain itu, faktor pendorong dari aspek pemerintahan tidak selalu membuat capaian hasil 100% dalam pelaksanaan kinerja RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025. Hal ini sangat wajar terjadi. Adanya dukungan pendanaan dari APBN melalui program bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS), dukungan DAK fisik bidang perumahan (DAK Perumahan), bantuan keuangan pemerintahan desa (Bankeu Pemdes) dari APBD Provinsi, rehabilitasi RTLH dari APBD Kabupaten, program pembangunan rumah susun baik dari APBN membuktikan aspek pemerintah sudah banyak mempengaruhi capaian target kinerja. Juga pada indikator peningkatan sanitasi masyarakat didukung adanya faktor pendorong komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang dimana Kabupaten Pemalang sudah memperoleh sertifikasi *Open Defecation Free* (ODF) tingkat Kabupaten pada tahun 2022. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur bidang sanitasi, melaksanakan promosi kesehatan terkait PHBS,

melaksanakan kampanye publik/advokasi (*public campaign/advocacy*) terkait sanitasi serta pembentukan Forum Pemalang Sehat (FPS).

2. Aspek Infrastruktur

Aspek ini meliputi kondisi fisik, lingkungan dan sarana prasarana pendukung agar sebuah target terlaksana dan tercapai. Terdapat beberapa faktor pendorong dimaksud yaitu adanya dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi mendorong tercapainya indikator Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Hal ini dibuktikan pada bulan September 2021 Pemerintah Kabupaten Pemalang menambah satu mobil pemadam kebakaran (damkar) dan satu mobil water supply sebagai sarana dan infrastuktur. Sebab, bertambahnya armada baru damkar akan menambah akselerasi damkar karena dua armada baru tersebut mempunyai teknologi terbaru. Mobil tersebut dapat melakukan penyemprotan sambil berjalan serta dilengkapi dengan *body spray* yang dapat melindungi mobil jika menembus api atau terkepung api. Sedangkan *water supply* bisa untuk menyediakan cadangan air ke mobil tempur serta bisa juga digunakan sebagai mobil tempur karena sistemnya sama dengan mobil damkar tempur. Mobil damkar *double cabin* memiliki daya pancar 25 bar, dengan kapasitas 4.000 liter, dengan sistem penggerak, dan sistem *pump and roll*.

Selain itu, contoh faktor pendorong lainnya dari aspek infrastruktur, lingkungan dan fisik yaitu dalam meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Didukung pembiayaan kesehatan masyarakat meningkat, baik dari kepesertaan jaminan kesehatan maupun dari program jaminan kesehatan daerah, serta meningkatnya kerja sama lintas program dan lintas sektor dimana faktor-faktor pendorong tersebut dapat tercapainya indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pemalang. Hal ini juga diperkuat dari data Usia Harapan Hidup (AHH) tahun 2022 sebesar 73,65 tahun yang terus meningkat tiap tahunnya dari 66,38 tahun pada tahun 2005. Serta menurut data dari Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pemalang sebagai penunjang dalam fasilitas dalam bidang kesehatan tahun 2022 mencakup 9 rumah sakit, 25 puskesmas, 1.220 posyandu yang jumlahnya terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan 141 poskesdes yang terus meningkat.

Faktor pendorong selanjutnya yaitu dapat menyediakan infrastruktur yang memadai sehingga menarik investor dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah menjadi prioritas di Kabupaten Pemalang. Hal ini ditunjukkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 yang mengatur peruntukan ruang di Kabupaten Pemalang. Ditunjang dengan capaian tahun 2023 persentase panjang jalan kondisi mantap (baik dan sedang) sebesar 69,43 persen atau sekitar 531,66 km dari total panjang jalan kabupaten sebesar 765,72 km yang terbagi ke dalam 305 ruas jalan. Aspek infrastruktur ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan anggaran pembangunan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

3. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi ini sendiri berkaitan dengan kondisi makroekonomi dan mikroekonomi di luar pemerintahan. Pada faktor pendorong aspek ekonomi yaitu adanya kolaborasi pendanaan dari swasta atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pemerintah Kabupaten Pemalang membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk melakukan gotong royong dalam pendanaan dalam berbagai termasuk di bidang perumahan dan merupakan gagasan yang sangat inovatif. Namun ketercapaian dari faktor pendorong ini kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dari indikator presentase permukiman layak huni di Kabupaten Pemalang belum tercapai. Dari total rumah di Kabupaten Pemalang sebanyak 317.947 unit yang merupakan RTLH sebanyak 54.833 unit. Menurut data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tercatat mencapai 14.742 unit rumah. Berarti kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pemalang masih relatif tinggi.

Contoh lain faktor pendorong pada aspek ekonomi yaitu adanya pendapatan yang naik karena daya beli masyarakat yang tinggi sehingga menyebabkan distribusi perdagangan lancar/tersalurkan dengan baik, produk UMKM meningkat, produk diminati pembeli, dan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM. Faktor pendorong tersebut dapat tercapainya indikator persentase pertumbuhan koperasi. Menurut data dari Diskoperindag Kabupaten Pemalang, per tahun 2022 jumlah UMKM di Kabupaten Pemalang meningkat pesat. Sebelumnya berjumlah sekitar 15.664 kini meningkat menjadi 16.550. Serta dapat diketahui bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Pemalang tahun 2005- 2020 terus berfluktuasi yang cenderung stabil direntang nilai 280 koperasi non KUD dan jumlah yang tetap 22 KUD. Hal ini berarti UMKM dan koperasi terdapat hubungan, koperasi berperan dalam penyelenggaraan UMKM dimana sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Modal adalah salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan usahawan, dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi.

Pemerintah Kabupaten Pemalang juga melakukan kegiatan dengan adanya pendataan warga untuk mendapatkan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro). Pemerintah Kabupaten Pemalang tercatat pada tahun 2021 mengusulkan 150 ribu calon penerima. Program ini telah diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2020 yang dapat berguna bagi pelaku bisnis agar meningkatnya perekonomian dari sektor perdagangan. Selain itu, diadakan pula pasar murah oleh pemerintah agar dapat mendorong perekonomian serta menstabilkan harga dan pasokan barang. Operasi pasar murah tersebut merupakan kerjasama Diskoperindag Kabupaten Pemalang dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pemalang.

4. Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial budaya meliputi partisipasi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Salah satu contoh aspek sosial budaya yaitu adanya faktor pendorong meningkatnya proporsi wanita yang bekerja di sektor pemerintahan, menduduki posisi yang strategis di Pemerintahan Daerah serta jumlah anggota DPRD dari wanita yang semakin

meningkat sehingga indikator dalam Indeks Pembangunan Gender dapat tercapai. Hal ini tercatat pada dua tahun terakhir Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang sebesar 86,49 pada tahun 2021 dan 86,72 pada tahun 2022.

Contoh selanjutnya yaitu adanya etos kerja yang tinggi dari tenaga/relawan kebencanaan dan dukungan moral yang tinggi dari unsur pimpinan dan sarpras dari BNPB. Seperti pada bencana banjir rob yang berlokasi di kawasan Pesisir Kabupaten Pemalang serta bencana tanah longsor yang berlokasi di wilayah pegunungan yang langsung diadakannya evakuasi yang melibatkan petugas BPBD Pemalang dibantu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPPP) Kabupaten Pemalang, warga, dan relawan kemanusiaan. Upaya dalam penanganan banjir rob serta evakuasi terus dilakukan BPBD Pemalang saat terjadi bencana alam agar masyarakat yang terdampak bencana dapat terselamatkan. Adanya dukungan seperti diadakannya pelatihan kemampuan evakuasi banjir dan tanah longsor juga telah dilakukan. Pelatihan tersebut merupakan permintaan dari relawan Kabupaten Pemalang, dimana relawan tersebut berkomunikasi dengan BPBD Pemalang tentang keinginan dan mendapat pelatihan teknis kebencanaan. Kemudian BPBD Kabupaten Pemalang menanggapi usulan tersebut dengan baik, dan kemudian merealisasikan dalam bentuk pelatihan.

Faktor pendorong lain dari aspek sosial budaya adalah adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait dokumen kependudukan. Salah satunya adanya kegiatan jemput bola dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pemalang mengunjungi langsung lokasi di beberapa kecamatan dan melakukan pertemuan dengan Petugas Desa yang ada di Kecamatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk urgensi dalam penerapan pelayanan permohonan *online* yang dapat memutus rantai percaloan. Warga masyarakat yang gagap teknologi atau juga yang tidak bisa mengoperasikan HP difasilitasi oleh Petugas Desa dengan adanya link khusus berbasis google form untuk pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Kegiatan tersebut dapat menunjang dari indikator Persentase kepemilikan dokumen kependudukan sebesar 79,61 persen, dimana hasil kinerja menunjukkan tercapainya indikator tersebut.

Pada aspek sosial budaya yaitu indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat tercapai karena karakteristik sosial yang berpengaruh pada partisipasi politik, meskipun status pemilih berbeda satu dengan lainnya, terdapat banyak yang peduli terhadap hak politiknya. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat partisipasi pemilih masyarakat Pemalang dalam pemilu seperti pilkada dan pileg mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 59,36 persen dan tahun 2020 tercatat sebesar 69,10 persen. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Pemalang yang didukung dengan kegiatan Pendidikan Politik Bagi Warga Negara.

Dari sisi faktor penghambat yang nantinya akan menjadi tantangan bagi perumusan penyusunan kebijakan pembangunan periode selanjutnya, dapat dilihat pada penjabaran berikut:

1. Aspek Pemerintahan

Dalam aspek pemerintahan terdapat beberapa faktor penghambat, seperti belum optimalnya penggalian dan pendataan inovasi yang sudah dilakukan di perangkat daerah, masih banyaknya inovasi yang telah dilaksanakan tapi belum mempunyai payung hukum, belum tersosialisasikan kepada masyarakat, masih adanya hasil inovasi dari hasil pendidikan/pelatihan yang berhenti di perjalanan seiring dengan selesainya ASN melaksanakan diklat. Faktor penghambat lainnya adalah pada awal penggunaan aplikasi SIPD masing sering terjadi gangguan akibat aplikasi masih dalam proses pengembangan sehingga beberapa kali terjadi kesalahan dan harus dilakukan input ulang. Oleh karena itu, pada November 2020 yang lalu Inspektorat Kabupaten Pemalang mengikuti kegiatan Pendampingan Aplikasi SIPD dengan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan terkait Implementasi aplikasi SIPD yang harus diterapkan oleh seluruh Pemda di Indonesia. Sebab, adanya kendala seperti masih adanya gangguan aplikasi dan sering terjadi kesalahan merupakan salah satu perhatian yang harus segera diselesaikan. Karena aplikasi SIPD merupakan aplikasi yang harus diterapkan oleh seluruh Pemda di Indonesia tidak hanya pada Kabupaten Pemalang, apabila tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh pada penundaan/tidak disetujuinya pengajuan anggaran APBD. Namun faktor penghambat tersebut tidak menghambat dalam tercapainya indikator Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD, dan program APBD terhadap RKPD karena indikator tersebut dapat tercapai 100 persen.

Salah satu faktor penghambat lainnya yang mempengaruhi pada kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 belum tercapai sampai 100% yaitu masih adanya tenaga kesehatan yang habis masa berlaku sertifikatnya atau belum memiliki sertifikat, pembacaan hasil rontgen tidak bisa dilakukan di luar jam kerja radiologi, unit transfusi darah belum dapat memenuhi kebutuhan pasien, belum terpadunya aplikasi BPJS dengan pendaftaran di rumah sakit. Faktor-faktor tersebut belum dapat tercapainya dalam indikator Persentase capaian standar pelayanan minimal di RSUD Dr. M. Ashari pada bidang kesehatan masih belum terpenuhi. Seperti pada unit transfusi darah di Kabupaten Pemalang masih belum memenuhi kebutuhan pasien. Unit PMI Kabupaten Pemalang mengatakan ada 2 sumber utama pasokan darah di PMI, yakni pendonor yang aktif mendatangi PMI dan *mobile unit* atau pendonor serta kelompok-kelompok yang didatangi PMI. Jumlah pendonor aktif hanya sekitar 30% dari jumlah keseluruhan, hal ini yang menyebabkan kebutuhan pasien belum terpenuhi. Apalagi masalah BPJS yang belum terpadu dengan pendaftaran rumah sakit. Menurut Disdukcapil Kabupaten Pemalang, adanya masalah verifikasi dan validasi anggota BPJS. Sebanyak 8.943 NIK yang terdaftar tidak ada di database BPJS Kesehatan.

2. Aspek Infrastruktur, Fisik dan Lingkungan

Pada aspek infrastruktur, fisik dan lingkungan terdapat faktor

penghambat yang berdampak pada tidak tercapainya kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025. Banyak desa di Kabupaten Pemalang yang secara tipologi, kualitas air bakunya tidak memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, misalnya banyak mengandung bakteri *e-coli*, banyak mengandung Fe dan sebagainya, sehingga harus menggunakan sumber air dari wilayah lain sehingga tidak tercapainya indikator Persentase cakupan air bersih. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Bhaskoro, 2016) yang menyatakan bahwa Kabupaten Pemalang secara umum mengalami defisit air baku untuk air minum. Ketersediaan air di wilayah Kabupaten Pemalang sebagian besar tidak memenuhi Daya Dukung Lingkungan Air (DDL-air) dalam rangka pemenuhan Kebutuhan Air untuk Hidup Layak (KAHL). Lalu jumlah penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 yang sebesar 1.542.052 jiwa memerlukan air untuk Kebutuhan Air untuk Hidup Layak (KAHL) sebesar 2.673.607.838 m³/tahun. Hal itu menunjukkan bahwa masih perlu banyak tambahan *supply* air baku untuk KAHL untuk wilayah Kabupaten Pemalang.

3. Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi terdapat beberapa faktor penghambat. Contohnya yaitu pendanaan masih mengandalkan dana dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan belum adanya kolaborasi pendanaan untuk percepatan pelayanan jaringan irigasi sehingga indikator dalam cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik belum tercapai. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pemalang selama tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi dimana tahun 2020 sebesar Rp 3.819.289.000,- menurun di tahun 2021 menjadi Rp 1.792.343.000,- lalu meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi Rp 2.252.039.000,-. Sebab, Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dimana pemerintah daerah hanya tingkat tertentu masih mungkin dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya walaupun kebijakan sepenuhnya tergantung pusat. Sehingga dalam penanganan Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik jika hanya mengandalkan DAK (Dana Alokasi Khusus) kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Selain itu, pada indikator persentase pertumbuhan koperasi di Kabupaten Pemalang. Faktor penghambat tersebut yaitu banyak karyawan yang di PHK sehingga beralih ke UKM. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian sehingga perusahaan memperhentikan/PHK karyawan. Jumlah UKM yang sebelumnya berjumlah sekitar 15.664 unit kini meningkat menjadi 16.550 unit. Aspek ekonomi dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi di Kabupaten Pemalang dimana nilainya cenderung berfluktuasi, nilai tertinggi pada tahun 2005 yaitu 17,25 persen sementara nilai terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,53 persen. Adapun di tahun 2020 Kabupaten Pemalang sudah tidak menghitung angka inflasi, maka yang digunakan adalah angka inflasi *sister city* yaitu Kabupaten Tegal. Pada tahun terakhir, tahun 2022 laju inflasi meningkat secara signifikan menjadi 6,31 persen.

Selain dari tingkat inflasi, faktor penghambat dari aspek ekonomi

dapat ditinjau dari kondisi perekonomian melalui PDRB yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD. Nilai PDRB menurut lapangan usaha selama periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025, dari tahun 2005 sampai pada data terakhir tahun 2021 rata-rata mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini juga merupakan salah satu penghambat dalam ketercapaian RPJPD Kabupaten Pemalang dimana adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada multidimensi salah satunya yaitu membuat lesunya perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

4. Aspek Sosial Budaya

Pada aspek sosial budaya terdapat faktor penghambat diantaranya beberapa masyarakat yang kurang kesadarannya untuk mengurus dokumen kependudukan. Hal ini yang menjadikan perhatian agar menunjang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Penduduk (GISA). Hal ini bertujuan untuk sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutakhiran data kependudukan, sadar pemanfaatan data kependudukan untuk semua urusan, dan sadar pelayanan Adminduk yang membahagiakan masyarakat. Kesadaran penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan di Kabupaten Pemalang harus terus ditingkatkan. Walaupun dalam indikator Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah tercapai. Faktor penghambat lain adalah masih adanya keengganan untuk melaksanakan tugas ke luar kota/menginap pada sebagian wanita yang bekerja di pemerintahan sehingga menyebabkan berkurangnya kesempatan untuk pengembangan diri pegawai yang bersangkutan walaupun dalam ketercapaian Indeks Pemberdayaan Gender dapat tercapai. Faktor penghambat lain dari aspek sosial budaya yang belum tercapainya nilai capaian kinerja sampai 100 persen yaitu kurangnya habits/kebiasaan dari masyarakat untuk menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

5. Aspek Waktu

Aspek waktu merupakan aspek terakhir yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005- 2025. Maksud dari waktu ini adalah jangka waktu dimana dalam pelaksanaan dari RPJPD tersebut apakah sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan atau tidak. Terdapat hanya ada satu faktor penghambat dari aspek waktu dan hanya terdapat pada faktor penghambat, yaitu ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sebagai penunjang ketercapaian indikator opini hasil audit BPK. Sebab Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Pada periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 rata-rata memiliki hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dengan sekali mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada RPJMD tahun 2020-2025.

Adapun evaluasi pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang ini memiliki kesimpulan dan rekomendasi yang akan menjadi acuan perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang ke depan. Adapun kesimpulan pada evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Pada evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 yang telah dilakukan, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 90%. Nilai tersebut mendapat predikat penilaian rata-rata realisasi kinerja "TINGGI". Pencapaian ini bermakna bahwa capaian kinerja RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 hampir memenuhi target persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan telah berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Juga sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang dapat mengarahkan rencana pembangunan jangka menengahnya yaitu RPJMD selama 4 periode.
3. Namun demikian dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 yang disusun secara kualitatif, membuat proses evaluasi yang dilakukan sangat kompleks, dan multi tafsir sehingga harus menggali data dan informasi yang multisource, multiyears dan multistakeholders. Penyajian data dan target di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 kurang memperhatikan asas sistematis, terarah dan terukur.
4. Terdapat 5 (lima) aspek yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian target kinerja pembangunan jangka panjang. Aspek pemerintahan mencakup kapasitas aparatur, dukungan regulasi dan juga pembiayaan bersumber dari pemerintah. Aspek sosial budaya meliputi partisipasi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Aspek Infrastruktur terkait dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, dan juga kondisi fisik serta lingkungan yang ada. Aspek ekonomi terkait dengan peran serta sektor non pemerintah dalam mendukung pembiayaan berbagai kegiatan. Yang terakhir adalah aspek waktu yaitu keterbatasan waktu yang tersedia untuk penyelesaian sebuah kegiatan dan pelaporannya.
5. Aspek-aspek pendorong yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 adalah aspek pemerintahan, aspek ekonomi, aspek infrastruktur dan aspek sosial budaya. Aspek yang mendominasi adalah aspek pemerintahan.
6. Aspek-aspek penghambat yang dominan menjadi kendala pencapaian target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 adalah aspek pemerintahan, aspek ekonomi, aspek infrastruktur dan aspek sosial budaya dan juga aspek waktu.
7. Kedua kondisi ini bermakna bahwa dalam pencapaian kinerja sebagian sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang

Tahun 2005-2025 telah diupayakan secara maksimal dengan dukungan faktor pendorong yang ada, meski pada sebagian sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang berbagai aspek tersebut muncul menjadi faktor penghambatnya. Sementara, diantara aspek-aspek penghambat sendiri saling berkaitan. Demikian juga diantara aspek-aspek pendorong yang ada saling berkaitan dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.

Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan dari hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 ialah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 harus sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku. Orientasi, overview dan bimtek kepada seluruh tim penyusun tentang dokumen perencanaan daerah sangat diperlukan dalam rangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional demi tercapainya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Di samping itu untuk tercapainya tujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah maupun antar Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan asas SPPN, penyusunan RPJPD dalam rangka pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan memenuhi prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
2. Penyusunan rancangan awal RPJPD paling lambat dilaksanakan 1 tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Adapun kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.
3. Penyusunan dokumen RPJPD yang andal membutuhkan data dan informasi yang lengkap, akurat dan akuntabel. Untuk itu sangat penting dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah perencanaan ditunjukkan dengan keberadaan data awal yang menjadi baseline sehingga akan memudahkan menentukan target capaian sasaran pokok yang terukur dengan memperhatikan dukungan kapasitas SDM dan juga keuangan daerah.
4. Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan oleh kepala daerah dan disampaikan kepada seluruh stakeholders, khususnya bagi calon kepala daerah sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dimulai.
5. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itu

dokumen RPJPD nantinya harus terus adaptif dengan memperhatikan dinamika yang ada sehingga perlu dilakukan evaluasi minimal 5 tahun sekali, sehingga dokumen RPJPD selalu akomodatif terhadap situasi dan kondisi yang ada

6. Terkait aspek pendorong dan penghambat, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di semua bidang melalui berbagai pelatihan dan bimtek. Di samping itu penting untuk menempatkan SDM sesuai kompetensinya. Kinerja SDM yang sesuai kompetensinya dan kapasitasnya sangat berpengaruh terhadap pencapaian target bidang terkait. Penggalan pembiayaan dari sektor private dengan melakukan Public Private Partnership dalam berbagai sektor pembangunan terkait dengan pemenuhan sarana prasarana serta pelayanan publik, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya di luar pemerintah demi tercapainya kesejahteraan bersama. Peningkatan peran CSR dalam banyak bidang juga sangat mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Gotong royong sebagai karakteristik bangsa Indonesia dapat menjadi instrumen dalam mencapai keadilan sosial. Pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek, sehingga masyarakat mempunyai sense of belonging terhadap program-program pemerintah dan mempunyai kepedulian terhadap keberlangsungan dan pemeliharaan hasil program dan kegiatan yang telah berjalan termasuk perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan dokumen kependudukan dan kecerdasan dalam berpolitik. Mendorong kewirausahaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan sehingga tercapai kemandirian, keswadayaan dan kestabilan ekonomi masyarakat secara umum. Pada akhirnya perencanaan yang baik dapat menyediakan alokasi waktu pelaksanaan program kegiatan yang cukup, tepat, dan efisien sehingga diperoleh hasil yang optimal.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

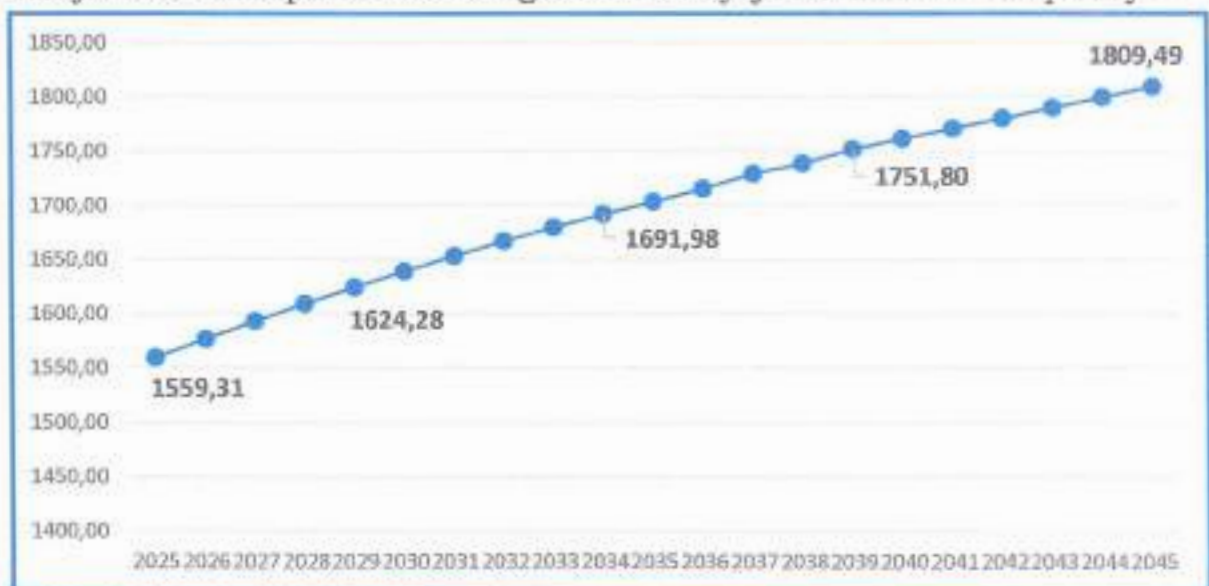
Demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, yang biasanya timbul karena peristiwa kelahiran, kematian dan migrasi (gerak teritorial) dan mobilitas status. Dalam analisisnya, demografi mengedepankan analisis deskriptif dan komparatif berkesinambungan terhadap tren yang ada, pada setiap proses yang terjadi dan hasil yang ditimbulkan, dengan tujuan utama untuk mengembangkan bagian dari teori untuk menjelaskan peristiwa yang dibandingkan dan direncanakannya.

Dalam demografi terdapat aspek kependudukan yang statis dan dinamis sifatnya. Aspek statis ditunjukkan oleh komposisi penduduk misalnya. Komposisi penduduk merupakan gambaran kondisi penduduk pada suatu titik tertentu, yaitu pada saat dilaksanakan sensus atau survei. Sesudah tanggal atau hari tersebut, komposisi penduduk akan berubah. Perubahan komposisi ini terjadi karena perubahan kelahiran, kematian dan migrasi. Jadi dalam demografi juga dipelajari aspek statis dan aspek dinamis, yang keduanya saling mempengaruhi.

Demografi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan sarana (infrastruktur) suatu wilayah atau negara. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas masyarakat tidak lepas dari penggunaan sarana pembangunan baik transportasi, perumahan hingga air minum. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan sarana pembangunan menjadi salah satu domain utama perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

2.6.1 Proyeksi Demografi

Kabupaten Pemalang memiliki jumlah penduduk eksisting saat ini mencapai 1.500.754 jiwa, dimana angka ini merupakan jumlah penduduk secara *de-facto* yang mengalami peningkatan seiring pembangunan Pemalang berjalan. Penduduk Kabupaten Pemalang diproyeksikan mencapai 1.809,49 ribu jiwa pada tahun 2045. Angka ini meningkat kisaran 304,36 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk saat ini. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun ini menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan Kabupaten Pemalang jika dapat dikelola secara optimal dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusianya. Berbagai kebutuhan harus dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga aksesibilitas dan kompetitivitas akan menjadi bagian dari kemudahan masyarakat Kabupaten Pemalang dalam menyejahterakan kehidupannya.



Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kab Pemalang 2025-2035 (Olahan angka sementara 2036-2045)

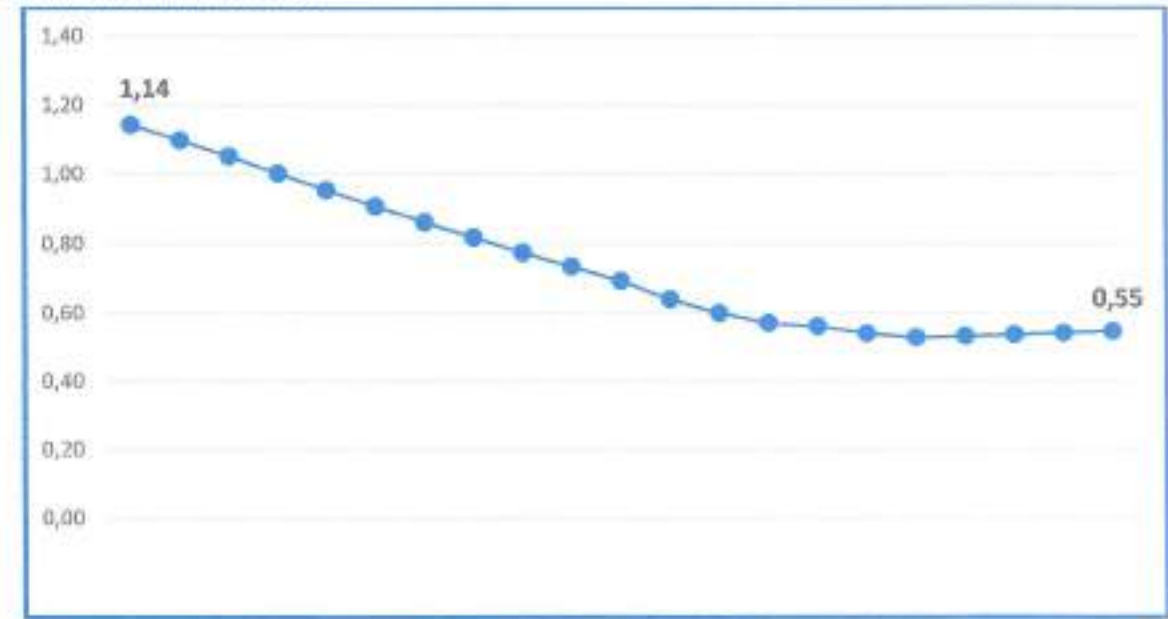
Gambar II.33.

Proyeksi Penduduk Kabupaten Pemalang 2025-2045

Laju pertumbuhan penduduk adalah ukuran untuk menggambarkan perubahan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk diukur sebagai persentase pertumbuhan jumlah penduduk selama periode tertentu. Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, rumusan laju pertumbuhan penduduk menggunakan laju pertumbuhan tahunan agar terlihat bagaimana kondisi pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pemalang diprediksikan memiliki pola menurun secara landai. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2025 sebesar 1,14 persen dan menurun hingga mencapai 0,55 persen di tahun 2045. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam perencanaan pembangunan keluarga dimana keluarga sejahtera

menjadi tujuan utama dari program pengendalian penduduk yang selama ini telah dilaksanakan.



Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kab Pemalang 2025-2035 (Olahan angka sementara 2036-2045)

Gambar II.34.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang 2025-2045

Tabel II.26.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Kelamin

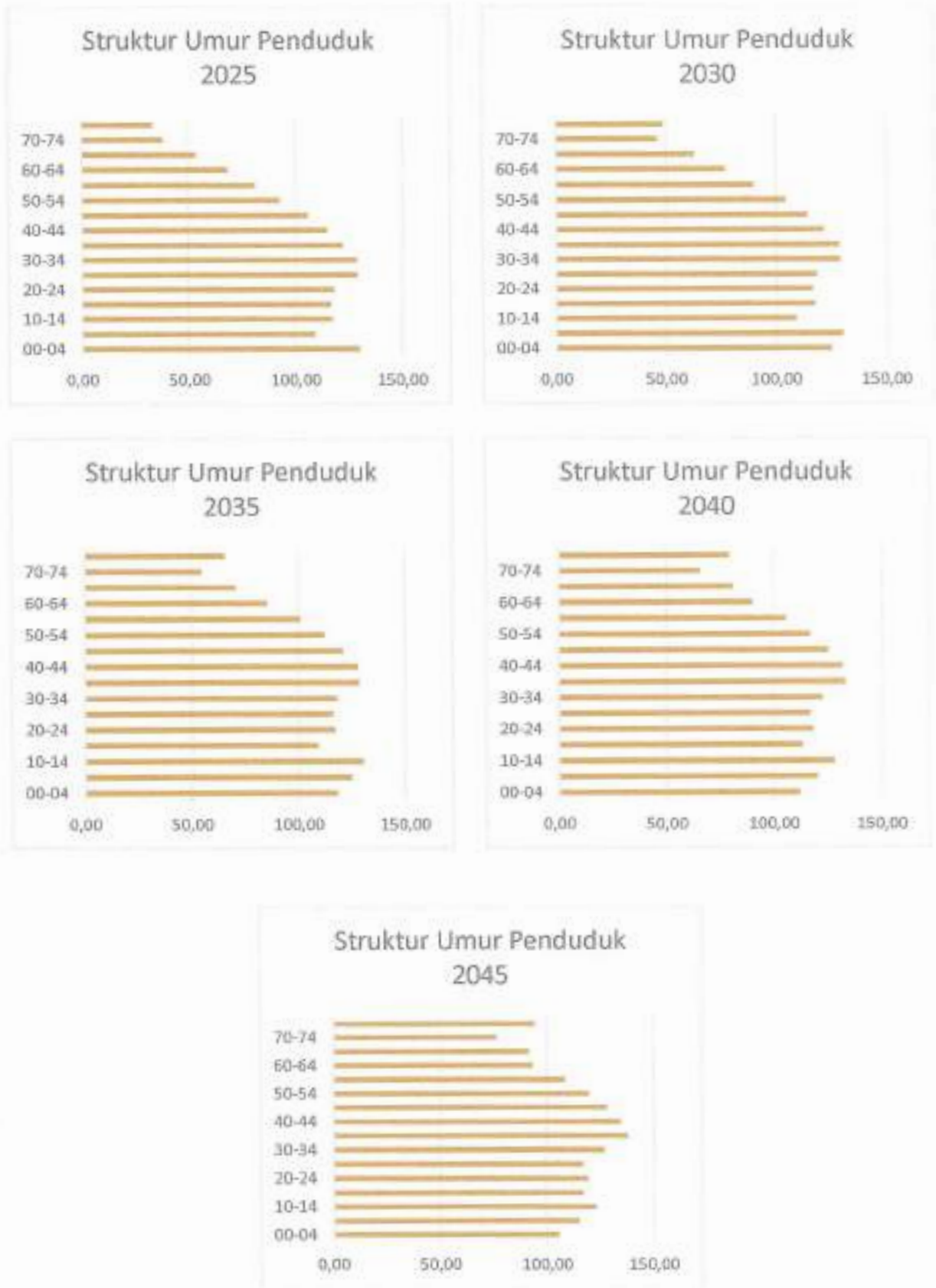
Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Ribn Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribn Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	772,03	789,56	828,21	858,96	882,49	899,78
Perempuan	751,59	769,75	810,81	844,76	871,67	892,18
Rasio	102,72	102,57	102,15	101,68	101,24	100,85

Sumber: BPS, data diolah

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka terlihat bahwa penduduk di Kabupaten Pemalang didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2023, rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 102,72 dan terus menurun hingga tahun 2045 rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 100,85. Angka ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2045 nanti, diantara 100 perempuan, terdapat 101 penduduk laki-laki.

Struktur umur penduduk menggambarkan distribusi usia penduduk dalam suatu wilayah atau negara pada suatu titik waktu tertentu. Informasi ini penting dalam demografi karena dapat memberikan wawasan tentang karakteristik dan dinamika populasi khususnya terkait potensi produktivitas penduduk.

Pada grafik struktur umum penduduk, terlihat bagaimana pergerakan struktur umur di Kabupaten Pemalang. Salah satu fenomena yang terlihat pada proyeksi penduduk adalah peningkatan penduduk usia tua yang pada momen tertentu akan menjadi aging population. Fenomena ini terlihat dari semakin melebarnya struktur umur pada piramida bagian atas yang mengindikasikan usia harapan hidup masyarakat semakin tinggi. Adapun penduduk usia muda juga semakin mengalami peningkatan meskipun secara komposisi mengalami penurunan.



Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Pemalang 2025-2035
Olahan angka sementara 2036-2045

Gambar II.35.
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

Tabel II.27.
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	351,41	356,45	364,49	374,07	357,21	341,99
15-64 Tahun	1.060,21	1.078,19	1.116,62	1.138,18	1.172,15	1.189,80
> 65 Tahun	112,02	124,67	157,93	191,48	224,81	260,17
Angka Ketergantungan	43,71	44,62	46,79	49,69	49,65	50,61

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Pemalang 2025-2035; data diolah

Pada proyeksi kondisi awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang yakni tahun 2023, angka ketergantungan terlihat cukup rendah di angka 43,71 yang mengindikasikan diantara 100 penduduk usia produktif menanggung 43-44 masyarakat usia non produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Pemalang berada pada jendela kesempatan bonus demografi yang diperkirakan akan masih berlanjut hingga tahun 2040. Optimalisasi berbagai program pembangunan yang tepat dalam menyongsong kondisi ini tentu menjadi solusi tepat dalam akselerasi pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang.

Beberapa kebijakan strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka memanfaatkan kondisi bonus demografi seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Ini termasuk program pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, dan pembangunan keterampilan. Selain itu, perlunya menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, promosi kewirausahaan, dan dukungan untuk bisnis kecil dan menengah.

Dari sisi kesehatan dan kesejahteraan, maka pemerintah perlu meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan mendukung program kesejahteraan yang mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat pertambahan usia penduduk. Adapun dalam kemiskinan yang timbul maka perlu adanya pengentasan program kemiskinan dan ketidaksetaraan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal pengendalian penduduk, perlu menggalakkan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan dan memastikan bahwa jumlah kelahiran sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana

Sarana (infrastruktur) adalah komponen penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, negara, atau proyek. Sarana mencakup berbagai elemen fisik yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk transportasi, perumahan, air minum, sanitasi, listrik, komunikasi, dan sebagainya. Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan sarana perlu diperhitungkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang, termasuk sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan.



Kebutuhan sarana yang dibutuhkan masyarakat hingga tahun 2045 ini nantinya akan menjadi salah satu barometer keberhasilan pembangunan. Kebutuhan sarana pembangunan yang akan digunakan masyarakat dalam kesehariannya,memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk bisnis, industri dan masyarakat umum. Selain ekonomi, sarana pembangunan akan meningkatkan kapasitas SDM baik keschatan maupun pendidikan, peningkatan iklim investasi, hingga kenyamanan dan keasrian masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.

1. Listrik dan Energi

Infrastruktur energi mencakup pasokan listrik, sumber energi terbarukan, dan distribusi energi. Ini diperlukan untuk menjalankan rumah tangga, bisnis, dan industri. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan, dijabarkan bahwa kebutuhan daya listrik minimum 450 VA per jiwa untuk setiap unit rumah tangga. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan listrik sebesar 982,37, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 1.032,58, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 1.073,34, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 1.105,12, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 1.128,93.

Tabel II.28.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.523,62	1.559,31	1.639,02	1.703,72	1.754,16	1.791,96
Jumlah Rumah	304.724	311.862	327.804	340.744	350.833	358.391
Proyek Kebutuhan Listrik	959,88	982,37	1.032,58	1.073,34	1.105,12	1.128,93

Sumber: Analisis, 2024

2. Air Minum

Penyediaan air minum untuk masyarakat adalah salah satu aspek penting dalam tata kota dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Akses yang memadai dan aman terhadap pasokan air minum adalah hak dasar manusia dan merupakan komponen kunci dalam menciptakan kondisi hidup yang sehat dan berkualitas bagi penduduk.

Berdasarkan SNI 19-6728.1-2002 tentang penyusunan neraca sumber daya air spasial, dijabarkan bahwa kebutuhan air minum dengan batasan sebesar 120 liter per hari per jiwa. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan air minum sebesar 68.297,78, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 71.789,08, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 74.622,94, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 76.832,38, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 78.487,72.

Tabel II.29.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.523,62	1.559,31	1.639,02	1.703,72	1.754,16	1.791,96
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	66.734,56	68.297,78	71.789,08	74.622,94	76.832,38	78.487,72

Sumber: Analisis, 2024

3. Perumahan Tempat Tinggal

Infrastruktur perumahan mencakup pembangunan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau. Ini adalah aspek penting dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan. Dari Asumsi Dasar dijabarkan bahwa jumlah penghuni rata-rata dengan batasan sebanyak 5 jiwa tiap rumah. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan rumah/tempat tinggal sebesar 311.862 unit, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 327.804 unit, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 340.744 unit, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 350.833 unit, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 358.391 unit.

Tabel II.30.
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.523,62	1.559,31	1.639,02	1.703,72	1.754,16	1.791,96
Proyeksi Kebutuhan Rumah	304.724	311.862	327.804	340.744	350.833	358.391

Sumber: Analisis, 2024

4. Fasilitas Pendidikan

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Infrastruktur pendidikan mencakup sekolah, perguruan tinggi, dan pusat pelatihan. Tenaga kerja yang terdidik dan terlatih cenderung lebih produktif dan dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Ambang Batas Penduduk dan Standar Kebutuhan Ruang Minimal Pada Fasilitas Pelayanan dijabarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel II.31.
Ambang Batas Penduduk dan Standar Kebutuhan Ruang Minimal Pada Fasilitas Pelayanan Dalam SNI 03-1733-2004

No.	Kelompok Fasilitas dan Jenis Fasilitas	Ambang Batas Penduduk Pendukung	Standar Kebutuhan Ruang Minimal
		Jiwa	m ²
A.	PENDIDIKAN		
1.	TK	1.250	1.200
2.	SD	1.600	1.500
3.	SMP	4.800	10.000
4.	SMA	4.800	20.000

Sumber: Analisis, 2024

Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang TK sebanyak 1.247, tahun 2030 diproyeksikan sebanyak 1.311, tahun 2035 diproyeksikan sebanyak 1.363, tahun 2040 diproyeksikan sebanyak 1.403, dan tahun 2045 diproyeksikan sebanyak 1.434. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang SD/MI pada tahun 2025 sebanyak 975, tahun 2030 sebanyak 1.024, tahun 2035 sebanyak 1.065, tahun 2040 sebanyak 1.096, dan tahun 2045 sebanyak 1.120. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2025 sebanyak 325, tahun 2030 sebanyak 341, tahun 2035 sebanyak 355, tahun 2040 sebanyak 365, dan tahun 2045 sebanyak 373. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2025 sebanyak 325, tahun 2030 sebanyak 341, tahun 2035 sebanyak 355, tahun 2040 sebanyak 365, dan tahun 2045 sebanyak 373.

Tabel II.32.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.523,62	1.559,31	1.639,02	1.703,72	1.754,16	1.791,96
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
•TK	1219	1247	1311	1363	1403	1434
•SD/MI	952	975	1024	1065	1096	1120
•SMP/MTs	317	325	341	355	365	373
•SMA/MA/SMK	317	325	341	355	365	373

Sumber: Analisis, 2024

5. Fasilitas Kesehatan

Infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan, penting untuk kesejahteraan masyarakat dan produktivitas tenaga kerja. Kesehatan yang baik mendukung tenaga kerja yang kuat. Berdasarkan SNI 03-1733-1989 tentang Ambang Batas Penduduk Dan Standar Kebutuhan Ruang Minimal Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan maka terlihat jumlah fasilitas kesehatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sejumlah penduduk.

Pada tahun 2025-2045 diproyeksikan kebutuhan fasilitas kesehatan untuk jenis sarana rumah sakit sebanyak 9 unit. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan untuk jenis sarana puskesmas pada tahun 2025-2045 sebanyak 25 unit. Baik proyeksi kebutuhan sarana rumah sakit dan puskesmas tersebut merupakan jumlah eksisting rumah sakit dan puskesmas saat ini. Sedangkan karena jumlah hitungan dari SNI 03-1733-1989 lebih rendah, maka tidak dipergunakan.

Proyeksi kebutuhan klinik bersalin dari tahun 2025 sebanyak 52 unit, tahun 2030 sebanyak 55 unit, pada tahun 2035 sebanyak 57 unit, pada tahun 2040 sebanyak 58 unit, dan tahun 2045 sebanyak 60 unit. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan untuk jenis sarana praktek dokter pada tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 312 unit, tahun 2030 di proyeksikan sebanyak 328 unit, tahun 2035 diproyeksikan sebanyak



341 unit, tahun 2040 diproyeksikan sebanyak 351 unit, dan tahun 2045 diproyeksikan sebanyak 358 unit. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan untuk jenis sarana apotek/rumah obat tahun 2025 sebanyak 52 unit, pada tahun 2030 sebanyak 55 unit, pada tahun 2035 sebanyak 57 unit, pada tahun 2040 sebanyak 58 unit dan pada tahun 2045 diproyeksikan sebanyak 60 unit.

Tabel II.33.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.523,62	1.559,31	1.639,02	1.703,72	1.754,16	1.791,96
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
• Rumah Sakit	9	10	10	10	10	10
• Puskesmas	25	25	25	25	25	25
• Puskesmas Pembantu	62	223	223	223	223	223
• Klinik Bersalin	51	52	55	57	58	60
• Praktek Dokter	305	312	328	341	351	358
• Apotek/Rumah Obat	51	52	55	57	58	60

Sumber: Analisis, 2024

Proyeksi kebutuhan puskesmas pembantu tahun 2025 – tahun 2045 sebanyak 223 puskesmas pembantu. Hal ini dalam rangka mendukung Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) yang merupakan bagian paling penting dalam melakukan transformasi sistem kesehatan di layanan primer. Tujuan utama dari ILP adalah untuk meningkatkan cakupan dan jangkauan intervensi layanan primer. Fokus transformasi pelayanan kesehatan primer yaitu:

1. Siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan
2. Mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemic
3. Memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa.

Dalam rangka mendukung program ILP, kementerian kesehatan telah mengamanahkan pembentukan satu desa satu puskesmas pembantu (pustu). Kondisi saat ini jumlah pustu yang ada di Kabupaten Pemalang berjumlah 62 yang tersebar di 223 desa/ kelurahan. Kondisi pustu yang ada belum berfungsi secara optimal karena kekurangan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada di pustu saat ini adalah tenaga kesehatan dari puskesmas dengan jadwal piket secara bergiliran, sehingga tidak bisa operasinal setiap hari seperti yang diharapkan. Perlu penguatan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan di semua pustu yang ada. Dalam rangka mewujudkan satu desa satu pustu maka kekurangan pustu yang harus dipenuhi adalah 161 pustu. Salah satu strategi yang dapat ditempuh dengan meningkatkan fungsi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) yang sudah terbentuk yaitu berjumlah 137 menjadi pustu, serta membentuk rintisan pustu baru di 24 desa yang belum memiliki



PKD. Standar pemenuhan tenaga kesehatan di pustu yaitu 1 perawat, 1 bidan dan 2 kader dengan 25 kompetensi dasar. Sehingga kebutuhan tenaga kesehatan dalam mewujudkan satu desa satu pustu yaitu sejumlah 161 perawat dan 161 bidan, selain kebutuhan saran dan prasarana.

6. Lingkungan Hidup

Infrastruktur lingkungan seperti pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan sumber daya alam yang berkelanjutan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan SNI 3242-2008 dijelaskan bahwa untuk memperkirakan timbulan sampah: Kota Besar sebanyak 3 liter/orang/hari dan Kota Kecil 2,5 liter/orang/hari. Sedangkan untuk berat jenis sampah, menggunakan asumsi 200-300 kg/m³ (0,2 – 0,3 kg/liter). Pada tahun 2025 diproyeksikan timbulan sampah sebesar 1.422,87, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 1495,61, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 1.554,64, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 1.600,67, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 1.635,16.

Tabel II.34.
Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (juta)	1.523,62	1.559,31	1.639,02	1.703,72	1.754,16	1.791,96
Proyeksi Timbulan Sampah (ton)	1.390,30	1.422,87	1.495,61	1.554,64	1.600,67	1.635,16

Sumber: Analisis, 2024

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui beberapa kebijakan penataan ruang, salah satunya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038.

Perencanaan pembangunan dapat dikatakan sangat identik dengan ekonomi pembangunan. Apabila sekiranya ruang gerak ekonomi pembangunan berusaha mencari strategi pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan alat yang ampuh untuk menerjemahkan strategi pembangunan tersebut dalam berbagai program kegiatan yang terkoordinasi.

Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan geografis-ekonomi bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia di daerah tersebut. Diharapkan bahwa perekonomian wilayah dapat mencapai keadaan yang lebih baik pada masa yang akan datang dibandingkan keadaan sekarang ini, atau minimal sama dengan keadaan ekonomi sekarang. Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alternatif untuk menggerakkan dan memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi manakala diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi karena secara tidak langsung kemajuan daerah akan membuat masyarakat



mencari kehidupan yang lebih layak di daerahnya. Apabila dilihat secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di lokasi tersebut.

Kriteria pusat pertumbuhan, yaitu sebagai daerah cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan, dan mempunyai interaksi ekonomi dengan daerah belakangnya. Penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi dapat dimulai dari beberapa sektor yang dinamis dan mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiplier effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Kekuatan pasar akan menjamin ekuilibrium (keseimbangan) dalam distribusi spasial ekonomi dan proses *trickle down effect* atau *centre down* dengan sendirinya akan terjadi ketika kesejahteraan di perkotaan tercapai dan dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendah seperti kawasan hinterland dan perdesaan melalui beberapa mekanisme, yaitu hierarki perkotaan dan perusahaan-perusahaan besar. Implementasi dari penciptaan pusat pertumbuhan harus diikuti oleh *trickle down effect* (dampak penetes ke bawah) dan *spread effect* (dampak penyebaran) melalui aktivitas harmonis antara pusat pertumbuhan dan basis sumber daya di wilayah perdesaan sehingga kegiatan pusat pertumbuhan berdampak pada daerah sekitarnya yang juga akan dapat tumbuh.

Secara fungsional, pusat pertumbuhan merupakan lokasi yang menjadi konsentrasi bagi kelompok usaha untuk saling berhubungan secara dinamis sehingga menjadi stimulasi kegiatan ekonomi. Sedangkan secara geografis, pusat pertumbuhan adalah lokasi yang memiliki berbagai fasilitas sehingga menjadi pusat daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi di wilayah yang memiliki fasilitas. Pengertian pusat pertumbuhan wilayah diperkuat dengan adanya teori-teori yang muncul dari berbagai ahli.

Perroux berpendapat bahwa fakta dasar dari perkembangan spasial, sebagaimana halnya dengan perkembangan industri. Perroux berpendapat bahwa: "Pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak; pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan, dengan intensitas yang berubah-ubah; perkembangan ini menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian". Menurut Perroux, faktor dari pembangunan dapat disebabkan oleh suatu konsentrasi (aglomerasi) tertentu bagi kegiatan ekonomi dalam suatu ruang yang abstrak. Boudeville mendefinisikan kutub pertumbuhan (*growth pole*) sebagai: "Sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh daerah pengaruhnya". Tidak hanya itu, Boudeville juga merumuskan konsep *growth pole* sebagai suatu model perencanaan yang bersifat operasional, yang menjelaskan suatu kondisi pertumbuhan akan tercipta pada wilayah yang menyebabkan munculnya kutub (*polarized region*). Glasson memperkuat

teori kutub pertumbuhan dengan merumuskan beberapa konsep dasar dan perkembangan geografi yang mendukung adanya kutub (polarized region).

1. Menurut konsepsi Perroux, Konsep "Leading industries" dan perusahaan-perusahaan propulsip menyatakan pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan propulsip yang besar, yang termasuk dalam "leading industries" yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya.
2. Konsep polarisasi menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari leading industries mendorong polarisasi dan unit-unit ekonomi lainnya ke dalam kutub pertumbuhan. Konsep "spread effect" dan "trickling down effect" menyatakan bahwa pada waktunya, industri propulsif dinamik dari kutub pertumbuhan akan memencar keluar dan memasuki ruang di sekitarnya. Pada konteks ini daya tarik yang tercipta dari *Core Industry (Leading industries)* yang mempengaruhi munculnya industri-industri pendukung.
3. Teori pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Boudeville adalah kumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan. Suatu kota memiliki industri populasi kompleks maka ini disebut dengan pusat tumbuh.

Ditinjau dari konsepsi di atas, maka identifikasi terhadap Pusat pertumbuhan di Kabupaten Pemalang dapat ditinjau dari aspek fungsi wilayah, konsentrasi aktivitas produksi, aglomerasi kegiatan ekonomi maupun rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Pemalang.

Rencana sistem pusat pelayanan tersebut merupakan representasi spasial kawasan yang potensial sebagai kutub pertumbuhan di Kabupaten Pemalang. Hal ini secara normatif tertuang dalam rencana struktur ruang Kabupaten Pemalang yang terdiri atas orde pusat pertumbuhan wilayah sebagaimana tertuang dalam Perda RTRW Kabupaten Pemalang sebagai berikut :



Sumber: RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.36.
Peta Struktur Tata Ruang Kabupaten Pemalang

Adapun secara terperinci, sistem pusat pelayanan di Kabupaten Pemalang, terdapat 2 lingkup besar kegiatan perencanaan yaitu:

1. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

a. Sistem Perkotaan

1) Pengembangan PKL (Pusat Kegiatan Lokal)

Terdapat 2 kawasan yang berstatus sebagai PKL di Kabupaten Pemalang, yaitu:

- Kawasan Perkotaan Pemalang
- Kawasan Perkotaan Comal



Sumber: RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.37.
Kawasan Pengembangan PKL

2) Pengembangan PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)

Terdapat 3 kawasan yang memiliki peran sebagai kawasan pengembangan PKLp di Kabupaten Pemalang, yaitu:

- Kawasan Perkotaan Randudongkal
- Kawasan Perkotaan Belik
- Kawasan Perkotaan Moga



Sumber: RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.38.
Kawasan Pengembangan PKLp

3) Pengembangan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)

Dalam perencanaan pengembangan PPK di Kabuapten Pemalang, terdapat 8 kawasan yang termasuk di dalamnya, yaitu:

- Kawasan Perkotaan Ulujami
- Kawasan Perkotaan Ampelgading
- Kawasan Perkotaan Petarukan
- Kawasan Perkotaan Bantarbolang
- Kawasan Perkotaan Bodeh
- Kawasan Perkotaan Warungpring
- Kawasan Perkotaan Watukumpul
- Kawasan Perkotaan Pulosari



Sumber: RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.39.

Kawasan Pengembangan PPK

2. Rencana Sistem Wilayah

Rencana sistem wilayah yang ada di Kabupaten Pemalang merupakan kegiatan perencanaan yang berupa pembagian SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) berserta fungsi dari masing – masing SWP.

a. SWP Pemalang dengan pengembangan fungsi meliputi:

- 1) Pusat Pemerintahan Daerah
- 2) perdagangan dan jasa,
- 3) industri,
- 4) transportasi,
- 5) pariwisata,
- 6) pertanian tanaman pangan, dan
- 7) perikanan



Sumber: RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.40.

SWP I – Pemalang

- b. SWP Comal dengan pengembangan fungsi meliputi
- 1) perdagangan dan jasa,
 - 2) pertanian tanaman pangan,
 - 3) pariwisata,
 - 4) industri
 - 5) pertambangan, dan
 - 6) perikanan



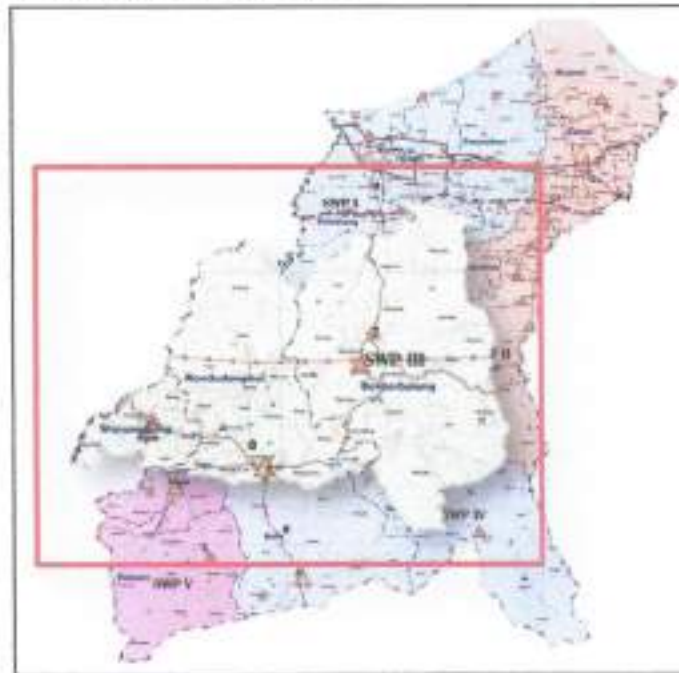
Sumber: RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.41.

SWP II- Comal

- c. SWP Randudongkal dengan pengembangan fungsi meliputi
- 1) pertanian hortikultura,
 - 2) pertanian tanaman pangan,
 - 3) industri,
 - 4) kehutanan,
 - 5) perikanan,

- 6) perdagangan dan jasa,
- 7) pariwisata,
- 8) pertambangan, dan
- 9) pengelolaan kawasan lindung



Sumber: RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.42.
SWP III - Randudongkal

- d. SWP Belik dengan pengembangan fungsi meliputi
- 1) pertanian hortikultura,
 - 2) pertanian tanaman pangan,
 - 3) agroindustri,
 - 4) kehutanan,
 - 5) perdagangan dan jasa,
 - 6) pariwisata,
 - 7) pertambangan, dan
 - 8) pengelolaan kawasan lindung



Sumber: RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.43.
SWP IV - Belik

- e. SWP Moga dengan pengembangan fungsi meliputi
- 1) pertanian hortikultura,
 - 2) pertanian tanaman pangan,
 - 3) pariwisata,
 - 4) perikanan,
 - 5) agroindustri,
 - 6) pertambangan, dan
 - 7) pengelolaan kawasan lindung



Sumber: RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Gambar II.44.
SWP V – Moga

Berdasarkan identifikasi geografi-ekonomi perkembangan di Kabupaten Pemalang, maka pusat pertumbuhan yang ada pada dasarnya mengarahkan pusat pertumbuhan multi-fungsi di Kabupaten Pemalang yang terdiri atas pengembangan kawasan perkotaan (dimana seringkali mengindikasikan lokus kawasan dengan karakteristik pelayanan, perdagangan dan jasa). Selanjutnya pusat pertumbuhan yang ada juga berorientasi pada pengembangan pusat pertumbuhan dengan sektor pertanian (agropolitan). Hal ini sesuai dengan upaya optimalisasi dari potensi sumber daya alam di Kabupaten Pemalang.

Lebih lanjut, pusat pertumbuhan juga mengacu pada adanya sentra industri (kawasan peruntukkan industri), dimana diharapkan bahwa kombinasi antara sektor pertanian, menunjukkan peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa serta industri dapat membentuk satu ekosistem agroindustri di Kabupaten Pemalang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dengan dinamika penyelenggaraan pembangunan daerah yang selalu dinamis dan berkelanjutan, terdapat permasalahan, isu dan tantangan pembangunan yang selalu mengiringi. Pemahaman komprehensif terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Melihat beberapa hasil capaian pembangunan yang masih belum tercapai sesuai dengan harapan, menunjukkan adanya kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan analisis permasalahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi beragam permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara capaian kinerja pembangunan saat ini dengan apa yang ingin dicapai dalam rencana dan atau standar yang telah ditentukan.

Dalam penyusunan RPJPD selain permasalahan, perlu memperhatikan potensi isu yang akan datang sebagai tantangan dalam pembangunan. Dengan memanfaatkan kerangka kerja yang kolaboratif, bab ini akan mengintegrasikan masukan dari semua tingkatan pemerintahan dan pemangku kepentingan. Hal ini untuk memastikan dokumen RPJPD mencerminkan pembangunan daerah yang komprehensif, berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika lokal dan global. Mengingat eratnya korelasi antara perencanaan yang efektif dan partisipasi pihak-pihak terkait, proses perumusan masalah dan penelaahan isu strategis harus memadukan perspektif dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Nasional. Dalam penyusunan RPJPD, isu strategis sudah mempertimbangkan kondisi daerah dengan dampak yang ditimbulkan oleh dinamika global dan nasional. Melalui pendekatan yang bersifat kolaboratif, diharapkan dapat terbentuk arah pembangunan yang komprehensif dan responsif sehingga dapat mengantisipasi serta menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan tantangan serta peluang yang akan datang.

Adanya peluang yang memungkinkan akselerasi capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kemudian ancaman ataupun tantangan yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai “*warning action*” dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kemudian akan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kendala, hambatan dan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pembangunan daerah jangka panjang merupakan permasalahan pembangunan daerah yang sifatnya makro, dengan

pendekatan yang cermat untuk mengidentifikasi dan menganalisis variabel-variabel kunci yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah yang dibahas dalam bab sebelumnya. Penyusunan bab ini turut memperhatikan prinsip-prinsip analitis dan prediktif, mengeksplorasi hubungan sebab-akibat dari fenomena saat eksisting dan dampaknya ke masa depan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang, dalam 6 (enam) permasalahan pokok sebagai berikut:



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar III.1.
Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Pemalang dalam RPJPD, dijabarkan sebagai berikut.

A. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi adalah **belum meratanya pembangunan daerah berbasis infrastruktur dan berkelanjutan**. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan menjadi salah satu komitmen yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang artinya pembangunan diharapkan akan mampu dirasakan seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Pemalang. Dengan adanya permasalahan “Belum meratanya pembangunan daerah berbasis infrastruktur dan berkelanjutan”, disebabkan oleh permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Aksesibilitas Antar Wilayah

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pemukiman layak huni, merupakan fasilitas publik yang dibangun pemerintah daerah

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mempermudah aksesibilitas/mobilisasi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berbagai fasilitas fisik infrastruktur merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat. Penyediaan infrastruktur yang belum optimal dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Salah satu indikator yang mampu mempresentasikan kualitas pelayanan infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah daerah adalah IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur). IKLI merupakan pengukuran secara komprehensif/hasil survey tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Hasil survei kepuasan masyarakat ini dilakukan terhadap 12 jenis layanan infrastruktur diantaranya jalan, irigasi, air minum, drainase, persampahan, RTH, LPJU, rumah susun, APILL, perparkiran, terminal, dan hotspot. Untuk perhitungan IKLI tahun ke depan, karena cakupan layanan rumah susun terlalu sempit akan diubah menjadi pelayanan terhadap kawasan permukiman kumuh. Perkembangan IKLI Kabupaten Pemalang mempunyai pergerakan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2022 IKLI Kabupaten Pemalang mencapai sebesar 74,02 dan tahun 2023 mencapai sebesar 72,17. Melihat perkembangan tersebut, IKLI Kabupaten Pemalang mengalami penurunan sebanyak 1,85 poin. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur di Kabupaten Pemalang sehingga masyarakat menginginkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi. Dengan demikian kedepannya, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu mengoptimalkan kualitas pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.

Pemerataan pembangunan akan memiliki dampak yang luar biasa dalam pembangunan, yang diindikasikan dengan kemudahan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan mobilitas untuk beraktivitas. Pemerataan pembangunan dan persebaran penduduk memiliki hubungan yang erat dalam konteks pembangunan suatu wilayah. Pemerataan pembangunan mengacu pada upaya untuk menyebarkan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

Salah satu indikator yang menggambarkan pemerataan pembangunan daerah adalah Indeks Ketimpangan Antar Wilayah. Indeks ini dapat menjadi tolok ukur dalam pengukuran kesenjangan antar wilayah, khususnya pada aspek infrastruktur (sarana dan prasarana) pada setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang. Besaran standar dalam pengukuran Indeks Ketimpangan Antar Wilayah berkisar antara 0-1. Semakin menjauhi nilai 0 (nol), berarti menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antar wilayah semakin besar.

Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebesar 0,36949 masuk dalam kategori "Rendah". Meskipun angka ketimpangan antar wilayah dalam kategori rendah, namun masih terdapat ketimpangan terutama antara Pemalang wilayah

utara dan selatan, dan hal ini cukup menjadi urgensi dalam permasalahan pembangunan daerah. Kedepannya diharapkan, pembangunan infrastruktur dapat lebih merata, sehingga angka kesenjangan antar wilayah dapat menurun dan pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah tertentu saja.

b. Belum Optimalnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Dalam pembangunan daerah harus mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan lingkungan. Hal ini berarti pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan ekonomi saja, namun juga mempertimbangkan dampak negatif pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan Kabupaten Pemalang yang belum maksimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan ini terlihat dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Selama tahun 2019-2023, IKLH mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2023, capaian IKLH Kabupaten Pemalang sebesar 66,15 masuk dalam kategori "sedang". Kemudian jika melihat perkembangan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 maka IKLH Kabupaten Pemalang mengalami penurunan. Hal ini juga terlihat pada capaian beberapa komponennya IKLH menurun di tahun 2023 yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas lahan (IKL). Penurunan IKLH disebabkan menurunnya IKU yang terjadi karena meningkatnya mobilitas masyarakat yang kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dengan demikian, dapat disimpulkan adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang, sehingga pembangunan Kabupaten Pemalang ke depan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup.

c. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Kebencanaan

Penyelenggaraan kebencanaan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting. Dengan upaya yang sistematis dan berkelanjutan, dapat mengurangi risiko bencana dan membangun masyarakat yang lebih tangguh. Penyelenggaraan kebencanaan harus diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tahan bencana. Keberhasilan daerah dalam penyelenggaraan kebencanaan diindikasikan melalui indikator Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB tahun 2023, IRB Kabupaten Pemalang sebesar 115,11 masuk pada kelas risiko "Sedang", di bawah nilai yang dicapai Kota Tegal yang sebesar 94,56. Nilai IRB sedang berarti suatu wilayah memiliki potensi mengalami bencana yang cukup signifikan, namun juga memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapinya. Artinya, wilayah tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, namun tidak berada dalam kondisi darurat yang sangat tinggi.

Dengan nilai IRB sedang ini Pemerintah Kabupaten Pemalang harus selalu waspada terhadap potensi bencana dan melakukan pemantauan secara berkala; perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dalam hal mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana;

menyusun perencanaan yang matang untuk menghadapi berbagai skenario bencana; dan perlu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memiliki pemahaman yang baik tentang risiko bencana dan cara-cara untuk mengurangi dampaknya.

d. Belum Optimalnya Penanganan Rob

Banjir rob, atau banjir pasang, merupakan fenomena naiknya permukaan air laut yang menyebabkan genangan air di daerah pesisir. Fenomena ini semakin sering terjadi akibat perubahan iklim dan peningkatan permukaan air laut. Banjir rob sudah lama terjadi di Kabupaten Pemalang, dan permasalahan ini semakin parah dalam beberapa tahun terakhir. Kabupaten Pemalang memiliki total panjang garis pantai sepanjang 35 Km, dan yang terdampak rob sepanjang 19,3 Km. Berdasarkan data Kajian Rob Kabupaten Pemalang yang disusun oleh BPBD Kabupaten Pemalang pada tahun 2020, luasan rob mencakup 14 desa dan 2 kelurahan di wilayah 4 kecamatan, yaitu Ulujami, Taman, Petarukan, dan Pemalang, dengan luas genangan mencapai 7.705,05 Ha, serta perkiraan kerugian ekonomi senilai 20 milyar/tahun. Pada wilayah dengan tingkat ancaman banjir rob tinggi, yaitu Kecamatan Ulujami, dalam satu bulan kejadian rob lebih dari 20 hari, serta signifikan dampaknya terhadap ekonomi, karena rob masuk ke area tambak, pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Tercatat seluas 896,31 Ha Lahan Sawah Dilindungi terdampak rob.

Selain berdampak pada ekonomi, banjir rob juga berdampak pada lingkungan dan sosial. Pada lingkungan antara lain menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan erosi pantai. Sementara itu dampak terhadap sosial antara lain mengakibatkan kerugian materi, gangguan kesehatan, trauma psikologis, dan migrasi. Oleh karena itu banjir rob merupakan ancaman serius yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Belum Optimalnya Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Berkesinambungan

Masyarakat yang sejahtera mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan material, sosial, lingkungan, dan psikologis. Dari sisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercermin dari pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, kesempatan kerja yang memadai, dan distribusi pendapatan yang merata. Belum optimalnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkesinambungan ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Masih Tingginya Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan multidimensi, artinya kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti pendidikan, kesehatan, *skill*/kompetensi, dan peluang usaha, dan lain-lain. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang tahun 2023 mencapai 15,03%, yang mana capaian ini masih di atas Provinsi Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar di Kawasan Brebes Tegal Pemalang (Bregasmalang), maka tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang

lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Pengentasan kemiskinan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perlu perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sangat berkaitan dengan kemampuan daya beli, yang dapat dilihat dari pengeluaran perkapita. Angka ini menunjukkan rata-rata jumlah uang yang dihabiskan oleh setiap individu dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Semakin tinggi pengeluaran perkapita, umumnya mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Pada tahun 2023 pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 9,5 juta rupiah, paling rendah di antara kabupaten/kota di Kawasan Bregasmalang. Oleh karena itu diharapkan ke depannya Pemerintah Kabupaten Pemalang mampu mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan *skill* kompetensi agar mampu bekerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

b. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan. Pemicu tingginya tingkat pengangguran antara lain disebabkan masih rendahnya kapasitas dan produktivitas tenaga kerja, dan kesempatan kerja yang masih terbatas. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 mencapai sebesar 6,55 persen, di atas capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,13 persen. Di kawasan Bregasmalang dan kawasan Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan), Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Pemalang masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pekalongan. Dengan ini diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Pemalang mampu menurunkan tingkat pengangguran, melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan peluang kerja dan usaha.

2. Belum Optimalnya Pembangunan Kebudayaan di Seluruh Elemen Masyarakat

Pembangunan kebudayaan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kegiatan ini memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu bangsa/daerah, karena:

a. Identitas dan persatuan bangsa

- 1) Kebudayaan merupakan identitas dan jati diri bangsa. Dengan mengembangkan kebudayaan, kita memperkuat rasa memiliki dan kebanggaan terhadap bangsa sendiri.
- 2) Nilai-nilai luhur dalam budaya dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, mengatasi perbedaan dan menciptakan harmoni sosial.

b. Pengembangan sumber daya manusia

- 1) Kebudayaan merangsang kreativitas dan inovasi. Dengan melestarikan dan mengembangkan seni, budaya, dan tradisi, kita menciptakan ruang bagi tumbuhnya kreativitas masyarakat.
- 2) Nilai-nilai budaya membentuk karakter bangsa. Melalui pendidikan budaya, dapat ditanamkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi dan integritas.

c. Penguatan ekonomi

- 1) Budaya dapat menjadi daya tarik wisata yang kuat. Dengan mengembangkan potensi wisata budaya, dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja.
- 2) Industri kreatif berbasis budaya, seperti kerajinan tangan, musik, film, dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

d. Pelestarian lingkungan

Banyak kebudayaan memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi kelestarian lingkungan. Dengan melestarikan kebudayaan, juga melestarikan lingkungan hidup.

e. Diplomasi budaya

Budaya dapat menjadi alat diplomasi yang efektif. Dengan memperkenalkan budaya kepada dunia, dapat meningkatkan citra bangsa dan mempererat hubungan internasional.

f. Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan kebudayaan harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, pembangunan dapat bersifat berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Selain itu, globalisasi dapat mengancam kelestarian budaya lokal, sehingga pembangunan kebudayaan menjadi penting untuk menjaga identitas dan nilai-nilai luhur bangsa.

Pembangunan kebudayaan di seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pemalang belum optimal, tercermin dari capaian Indeks Kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2023 sebesar 51,78 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 59,43 dan Nasional yang sebesar 55,13. Indeks Kebudayaan merupakan indeks (komposit) yang tersusun dari dimensi ekonomi budaya, pendidikan, konservasi warisan budaya dan budaya literasi. Kedepan pembangunan kebudayaan Kabupaten Pemalang perlu dioptimalkan, bukan hanya sekedar pelestarian tradisi, tetapi juga merupakan investasi untuk masa depan daerah. Dengan mengembangkan kebudayaan, dapat menciptakan masyarakat yang lebih beradab, bermartabat dan sejahtera.

C. Aspek Daya Saing

1. Belum Optimalnya Pencapaian Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul

Pembangunan SDM unggul merupakan investasi jangka panjang yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah, karena akan berimplikasi pada kualitas dan daya saing masyarakat. SDM yang berkualitas dan produktif akan menjadi penggerak utama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan SDM yang unggul, daerah akan mampu

menghadapi tantangan global, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pencapaian SDM yang unggul di Kabupaten Pemalang belum optimal, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran kualitas SDM dari suatu wilayah. IPM diukur dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran perkapita. IPM Kabupaten Pemalang di tahun 2023 sebesar 68,03 masuk dalam kategori "sedang", lebih rendah dari IPM Jawa Tengah yang sebesar 73,39. Sementara itu dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota di Kawasan Bregasmalang, IPM Kabupaten Pemalang masih di bawah IPM Kabupaten Tegal yang mencapai 70,23.

Kondisi IPM yang rendah ini merupakan tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dengan meningkatkan IPM, dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera dan berkelanjutan.

2. Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Unggulan Berlandaskan Tata Kelola Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai peran yang cukup krusial dalam pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan keberhasilannya dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor unggulan daerah, karena sektor ini menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan fokus pada pengembangan sektor unggulan, daerah dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi sektor unggulan, meningkatkan daya saing daerah dan diversifikasi ekonomi, karena daerah dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja.

Sementara itu pengembangan sektor unggulan daerah harus memerhatikan tata kelola ekonomi hijau, yang merujuk pada sistem pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Konsep ini relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan sektor unggulan Kabupaten Pemalang yang berlandaskan tata kelola ekonomi hijau belum optimal, disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum Maksimalnya Pembangunan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Terkait pembangunan ekonomi di Kabupaten Pemalang, dalam struktur PDRB Tahun 2023 berdasarkan lapangan usaha, Kabupaten Pemalang memiliki 4 (empat sektor unggulan) yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, *share* sebesar 22,86%; sektor industri pengolahan 20,66%; sektor perdagangan besar dan eceran 17,08%; dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 6,73%. Adapun

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang tahun 2023 tercatat sebesar 4,14%, di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 4,73% dan Nasional yang sebesar 5,03%. Sementara itu pada cakupan Bregasmalang, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang berada di bawah Kabupaten Tegal yang sebesar 4,93%. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan dalam PDRB yang dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu ke depan pembangunan ekonomi sektor unggulan merupakan strategi kunci yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, dan dukungan yang kuat, sektor unggulan dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi.

b. Belum Optimalnya Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah

Investasi merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah. Ketika investasi mengalir ke suatu daerah, maka akan terjadi berbagai dampak positif yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, transfer teknologi, peningkatan kualitas SDM, serta pemberdayaan masyarakat.

Nilai investasi Kabupaten Pemalang tahun 2023 tercatat sebesar 197,15 Milyar, jauh di bawah Kabupaten Tegal yang mencapai 2,04 trilyun rupiah. Memahami hal tersebut, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu melakukan upaya strategis dalam meningkatkan investasi, diantaranya dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan promosi investasi secara intensif serta memberikan kemudahan bagi investor.

c. Belum Optimalnya Tata Kelola Ekonomi Hijau

Dalam konteks pembangunan daerah, tata kelola ekonomi hijau menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memerhatikan keberlanjutan lingkungan dan dampak sosialnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau, daerah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi tata kelola ekonomi hijau pada dimensi lingkungan adalah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Emisi GRK merupakan jumlah emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Peningkatan konsentrasi GRK akibat aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global yang berlebihan. Penurunan Emisi GRK Kabupaten Pemalang tahun 2023 tercatat sebesar 16.513 TonCO₂eq berada di bawah Kabupaten Tegal yang sebesar 49.930 TonCO₂eq dan Kabupaten Brebes yang sebesar 32.060 TonCO₂eq. Oleh karena itu, dalam konteks ini, urgensi tata kelola ekonomi hijau semakin terasa. Tata kelola ekonomi hijau bukan hanya pilihan, tetapi keharusan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

D. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan pada Aspek Pelayanan Umum adalah **Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif**. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tulang punggung pemerintahan yang memiliki peran krusial. Sebagai pelayan masyarakat, ASN bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan di segala bidang. Tata kelola pemerintahan berkaitan erat dengan performa kinerja ASN dan reformasi birokrasi. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif di Kabupaten Pemalang, yang disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu:

a. **Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi Berdampak**

Reformasi birokrasi berdampak adalah sebuah konsep dalam pemerintahan yang menekankan pada perubahan mendasar dalam sistem birokrasi, dengan tujuan agar perubahan tersebut memberikan hasil nyata dan langsung bagi masyarakat. Bukan hanya sekedar perubahan prosedur atau tata kerja, reformasi ini harus mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Reformasi birokrasi yang telah berjalan selama ini dinilai belum memberikan dampak yang signifikan seperti yang diharapkan. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya, masih banyak tantangan dan kendala menghambat terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 sebesar 68,97, dan masuk dalam kategori, **"Baik"**. Perkembangan dan kondisi IRB Kabupaten Pemalang selama periode 2019-2023 mengalami pergerakan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga 1,15 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan IRB Kabupaten Pemalang disebabkan oleh adanya penurunan pada area/indeks. Adapun indeks yang mengalami penurunan kualitas yang paling signifikan adalah kualitas pengelolaan arsip, indeks profesionalitas ASN, kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Pemalang terus melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Salah satu upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan sehingga dapat menciptakan hasil atau dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat dan tepat menyentuh isu atau permasalahan faktual. Reformasi birokrasi juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Sehubungan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi melalui dua fokus yang disebut dengan *"double track"* yaitu fokus penyelesaian isu

hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik.

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan reformasi birokrasi secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program reformasi birokrasi pada level meso dan mikro. Adapun tingkatan Intersional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah serta program inovasi reformasi birokrasi yang diperlukan masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi.

b. Belum Optimalnya Kinerja Profesionalitas ASN

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik. ASN yang profesional akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Kualitas kinerja ASN Kabupaten Pemalang terlihat pada indikator Indeks Profesionalitas ASN yang terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2022, dengan capaian tahun 2021 sebesar 64,29 dan menurun di tahun 2022 menjadi 51,63. Meskipun pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 65,53. Penurunan kualitas kinerja ASN disebabkan karena masih lemahnya integritas dan komitmen ASN untuk memberikan performa yang terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan ini, kedepannya Pemerintah Kabupaten Pemalang harus meningkatkan budaya kerja yang positif dan memiliki integritas yang tinggi.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun arah kebijakan pembangunan jangka panjang agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

3.2.1 Isu Strategis Internasional

Dalam dinamika pembangunan daerah selalu memiliki tantangan, seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada situasi dan kondisi yang berdampak masif dalam pembangunan daerah. Memahami bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dalam pembangunan nasional, maka tantangan pembangunan nasional juga akan menjadi isu dan tantangan dalam pembangunan daerah. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 tertuang isu dan tantangan global yang akan dihadapi Indonesia yang disebut dengan "Megatren", beberapa poin megatren dituangkan pada Gambar sebagai berikut.



Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar III.2.
Tantangan Global Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Menindaklanjuti hal tersebut, maka tantangan global/megatren ini juga akan menjadi isu dan atau tantangan dalam pembangunan Kabupaten Pemalang mendatang dalam jangka panjang. Beberapa poin sesuai dengan *megatren global* yang akan dihadapi dalam pembangunan 20 (dua puluh) tahun mendatang Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1) Perkembangan Demografi Global

Pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (*people-centered development*) yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan penduduk. Pembangunan saat ini, belum sepenuhnya mengarah pada pembangunan berwawasan kependudukan dengan tantangan yang tergambar dari tingginya laju dan jumlah penduduk, struktur penduduk dan kepadatan dan persebaran penduduk yang belum merata. Perkembangan demografi global ini merupakan perubahan struktur umur yang menjadi sebuah kesempatan dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dengan memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM demi mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum rasio ketergantungan meningkat. Dalam pembangunan

Kabupaten Pemalang harus segera menyadari, menindaklanjuti serta mempersiapkan adanya dampak demografi global.

Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu mempersiapkan pembangunan, salah satunya dengan memaksimalkan pembangunan SDM terutama pada generasi yang berusia produktif terutama *skill* dan daya saingnya. Kemudian selain itu, perlu adanya persiapan kebutuhan masyarakatnya, terkait sarana dan prasarana, lapangan pekerjaan dan aksesibilitas. Dengan ini diharapkan perkembangan demografi global akan menjadi peluang dalam pembangunan Kabupaten Pemalang.

2) Perkembangan Teknologi

Pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan yang positif ini mengindikasikan bahwa dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang dimiliki, pembangunan Kabupaten Pemalang harus mampu mengikuti dan memanfaatkan setiap perkembangan globalisasi teknologi dan komunikasi. Oleh karena itu perlu penyiapan infrastruktur *Information Technology* (IT) dengan matang, agar seluruh wilayah Kabupaten Pemalang mampu mengakses dan memanfaatkan infrastruktur IT dalam pembangunan daerah.

Perkembangan teknologi yang kian pesat tidak hanya dimanfaatkan dalam pelayanan publik di Kabupaten Pemalang, namun juga percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan masyarakat terutama dalam dunia usaha dengan bekerjasama dengan *e-commerce*, sehingga market yang terjaring tidak hanya pada skala lokal saja, tapi juga konsumen di berbagai belahan dunia. Selain dalam dunia usaha, perkembangan IT juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memberikan ruang pada olahraga digital (*e-sport*) yang mana Kabupaten Pemalang pernah menyelenggarakan *Competition Mobile Legend E-Sport*. Hal ini menjadi peluang dan tantangan ke depan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang agar dapat mengembangkan dalam memanfaatkan perkembangan IT dalam seluruh aspek pembangunan daerah. Untuk itu pembangunan Kabupaten Pemalang diharapkan mampu mengakomodasi segala perkembangan teknologi yang berdampak positif dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

3) Pertumbuhan Kelas Menengah (*middle class*)

Pertumbuhan kelas menengah ini sangat terkait dengan tingkat ekonomi masyarakat dan/atau proporsi ekonomi masyarakat. Kelas menengah dapat diartikan masyarakat yang aman secara ekonomi, dan berpeluang kecil untuk menjadi miskin. Dengan ini dapat dikatakan kelas menengah merupakan tingkatan ekonomi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya secara layak dan sejahtera. Pertumbuhan kelas menengah ini berorientasi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, yang mana hal ini dianggap mampu menciptakan peluang ekonomi namun juga memberikan tantangan pada aspek sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan agar mampu naik kelas sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal

ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah dan dikolaborasikan dengan teknik pemasaran dengan penggunaan sosial media dan teknologi informasi. Dengan kolaborasi ini diharapkan mampu tercipta peluang-peluang usaha lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian.

4) Konstelasi Perdagangan Global

Konstelasi perdagangan global di dunia saat ini mengalami perubahan persaingan yang semakin ketat. Hal ini berpotensi memberikan dampak pada perdagangan di Indonesia dan juga Kabupaten Pemalang. Kabupaten pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi rakyat yang menjadi andalan di Kabupaten Pemalang adalah industri tekstil seperti sarung tenun, sarung palekat, kaos kaki dan goyor dan produk kerajinan yang sudah menembus pasar ekspor ke Singapura dan Malaysia. Selain itu adanya produk gondorukem yang menjadi ekspor andalan dari Kabupaten Pemalang dengan jumlah ekspor di tahun 2020 mencapai 6.622,6 ton senilai 132,49 miliar. Gondorukem (*resina colophonium*) adalah hasil olahan dari getah batam pinus, yang digunakan untuk beberapa industri seperti kertas, cat, plastik, kosmetik, elektronik, batik, sabun dan industri lainnya.

Adanya persaingan perdagangan global menjadi tantangan dalam pembangunan daerah khususnya pada bidang perdagangan dan industri. Kedepannya pemerintah Kabupaten Pemalang diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk unggulan daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor, yang pastinya akan berdampak pada pembangunan ekonomi daerah.

5) Tata Kelola Keuangan Global

Tata kelola keuangan global dan nasional sangat berkaitan dengan adanya perubahan struktur ekonomi dan demografi, yang kemungkinan hal ini juga akan dialami oleh Kabupaten Pemalang. Melihat pertumbuhan penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2045, ada kemungkinan pergeseran *aging society* dalam demografi penduduk, yang akan berdampak pada produktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Selain itu, perkembangan teknologi informasi saat ini telah mampu menggeser tata kelola keuangan global konvensional menjadi lebih modern yang terlihat pada penggunaan bank digital, fintech (*financial technology*) dan transaksi yang sudah *cash-less*. Perpaduan antara sistem IT dan perbankan dapat meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan. Namun pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial juga mempunyai resiko yang tinggi, jika belum ada regulasi yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan implikasi stabilitas keuangan dalam masyarakat maupun daerah.

6) Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

Pemanfaatan SDA merupakan salah satu cara memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangan penduduk yang semakin bertambah maka akan mengakibatkan tingginya masyarakat yang mengakses pemanfaatan SDA dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti air, bahan pangan, energi yang akan berpotensi menyebabkan kelangkaan. Pada akhirnya akan terjadi persaingan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Memahami hal ini, pemanfaatan SDA di

Kabupaten Pemalang harus dikelola dengan bijak terutama perlu adanya upaya konservasi SDA dan kolaborasi dengan teknologi pengolahan. Dengan demikian ketersediaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pemalang dapat dinikmati dalam jangka panjang.

7) Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan hidup. Perubahan iklim dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Salah satu potensi dampak perubahan iklim yang kemungkinan akan dialami oleh Kabupaten Pemalang adalah *Sea Level Rise* (peningkatan permukaan air laut) yang dapat menimbulkan kerugian sosio-meter. Peningkatan permukaan air laut seperti peristiwa banjir rob yang pernah terjadi di tahun 2022, tinggi air yang menggenangi pemukiman penduduk di 8 Desa antara 20–100 centimeter, paling parah di Desa Pesantren antara 80–100 centimeter. Hal ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian, tempat tinggal masyarakat dan kerugian infrastruktur. Selain itu perubahan iklim juga mempengaruhi kualitas hasil produksi panen tanaman pangan, yang berimplikasi pada meningkatnya harga bahan makanan pokok. Melihat dampaknya yang besar bagi pembangunan dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi isu perubahan iklim melalui perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan) yang harus terus dilaksanakan dalam pembangunan di Kabupaten Pemalang.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional merupakan isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya. Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu strategis adalah isu/kebijakan nasional yang dijabarkan dalam RPJPN 2025-2045, antara lain:

1. Produktivitas rendah
2. IPTEKIN dan riset lemah
3. Deindustrialisasi dini
4. Pariwisata di bawah potensinya
5. Ekonomi laut belum optimal
6. Kontribusi UMKM dan koperasi kecil
7. Infrastruktur dan literasi digital rendah
8. Pembangunan belum berkelanjutan
9. Integrasi domestik terbatas
10. Kualitas SDM yang makin rendah
11. Tata kelola pemerintahan belum optimal

- 12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah
- 13. Demokratisasi belum optimal
- 14. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Dengan mempertimbangkan segala potensi Negara Indonesia, isu dan dinamika tantangan pembangunan, dan berbagai kajian yang ada, maka Visi RPJPN Indonesia Tahun 2025-2045 sesuai penjabaran sebagai berikut:



Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar III.3.
Visi Indonesia Emas 2045

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas Emisi GRK menuju *net zero emission* sebagaimana gambar berikut.



Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar III.4.
Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

Berdasarkan visi di atas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.



Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar III.5.
Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, perlu adanya pendekatan pembangunan yang diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dalam 17 arah pembangunan yang terbagi dalam 3 transformasi besar yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi Tata Kelola yang secara rinci dijabarkan dengan 17 arah pembangunan pada Gambar sebagai berikut:

TRANSFORMASI INDONESIA		
Misi 1 : Transformasi Ekonomi	Misi 2 : Transformasi Ekonomi	Misi 3 : Transformasi Tata Kelola
IE 1 Kesehatan untuk Semua	IE 4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	IE 9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
IE 2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	IE 5 Penerapan Ekonomi Hijau	
IE 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	IE 6 Transformasi Digital	
	IE 7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
	IE 8 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
LANDASAN TRANSFORMASI		
Misi 4 : Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
IE 10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial	IE 11 Beragama Moderat dan Berkebhinekaan Maju	
IE 11 Stabilitas Ekonomi Makro	IE 14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	
IE 12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas	
	IE 16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	
	IE 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
KERANGKA IMPLEMENTASI		
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan berkeadilan		
Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		
Misi 8 : Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan		

Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar III.6.
17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan

3.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Pencapaian pembangunan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh pencapaian pembangunan kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang harus

memperhatikan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Menindaklanjuti hal tersebut maka beberapa urgensi dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan pembangunan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah:

- Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat
- Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat
- Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal
- Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
- Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah
- Belum optimalnya reformasi birokrasi

b. Isu pembangunan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah:

- Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
- Ketahanan pangan yang berkelanjutan
- Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
- Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
- Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat
- Tata kelola pemerintahan yang dinamis

c. Visi dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah:



Sumber : RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Gambar III.7.
Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah

Dari visi di atas, terdapat 5 (lima) pokok visi dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) **Penumpu Pangan dan Industri Nasional**, Jawa Tengah menjadi salah satu kontributor utama pangan serta rantai nilai industri nasional.
- 2) **Maju**, Berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, inovatif, serta mandiri (Kemampuan daerah mencukupi kebutuhan, mampu memberi

kontribusi pihak lain, kerja sama dg daerah lain serta tangguh mampu menghadapi krisis).

- 3) **Sejahtera**, diartikan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan.
- 4) **Berbudaya**, bermakna masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor.
- 5) **Berkelanjutan**, bermakna menjaga kesejahteraan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta ketahanan terhadap risiko bencana.

Dalam mencapai visi tersebut, maka sebagai upaya pencapaian misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial
2. Tranformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan

Dalam pembangunan jangka panjang, terdapat tema pembangunan dalam empat tahapan pembangunan. Tema pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut.



Sumber : RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Gambar III.8.
Tema RPJPD Provinsi Jawa Tengah

- d. Arah kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Pemalang dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Pemalang masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Bregasmalang yang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, dan Kota Tegal, dalam Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, diarahkan pengembangannya antara lain untuk memadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Tegal dan kabupaten di sekitarnya dengan memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan serta penanganan bencana dan kawasan terdampak rob. Pada kawasan ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Brebes sebagai salah satu kawasan

industri strategis di bagian barat Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian akan dikembangkan disertai dengan upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Selain itu, sebagai salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat maka akan dilakukan upaya untuk memadukan pengembangan kawasan perbatasan provinsi Jawa Tengah-Jawa Barat yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana di berbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah.

3.2.4 Isu Strategis Daerah

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang.

1) Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD

Dalam penyusunan RPJPD harus mengimplementasikan isu pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam KLHS RPJPD, yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis skenario kondisi lingkungan dan skenario tujuan pembangunan berkelanjutan. Isu pembangunan berkelanjutan paling strategis KLHS RPJPD Kabupaten Pemalang, yaitu:

- a. **Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan**, Hal tersebut tercermin dari masih terdapatnya permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama terkait dengan pangan, kesehatan, dan pendidikan.
- b. **Belum meratanya distribusi kesejahteraan masyarakat**, ditandai dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di angka 15,03% di tahun 2023, lebih tinggi dari tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang sebesar 10,77% di tahun yang sama. Tingginya tingkat kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah belum optimalnya praktek keluarga berencana guna mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- c. **Ancaman keberlanjutan kualitas dan kuantitas sumber daya air**. Hal ini berkaitan dengan permasalahan kualitas air. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Pemalang di tahun 2023 sebesar 53,33 yang termasuk dalam kategori kurang. Berdasarkan hasil pengujian air sungai di beberapa titik di Kabupaten Pemalang, parameter TDS, TSS, BOD, COD, NH3, dan Total Coliform berada di atas baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa air sungai tercemar oleh limbah padat maupun cair dari kegiatan domestik, industri, dan limpasan pupuk pertanian. Penurunan kualitas air tersebut berdampak pada jumlah ketersediaan air bersih di Kabupaten Pemalang. Meskipun, daya dukung air permukaan Kabupaten Pemalang masih dalam kondisi surplus atau belum terlampaui, namun dengan adanya penurunan kualitas air berdampak pada jumlah ketersediaan air bersih yang dapat digunakan.
- d. **Ancaman terhadap pelestarian tutupan hutan dan lahan**. Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Pemalang dapat diindikasikan melalui

Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai IKL Kabupaten Pemalang tahun 2023x menunjukkan angka 54,61 yang termasuk dalam kategori rendah. Selain itu, masih kurangnya luasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pemalang. Salah satu keanekaragaman hayati yang terdapat di Kabupaten Pemalang yang berada di wilayah pesisir adalah adanya mangrove. Dari total luas mangrove yang ada, yaitu seluas 3.176.127,35 Ha, 2.691.359,31 Ha mangrove atau sekitar 85% dalam kondisi rusak.

- e. **Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim.** Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sisi utara, sehingga memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana rob. Selain itu, secara karakteristik geografi, Kabupaten Pemalang mempunyai risiko bencana kebakaran, rob, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kekeringan yang termasuk dalam jenis bencana hidrometeorologi. Bencana-bencana tersebut menunjukkan tren kejadian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan ancaman akibat dampak perubahan iklim.
- f. **Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah.** Sektor industri menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Pemalang. Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Pemalang namun laju pertumbuhan industri manufaktur tidak selalu meningkat karena sangat tergantung dengan kondisi pasar serta faktor lain seperti saat terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 laju industri manufaktur sebesar 4,5% turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,5%. Berkembangnya industri di Kabupaten Pemalang juga akan berdampak terhadap lingkungan. Tren emisi GRK cenderung meningkat selama kurun waktu 2017-2021 dengan kontributor terbesar penghasil emisi GRK adalah sektor energi yaitu sebesar 448.579,09 Gg CO₂eq. Untuk itu perlu didorong sebagai bentuk transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau.
- g. **Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, keamanan dan kapasitas keuangan daerah.** Permasalahan ini terkait dengan terbatasnya penggunaan teknologi informasi dalam akses data dan pelayanan publik serta terbatasnya kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta perlindungan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban umum.

2) Telaahan RTRW

A. Konstelasi Kabupaten Pemalang secara Regional

Apabila ditinjau kedudukannya secara regional, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Pemalang memiliki peran sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Kabupaten Pemalang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Bregasmalang yang merupakan kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang yang disajikan pada Gambar berikut.



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar III.9.
Wilayah Pengembangan Bregasmalang

Orientasi pengembangan Bregasmalang, dimana Kota Tegal berperan sebagai pusat wilayah pengembangan dengan statusnya sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), didasarkan pada pada sektor unggulan yang meliputi:

1. industri;
2. perdagangan dan jasa;
3. pertanian;
4. pariwisata;
5. perikanan;
6. kehutanan; dan
7. pertambangan.

Secara spesifik Kabupaten Pemalang diarahkan pengembangan wilayahnya berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah, sebagai wilayah dengan peruntukkan strategis kawasan agropolitan dan minapolitan. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Sedangkan kawasan minapolitan adalah kawasan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

B. Tujuan Penataan Ruang Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, tujuan penataan ruang Daerah didasarkan atas sektor utama yang akan menjadi penopang perkembangan wilayah daerah yaitu sektor pertanian, yang didukung sektor perdagangan dan industri. Adapun penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Pemalang memiliki tujuan untuk: "Mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan".

Tujuan penataan ruang Kabupaten Pemalang yang berbasis pada pengembangan pertanian didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah yang terpadu tidak terlepas dari kondisi ekoregion Kabupaten Pemalang yang tersusun atas *landscape* wilayah pertanian baik sektor pangan maupun hortikultura. Selain beras sebagai komoditas pangan utama, Kabupaten Pemalang juga memiliki komoditas pangan strategis lainnya, seperti komoditas tanaman hortikultura. Beberapa di antaranya, bawang merah, cabe besar, nanas, mangga, dan durian. Sedangkan untuk perkebunan, terdapat cengkeh, teh, tebu, kopi arabika, kopi robusta serta tembakau.

Selanjutnya, berkaitan dengan telaah RTRW, maka aspek substansial yang diperlukan adalah konsistensi alokasi pola ruang yang mendukung ke arah kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Pemalang dalam periode waktu 20 tahun mendatang yang dapat ditinjau dalam alokasi fungsi budidaya dan fungsi lindung. Pada tahap ini, diharapkan agar orientasi perencanaan spasial dapat saling melengkapi secara komprehensif dengan dokumen perencanaan pembangunan.

Dengan memperhatikan sudut pandang Penataan Ruang, Daya Dukung dan Daya Tampung Spasial, rekomendasi yang dapat diberikan sebagai data dukung perumusan RPJPD adalah Pengembangan Berbasis pada Pertanian (Agropolitan dan Minapolitan) dengan didukung oleh kegiatan hilirisasi pertanian baik Agroindustri maupun Agribisnis.

Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional, provinsi maupun telaahan terhadap KLHS dan RTRW dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Pemalang yang akan ditangani dalam 20 tahun ke depan sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Bonus Demografi dalam Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing dan Adaptif

Kualitas SDM menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Dengan SDM yang berkualitas diharapkan akan mampu melaksanakan penyelenggaraan pembangunan daerah dengan optimal. Pembangunan SDM harus menyeluruh, artinya tidak hanya dari aspek kualitas pendidikan atau kepintarannya/kecerdasannya saja, namun juga harus berkarakter. SDM yang berkarakter ini terbentuk dari nilai-nilai budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan kualitas SDM unggul diharapkan mampu mencetak generasi yang berdaya saing, berbudaya dan aplikatif terhadap perkembangan teknologi informasi. Kemampuan SDM untuk berdaya saing menjadi tuntutan untuk memenuhi pasar kerja dan dunia usaha. Dengan adanya isu bonus demografi, kualitas SDM menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Kabupaten Pemalang. Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu mempersiapkan beberapa hal yang matang dalam upaya mencetak generasi-generasi yang tangguh, berdaya saing, berbudaya sehingga momentum bonus demografi ini dapat ditangkap sebagai peluang untuk menyerap tenaga kerja yang mampu bersaing dalam dunia kerja.

2) Akselerasi Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu dampak dari kehidupan masyarakat yang belum sejahtera, artinya masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan mandiri. Kemiskinan adalah salah satu implikasi dari belum maksimalnya pembangunan kualitas SDM terutama dalam bidang pendidikan. Keterbatasan masyarakat dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang baik akan menggiring pada minimnya produktivitas masyarakat. Kemiskinan akan menjadi lingkaran yang akan sulit diputus, jika masyarakat tidak mampu memberdayakan dirinya menjadi lebih produktif. Dengan melihat urgensi pengentasan kemiskinan ini, perlu adanya akselerasi dari beberapa aspek pembangunan daerah untuk berkolaborasi dan berkerja sama dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini penting mengingat dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya dari sisi pendidikan dan kesehatan, namun juga sarana-prasarana pemukiman yang layak, pelibatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, dan lain-lain. Melalui akselerasi pengentasan kemiskinan ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang.

3) Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Menurut Kementerian PAN-RB, tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi menjadi kebutuhan dalam dinamika penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Beberapa isu yang penting dalam reformasi birokrasi adalah 1) birokrasi yang belum kolaboratif; 2) transformasi digital yang belum optimal; 3) penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas; 4) integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala; 5) budaya birokrasi: BerAKLHAK yang belum terimplementasi dengan baik. Mengingat capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang 68,97 masuk pada kategori "baik", maka penting adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berintegritas, transparan dan akuntabel agar kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dapat ditingkatkan.

4) Penguatan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Ekonomi hijau adalah bentuk pembangunan ekonomi yang mengedepankan pembangunan ekonomi dengan meminimalisir risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial. Konsep ekonomi hijau juga diartikan perekonomian yang minim menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan. Prinsip ekonomi hijau merupakan perwujudan dari pembangunan berkelanjutan, yang memadukan tiga pilar pembangunan yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Prinsip ekonomi hijau beserta pembangunan berkelanjutan menjadi strategi

pembangunan yang tepat untuk mengakselerasikan pembangunan Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Demikian halnya dalam pembangunan pada bidang infrastruktur di Kabupaten Pemalang nantinya harus diarahkan pembangunan infrastruktur lingkungan yang mampu mengurangi emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati. Penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang dijalankan dengan prinsip kesejahteraan, keadilan, konservasi alam, efisien, dan tata kelola yang baik. Dengan penguatan tersebut, pembangunan Kabupaten Pemalang dapat berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.

5) Stabilitas Ketahanan Pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Stabilitas ketahanan pangan merupakan urgensi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui stabilitas ketahanan pangan, Kabupaten Pemalang dapat memastikan ketersediaan gizi yang cukup untuk semua lapisan masyarakat dan mampu mempertahankan kesehatan serta nutrisi yang baik. Pilar ketahanan pangan meliputi ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kestabilan. Ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan produksi dan cadangan pangan, menjangkau konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

Potensi luas lahan sawah mencapai 35 hektar di Kabupaten Pemalang menjadikannya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Potensi ini harus dimaksimalkan dengan mengkolaborasikannya dengan penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, Kabupaten Pemalang diorientasikan pada pembangunan sektor usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (pertanian dalam arti luas). Hal ini penting untuk mengembangkan produk-produk pertanian unggulan daerah agar Kabupaten Pemalang memiliki ketahanan pangan yang kuat di tengah ancaman ketahanan pangan. Ancaman ketahanan pangan tersebut meliputi perubahan iklim, penurunan kesuburan tanah akibat aktivitas ekonomi, serta ketidakstabilan harga. Stabilitas ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang dapat diupayakan dengan pengembangan pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, pengelolaan sumber daya, penguatan infrastruktur pertanian, serta pengelolaan risiko bencana. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan masyarakat, sehingga mampu menjadi swasembada pangan yang berkelanjutan untuk Kabupaten Pemalang.

6) Antisipasi Masuknya Budaya Asing yang Merusak Kearifan Budaya Lokal dan Norma Masyarakat, khususnya Generasi Muda

Perkembangan *society* 5.0 telah mengakselerasikan perkembangan teknologi informasi secara pesat. Implementasinya, perkembangan ini tidak hanya memberikan peluang tetapi juga tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertukaran budaya dan pengetahuan, perluasan peluang bisnis dan investasi, peningkatan akses dan keterhubungan sampai pembentukan masyarakat yang inklusif menjadi peluang dalam perkembangan ini. Akan tetapi, pertukaran budaya dengan masuknya

budaya asing dapat menjadi katalisator sistem sosial di Kabupaten Pemalang. Kurangnya penguatan budaya lokal dapat merusak kearifan budaya lokal dan norma masyarakat di Kabupaten Pemalang. Masuknya budaya asing yang dapat merusak kearifan budaya lokal dan norma masyarakat rentan menyerang generasi muda. Generasi muda memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap media global, interaksi lintas batas, dan eksposur budaya. Dampak negatif dari adanya kemudahan ini harus dapat diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pelestarian kearifan lokal dan norma sosial menjadi tugas penting Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama seluruh masyarakat. Dapat diupayakan dengan peningkatan pendidikan dan kesadaran budaya serta norma dalam lingkungan masyarakat, pembiasaan penggunaan bahasa lokal, penyelenggaraan festival dan acara budaya, pemberdayaan komunitas budaya sampai kolaborasi antar generasi. Langkah strategis ini diharapkan mampu diselenggarakan secara holistik oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sinergitas *stakeholders* untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal serta penerapan norma sosial di lingkungan masyarakat Kabupaten Pemalang.

7) Pemerataan Infrastruktur Pembangunan dan Penataan Kota yang Berkualitas

Pembangunan infrastruktur mempunyai dampak yang sangat berpengaruh dalam produktivitas masyarakat dan mendukung dalam percepatan pembangunan daerah. Infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk mempermudah aksesibilitas, konektivitas antar wilayah dan sarana prasarana umum dalam menunjang kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tidak boleh lepas dari RTRW, pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan peruntukannya mampu memberikan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di kabupaten Pemalang diharapkan mampu menjawab permasalahan seperti bencana banjir dan rob yang terjadi di wilayah pesisir, sehingga perlu segera dilakukan penanganan. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang mampu memberikan kesan tertata, rapi, indah, bersih sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan infrastruktur dengan nyaman.

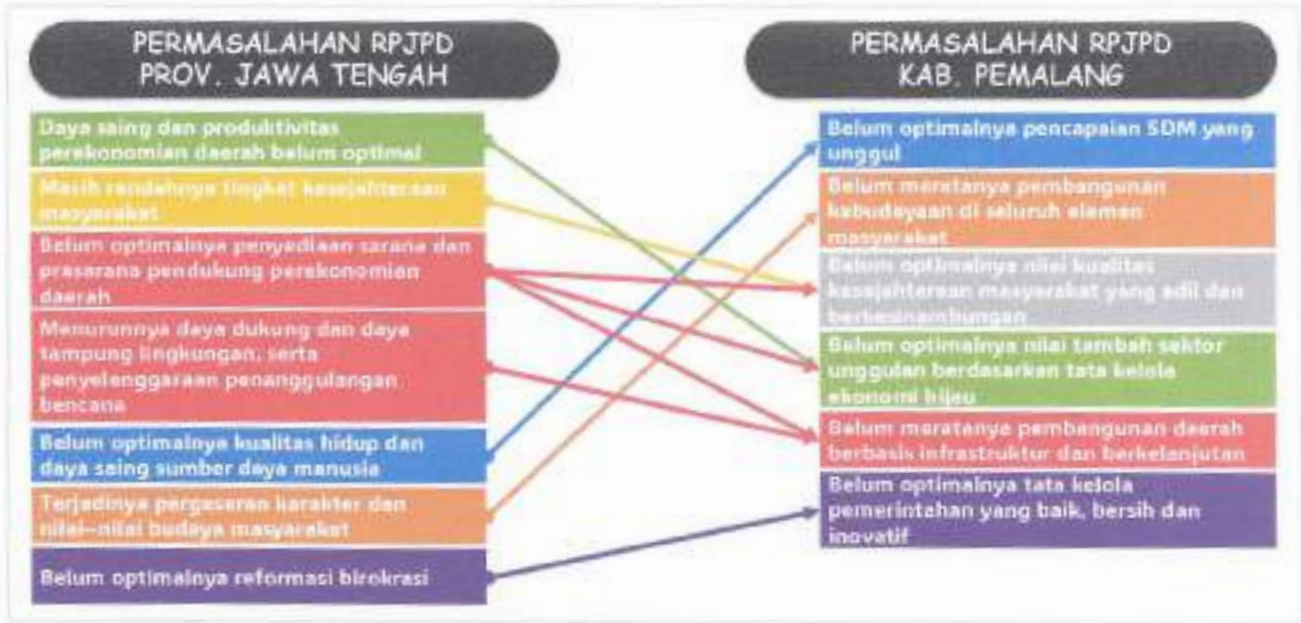
Dengan menyandingkan hasil telaah KLHS di atas dalam rangka sinkronisasi antara permasalahan dan isu strategis RPJPD dengan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB), maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan dan isu strategis RPJPD telah selaras dengan isu PB. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen RPJPD sudah mengimplementasikan isu KLHS-RPJPD sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel III.1.
Matriks Persandingan Isu Pembangunan Berkelanjutan
dengan Permasalahan dan Isu RPJPD

KLHS-RPJPD	RPJPD	
ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PB)	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya pencapaian SDM yang unggul• Belum optimalnya pembangunan kebudayaan di seluruh elemen masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan Bonus Demografi dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing dan adaptif• Antisipasi masuknya budaya asing yang merusak kearifan budaya lokal dan norma masyarakat, khususnya generasi muda
Belum meratanya distribusi kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkesinambungan	Akselerasi pengentasan kemiskinan
Ancaman keberlanjutan kualitas dan kuantitas sumber daya air	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya nilai tambah sector unggulan berlandaskan tata Kelola ekonomi hijau• Belum meratanya pembangunan daerah berbasis infrastruktur dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan• Stabilitas ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat• Pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan kota yang berkualitas
Ancaman terhadap pelestarian tutupan hutan dan lahan		
Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim		
Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Implementasi Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, keamanan dan kapasitas keuangan daerah		

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Dalam rangka sinkronisasi dengan rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah, permasalahan dan isu strategis dalam RPJPD disandingkan dengan permasalahan dan isu strategis pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Diperoleh hasil pada beberapa aspek permasalahan dan isu strategis sudah sesuai, seperti terlihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar III.10.
Keterkaitan Permasalahan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar III.11.
Keterkaitan Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dimana keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan di daerah-daerah. Pembangunan daerah yang efektif akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan nasional akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur, teknologi dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pembangunan daerah sekaligus juga merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sebagai representasi negara di tingkat lokal, memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong dan mengarahkan pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu Kabupaten Pemalang memiliki andil dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 yang hendak dicapai dalam periode jangka panjang tahun 2025-2045.

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tersebut pada pasal 260 yang berbunyi "Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional". Pasal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban dalam melakukan pembangunan jangka panjang dua puluh tahunan dengan menyusun dan merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang nantinya akan diimplementasikan dalam pembangunan jangka menengah lima tahunan.

Visi pembangunan jangka panjang merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan kondisi ideal (cita-cita) yang ingin dicapai oleh suatu daerah dalam jangka panjang 20 tahun. Visi ini menjadi landasan bagi seluruh kegiatan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pada titik ini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang dan bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen serta upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Upaya atau langkah konkret untuk mewujudkan visi dirumuskan dalam misi. Jadi, misi merupakan pernyataan yang lebih spesifik tentang apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik

eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

4.1 Visi Daerah

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang sejalan dengan pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Visi pembangunan nasional tahun 2025-2045 yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Perumusan visi tersebut diantaranya dengan mempertimbangkan kekuatan, yang merupakan modal dasar Indonesia, antara lain kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Pada tahun 2045, Indonesia yang Berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Pada tahun 2045 Indonesia yang Maju diharapkan sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia semakin berperan penting dalam berbagai forum-forum internasional. Pada tahun 2045 Indonesia yang Berlanjutan, adalah sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah serta kondisi hutan, sungai, danau dan laut beserta isinya terjaga dengan baik. Adapun visi Jawa Tengah tahun 2025-2045 adalah Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan.

Pembangunan Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan juga dalam rangka menghadapi dinamika global dan nasional yang mempengaruhi. Dinamika tersebut terutama dipicu oleh megatren global seperti perkembangan demografi global, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, perkembangan teknologi, peningkatan urbanisasi dunia, perubahan konstelasi perdagangan global, pergeseran tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah (*middle class*), peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa. Hal tersebut menuntut respon mitigasi dan adaptasi yang cepat dengan segala potensi yang dimiliki. Respon terhadap dinamika yang serba cepat ini diperlukan percepatan pembangunan dengan pendekatan transformasi dalam setiap aspek pembangunan. Transformasi untuk merespon dinamika harus juga diseimbangkan dengan ketahanan sumber

daya dan budaya agar tetap tangguh dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang.



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar IV.1.
Kerangka Logis Perumusan Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner partisipasi masyarakat yang menghasilkan simpulan dari harapan masyarakat, serta memperhatikan visi dan misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah serta tujuan RTRW dan KLHS RPJPD, maka kerangka logis perumusan visi Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar IV.1 tersebut di atas.

Sementara itu, tujuan RTRW disebutkan bahwa tujuan RTRW Kabupaten Pemalang adalah mewujudkan ruang daerah yang berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Ketercapaian visi Kabupaten Pemalang dilihat dari sudut pandang penataan ruang, daya dukung dan daya tampung spasial, maka rekomendasi yang dapat diberikan sebagai data dukung perumusan RPJPD adalah pengembangan berbasis pada pertanian (agropolitan dan minapolitan) dengan didukung oleh kegiatan hilirisasi pertanian baik agroindustri maupun agribisnis.

Berdasarkan kerangka berpikir pembangunan jangka panjang yang tergambar dalam *logframe* di atas dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu dan tantangan global serta harapan masyarakat berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi dan tujuan RTRW, ditetapkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 yaitu:

"PEMALANG MULYA"
(MAJU, UNGGUL, LESTARI DAN BERBUDAYA)

Penjelasan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 sebagai berikut:

a. MAJU

Kemajuan suatu daerah atau masyarakat diartikan mempunyai kemampuan dalam berinovasi dan berkreasi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Kabupaten yang maju diartikan sebagai daerah yang berhasil mencapai tujuan pembangunan dilihat dari tingkat ekonomi, kemajuan teknologi, keamanan dan menjadi tempat yang ideal bagi masyarakatnya untuk hidup serta pelayanan fasilitas publik yang baik, pelayanan pendidikan serta fasilitas kesehatan yang sudah sangat memadai. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi kabupaten yang maju dimana hal ini akan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pemanfaatan teknologi dan penguatan inovasi.

b. UNGGUL

Masyarakat Kabupaten Pemalang yang mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi, visioner serta memiliki pemikiran maju, optimistis, didukung semangat belajar dan berprestasi yang tinggi. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi kabupaten yang unggul dimana hal ini akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan.

c. LESTARI

Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan saat ini, sedangkan di sisi lain tuntutan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka menjadi penting untuk membangun Kabupaten Pemalang dengan terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Perwujudan Kabupaten yang lestari merupakan komitmen untuk mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan keunggulan dari sisi komoditas pertanian dan perkebunan, potensi pariwisata, produk UMKM hingga inovasi. Prinsip yang ada berupa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Dalam perwujudan pokok visi ini, Kabupaten Pemalang berkontribusi nyata pada target nasional untuk menarik investasi berkualitas ramah lingkungan, ramah sosial untuk meningkatkan daya saing daerah, membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru, serta mencegah resiko kebencanaan dan krisis iklim.

Selain itu, beberapa upaya lain untuk mewujudkan Pemalang yang lestari adalah dengan bergotong royong dengan para pihak lintas sektor dan lintas latar belakang untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan menjaga ekosistem penting yang ada di Kabupaten Pemalang. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi kabupaten yang lestari dimana hal ini akan fokus pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

d. BERBUDAYA

Masyarakat Kabupaten Pemalang di tahun 2045 diharapkan merupakan masyarakat yang berbudaya. Makna dari masyarakat berbudaya antara lain, masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong, bertindak terpuji, tidak melakukan kerusakan, serta memegang teguh nilai-nilai agama, tradisi,

kearifan dan budaya lokal, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi kabupaten yang berbudaya dimana hal ini akan fokus pada pengembangan budaya, agama, pendidikan karakter dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Masing-masing pokok visi memiliki indikatornya masing-masing yang dapat diukur keberhasilannya. Visi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Pemalang. Pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis pemerataan infrastruktur, SDM yang unggul, pemantapan stabilitas ekonomi agroindustri serta agrobisnis berbasis pengembangan kawasan yang inovatif dan produktif menjadi *core* bisnis Kabupaten Pemalang di tahun 2025-2045.

Dengan melihat permasalahan, isu strategis, serta harapan masyarakat, maka dapat digambarkan keterkaitan pokok visi dengan sasaran visi Kabupaten Pemalang sebagai berikut:



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar IV.2.
Keterkaitan Pokok Visi dan Sasaran Visi Daerah

Sasaran pertama, peningkatan pendapatan per kapita, mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju. Peningkatan pendapatan per kapita Kabupaten Pemalang ditunjukkan dengan PDRB per kapita mencapai sekitar 107,73-126,53 juta rupiah di tahun 2045. Upaya peningkatan pendapatan per kapita terutama didorong oleh peningkatan pembangunan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Kontribusi sektor industri diperkirakan mengalami kenaikan mencapai 25,92% di tahun 2045. Sementara itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Pemalang akan tetap tumbuh meskipun laju pertumbuhannya melambat menjadi 1% di tahun 2045.

Sasaran kedua, peningkatan daya saing sumber daya manusia, mendukung pencapaian sasaran visi nasional daya saing sumber daya manusia meningkat,

serta pengentasan kemiskinan dan ketimpangan mendukung pencapaian sasaran visi nasional kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang diproyeksikan mencapai 79,41 di tahun 2045, dan tingkat kemiskinan menurun menjadi sekitar 0,62 – 0,00 persen di tahun 2045. Sasaran ini didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas yang merata, kesehatan untuk semua, pembangunan keluarga yang berkualitas, dukungan pada kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif, serta perlindungan sosial yang adaptif.

Sasaran ketiga, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission* mendukung sasaran visi pembangunan nasional yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*. Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK, sebagai wujud perlindungan terhadap lingkungan dan dukungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penurunan emisi GRK kumulatif ditargetkan sebesar 17.907.793,18 di tahun 2045.

Sasaran keempat, peningkatan nilai budaya, agama, dan tata kelola pemerintahan mendukung sasaran visi pembangunan nasional kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sasaran ini didukung oleh pencapaian Indeks Kebudayaan Daerah 60,96% di tahun 2045, Indeks Kerukunan Umat Beragama sekitar 77,07-77,09 di tahun 2045 dan Indeks Inovasi Daerah sebesar 73,36 di tahun 2045.

Tabel IV.1.
Sasaran Visi RPJPD, Indikator dan Target

POKOK VISI	SASARAN VISI	INDIKATOR	Baseline 2025	TARGET			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
MAJU (Ekonomi)	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	22,55-22,70	42,55-61,35	82,55 -101,35	95,05 -113,85	107,73-126,53
		Kontribusi PDRB sektor Industri (%)	22,68	23,29	24,09	24,90	25,92
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	2	2	2,5	1	1
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,14-4,90	4,65-5,35	4,93-5,63	5,67-6,37	6,30-7,00
UNGGUL (SDM dan Kesejahteraan)	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	69,75	71,78	74,21	76,53	79,41
	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	14,31 - 13,64	14,31-10,66	9,75 - 6,10	5,18 - 1,53	0,62 - 0,00
LESTARI (Infrastruktur dan Lingkungan)	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (TonCO2eq)	209.123,35	1.336.470,361	3.730.377,397	8.025.136,780	17.907.793,18
BERBUDAYA (Budaya dan Tata Kelola)	Peningkatan Nilai Budaya, Agama dan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kebudayaan Daerah (Angka)	57	59,36	59,86	60,36	60,96
		Indeks Kerukunan Umat	70,88-74,90	74,95-74,97	75,05-75,07	76,05-76,07	77,07-77,09

POKOK VISI	SASARAN VISI	INDIKATOR	Baseline 2025	TARGET			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Beragama (Angka)					
		Indeks Inovasi Daerah (Angka)	43,36	49,36	56,86	64,36	73,36

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

4.2 Misi Daerah

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar IV.3.
Logical Framework Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

Dengan landasan berpikir, harapan masyarakat serta mempertimbangkan berbagai pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu dan

tantangan global, ditetapkan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang 2025-2045 diarahkan pada cita-cita Pemalang Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Cita-cita ini menjadi visi pembangunan Kabupaten Pemalang 2025-2045 yang dituangkan dalam RPJPD dan penuangannya ke dalam misi pembangunan jangka panjang yang digambarkan dalam *logical frame* pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Setiap visi dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi yang mengandung makna landasan transformasi dan pengarusutamaan transformasi. Masing-masing misi diterjemahkan ke dalam 15 arah pembangunan. Keterkaitan antara visi, misi dan arah pembangunan dapat dilihat pada gambar IV.3 tersebut di atas.

Logical framework pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut menggambarkan bahwa cita-cita Kabupaten Pemalang 2045 adalah Pemalang Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Pencapaian cita-cita pembangunan Kabupaten Pemalang ini tercermin dari kualitas hidup masyarakat yang semakin baik dan terjamin, serta dari terpenuhinya semua kebutuhan layanan dasar masyarakat.

Perwujudan cita-cita pembangunan Kabupaten Pemalang dua puluh tahun ke depan ditopang dengan lima landasan transformasi sebagai kekuatan pembangunan daerah. Lima landasan tersebut meliputi transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang didukung dengan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan, ketahanan sumber daya alam dan lingkungan serta kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana. Dalam rangka mewujudkan semua kondisi tersebut diperkuat dengan kerangka pengarusutamaan transformasi meliputi ketahanan budaya dan transformasi tata kelola pemerintahan yang tergambar dari individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang memiliki karakter budaya, agama serta memegang erat tradisi.

Berdasarkan visi jangka panjang Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan yaitu “PEMALANG MULYA (MAJU, UNGGUL, LESTARI DAN BERBUDAYA)” yang dijabarkan ke dalam masing-masing pokok visi serta berkaitan dengan kondisi akhir Kabupaten Pemalang yang diharapkan hingga tahun 2045 sebagai suatu visi pembangunan, maka dalam rangka perwujudannya ditetapkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Transformasi Ekonomi

Misi transformasi ekonomi dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Pemalang yaitu transformasi ekonomi yang merupakan proses sektor-sektor yang memiliki produktivitas rendah ke sektor-sektor yang lebih tinggi produktivitasnya.

Transformasi ekonomi merupakan suatu keniscayaan Kabupaten Pemalang untuk menuju Indonesia Emas 2045 ditengah kondisi global yang tengah mengalami ketidakpastian akibat kompetisi yang semakin tajam. Untuk memperkuat hal tersebut menjadikan pentingnya transformasi ekonomi, untuk menjaga momentum positif guna dapat terus meningkatkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pemalang. Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan

ekonomi serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.

Transformasi ekonomi yang menjadi misi jangka panjang Kabupaten Pemalang 2025-2045 diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Pemalang pada 2045.

2. Transformasi Sosial

Misi transformasi sosial pada perencanaan jangka panjang Kabupaten Pemalang diwujudkan melalui kesejahteraan masyarakat dengan terjaminnya hak dan kesempatan sama untuk meningkatkan kualitas hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial, memiliki kesetaraan gender, serta terlayani kebutuhan dasar yang lain. Selain itu, misi ini juga menjamin masyarakat Kabupaten Pemalang memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera dengan indeks pembangunan manusia yang unggul tercermin dari masyarakat yang berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

Aspek lain yang difokuskan dalam misi ini adalah penurunan angka kemiskinan yang berorientasi pada kemajuan ekonomi kerakyatan, mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal di samping kemajuan ekonomi skala besar berbasis potensi unggulan lokal. Seluruh upaya perwujudan misi transformasi sosial diharapkan berkontribusi menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat guna menurunkan angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan.

3. Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata

Percepatan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang melalui misi ini salah satunya dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Hal ini merupakan peran strategis Kabupaten Pemalang yang memiliki andil dalam menjadikan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi,

yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur transportasi perhubungan melalui peningkatan layanan angkutan umum dan angkutan massal dapat secara langsung berkontribusi untuk pengurangan emisi GRK. pengembangan sistem transportasi umum massal yang andal, berkualitas, merata, terintegrasi dan terjangkau serta rendah emisi secara bertahap untuk meningkatkan peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk mendukung peningkatan efisiensi penggunaan energi.

Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan harapan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing yang dapat menunjang ketercapaian visi pembangunan jangka panjang khususnya dalam pokok visi menuju Pemalang “Lestari”.

4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam perwujudan misi ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki makna penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pemalang dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan hidup serta berkelanjutan.

Keseimbangan pendayagunaan sumber daya alam dan buatan agar tercapainya harmonisasi antara dua aspek kepentingan yaitu aspek kesejahteraan yang harus selaras dengan aspek Pertahanan Negara, sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam turut serta mengemban visi pertahanan demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya lahan, ketahanan air, kualitas lingkungan hidup (baik pada lingkup air, udara, tutupan lahan), penataan ruang dan ketahanan perubahan iklim.

5. Kondusivitas Wilayah dan Ketahanan Bencana

Dalam perwujudan misi kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana memiliki makna adanya upaya untuk peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat serta menjaga wawasan kebangsaan dan partisipasi politik serta pencegahan, kesiapsiagaan bencana dan mengurangi potensi terjadinya bencana yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pemalang.

6. Ketahanan Budaya

Dalam misi ketahanan budaya memiliki makna pemajuan kebudayaan yaitu upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Kabupaten Pemalang di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Ketahanan budaya adalah suatu proses perwujudan kesadaran kolektif yang tersusun dalam masyarakat untuk meneguhkan, menyerap dan menyesuaikan berbagai pengaruh dari budaya lain melalui proses belajar kebudayaan, yaitu enkulturasi, sosialisasi, dan internalisasi yang disandarkan pada pengalaman sejarah yang sama. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah bersama masyarakat harus memiliki kekuatan dan keteguhan dalam mempertahankan

budaya lokal dari pengaruh budaya asing yang kemungkinan dapat merusak atau membahayakan berlangsung hidup sebagai bangsa.

Asas pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal yang digunakan antara lain toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri daerah dan bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melestarikan warisan budaya daerah khususnya di Kabupaten Pemalang.

Termasuk dalam ketahanan budaya ini adalah meningkatkan implementasi nilai-nilai kemanfaatan/kebaikan yang diajarkan agama termanifestasikan dalam budaya masyarakat. Misalnya nilai gotong royong, kejujuran, menjaga kebersihan, toleransi, saling menolong, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa agama memberikan kerangka nilai dan moral, sedangkan budaya memberikan bentuk yang konkret pada nilai-nilai tersebut. Dalam konteks masalah, agama tidak hanya menjadi sumber spiritual, tetapi juga menjadi pendorong untuk berbuat baik dan berkontribusi bagi masyarakat. Agama memberikan landasan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesenian, adat istiadat dan sistem sosial.

7. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain: akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efisien dan efektivitas; transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan hukum. Pelayanan prima melalui digitalisasi teknologi menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Pemalang karena merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan dan terukur dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dicapai pada tahun 2045.

Dalam mengintegrasikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, perumusan misi Kabupaten Pemalang memedomani misi nasional sesuai hasil penyelarasan dengan RPJPN serta misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Sandingan penyelarasan Misi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2.
Sandingan Misi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang

Misi RPJPN	Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Misi RPJPD
Transformasi Sosial	Transformasi Sosial	Transformasi Sosial
Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi
Tranformasi Tata Kelola	Tranformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi	Kondusivitas Wilayah dan Ketahanan Bencana

Misi RPJPN	Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Misi RPJPD
	Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Budaya
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
Kesinambungan Pembangunan	Kesinambungan Pembangunan	

Sumber: Analisis Penyusun, 2024



BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Dalam proses pencapaian visi dan misi jangka panjang memerlukan tema dan arah kebijakan sebagai petunjuk strategis setiap tahapan per lima tahun selama dua puluh tahun. Tema dan arah kebijakan dapat dijadikan arahan atau pedoman calon kepala daerah dalam merumuskan visi, misi dan program politik. Tema dan arah kebijakan disusun menjadi tahapan-tahapan periode lima tahunan dan diterjemahkan ke dalam sasaran pokok serta indikator sebagai ukuran keberhasilan RPJPD.

Kabupaten Pemalang memiliki harapan dalam pembangunan jangka panjang untuk mencapai Pemalang Mulya pada tahun 2045. Pada akhir pembangunan jangka panjang, Kabupaten Pemalang menjadi daerah yang Maju, Unggul, Lestari, dan Berbudaya. Sehingga, dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang tersebut, Kabupaten Pemalang membagi tahapan pembangunan dalam empat tema pembangunan.

Pentahapan tema pembangunan yang dilakukan Kabupaten Pemalang disusun secara terukur dan konsisten untuk mencapai Kabupaten Pemalang Mulya. Berikut merupakan penjabaran tema pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan Kabupaten Pemalang.



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar V.1.
Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang

Tema pembangunan Kabupaten Pemalang dimulai dengan **Perkuatan Fondasi Transformasi**. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Pemalang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif berbasis pemerataan dan infrastruktur.

Tahap ke dua pembangunan di Kabupaten Pemalang menjadi langkah lanjutan pembangunan, yaitu **Akselerasi Transformasi**. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada percepatan pembangunan dan kualitas

infrastruktur di Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan SDM yang unggul dan ekonomi yang mandiri.

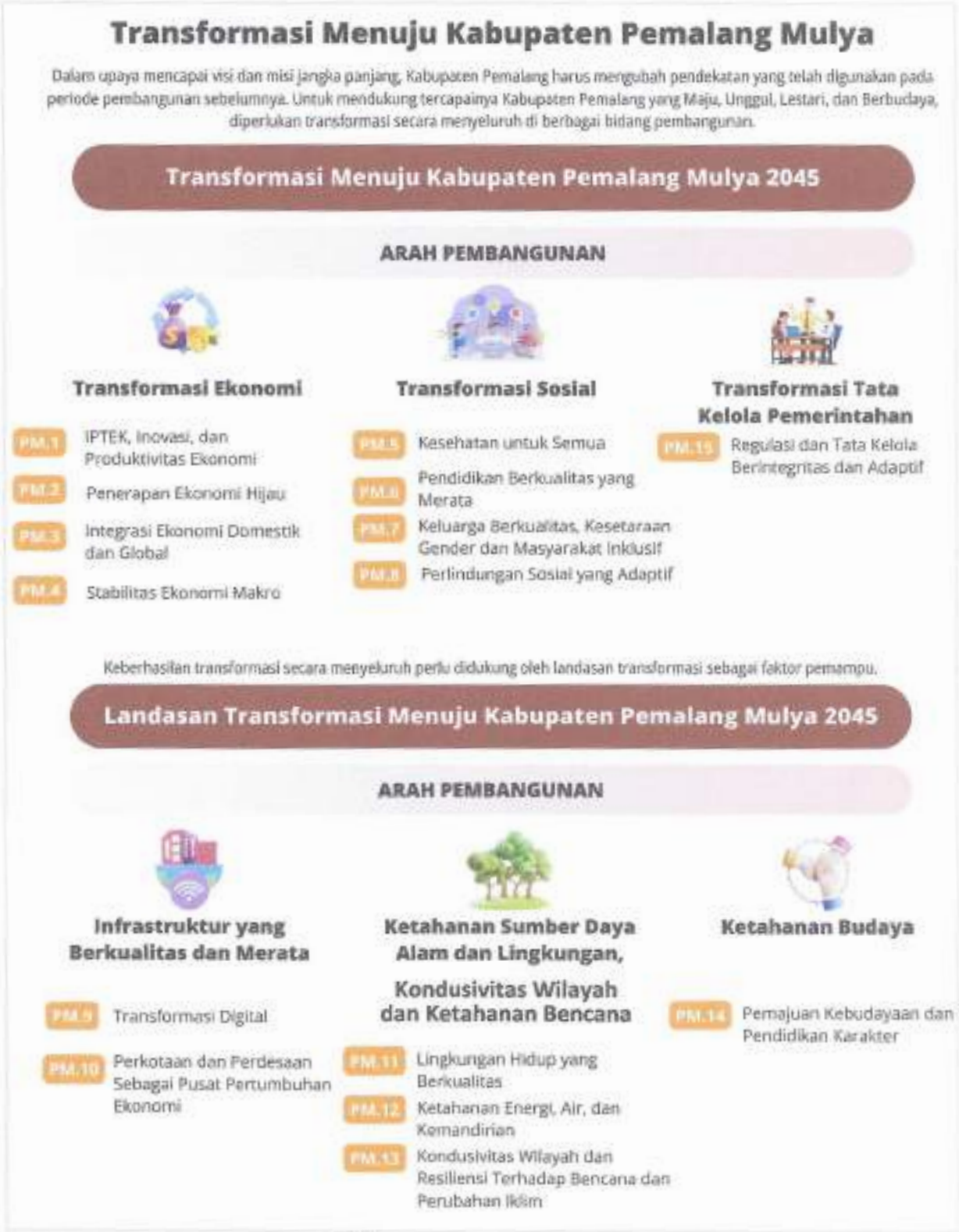
Tahap ke tiga pembangunan Kabupaten Pemalang merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu memastikan akselerasi transformasi dapat dilanjutkan dengan **Pemantapan Transformasi**. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pemantapan stabilitas ekonomi di Kabupaten Pemalang dengan memastikan berkembangnya infrastruktur pada kawasan produktif dan penguatan SDM yang inovatif.

Tahap akhir pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang adalah mewujudkan **Pemalang “Mulya”** tercapai. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada perwujudan masyarakat Kabupaten Pemalang yang sejahtera melalui terciptanya kemandirian ekonomi daerah, daya saing SDM dan penguatan infrastruktur.

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan menjadi panduan strategis yang mengarahkan suatu rencana pembangunan pada visi dan misi yang telah ditentukan. Kabupaten Pemalang memiliki visi pembangunan jangka panjang untuk menjadi kabupaten yang maju, unggul, lestari, dan berbudaya. Arah kebijakan yang disusun berguna untuk menyelaraskan langkah pembangunan yang terbagi menjadi empat tahap periode pembangunan.

Arah kebijakan Kabupaten Pemalang dirumuskan untuk mencapai misi-misi yang mengarah pada transformasi pembangunan secara menyeluruh. Dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi pembangunan, keberhasilan pembangunan jangka panjang memiliki arah pembangunan yang disesuaikan dengan misi Kabupaten Pemalang. Transformasi menuju Pemalang Mulya terbagi menjadi 15 (lima belas) arah pembangunan sebagai berikut.



transformasi dalam mencapai visi Pemalang Mulya dijabarkan pada penjelasan berikut.

5.1.1. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai pertumbuhan pada bidang ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi diupayakan melalui kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah dapat memberikan perubahan yang fundamental dalam struktur perekonomian suatu daerah.

Kabupaten Pemalang mengupayakan adanya transformasi ekonomi dalam pencapaian visi jangka panjang. Transformasi ekonomi pada Kabupaten Pemalang dapat diupayakan melalui pemanfaatan IPTEK, digitalisasi, serta penerapan ekonomi hijau. Dalam mewujudkan transformasi ekonomi Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar V.3.
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, transformasi ekonomi di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pengembangan ekonomi unggulan daerah”** yang dilakukan melalui analisis terhadap sektor ekonomi unggulan dan potensial di Kabupaten Pemalang. Selain itu, adanya inovasi pada bidang-bidang tertentu akan meningkatkan produktivitas ekonomi di Kabupaten Pemalang.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, transformasi ekonomi di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Percepatan transformasi ekonomi unggulan daerah”**. Tahap ini merupakan tahap lanjutan dalam transformasi ekonomi dengan memperhatikan perkembangan infrastruktur daerah. Tersedianya akses distribusi yang memadai dapat membantu pertumbuhan ekonomi unggulan di Kabupaten Pemalang. Penerapan ekonomi hijau yang

memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan memberikan nilai tambah pada aspek perekonomian daerah.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, transformasi ekonomi di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pemantapan ekonomi unggulan daerah yang inklusif”**. Pertumbuhan ekonomi unggulan daerah pada tahap ini dapat didorong dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sehingga dapat menciptakan kestabilan perekonomian daerah. Pada tahap ini, perekonomian unggulan di Kabupaten Pemalang dapat memberikan manfaat yang menyeluruh bagi masyarakat digambarkan melalui pemerataan pendapatan serta terbukanya peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, transformasi ekonomi diarahkan pada **“Perwujudan ekonomi unggulan daerah yang inklusif”**. Transformasi ekonomi di Kabupaten Pemalang ditandai dengan meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah. Hal ini diupayakan melalui pengintegrasian ekonomi daerah dan nasional serta terciptanya stabilitas ekonomi makro. Peningkatan terhadap nilai tambah sektor ekonomi Kabupaten Pemalang dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya.

5.1.2. Transformasi Sosial

Transformasi sosial merupakan upaya suatu daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui transformasi sosial diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik, adil, sejahtera, dan kohesif. Dalam transformasi sosial, aspek yang diperhatikan adalah manusia sehingga diupayakan adanya pemenuhan terhadap pelayanan dasar masyarakat serta pengembangan modal manusia dan sosial budaya.

Dalam mewujudkan transformasi sosial di Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar V.4.
Arah Kebijakan Transformasi Sosial



A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, transformasi sosial Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing”** dan **“Pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dan berkualitas”**. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dilakukan melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Program peningkatan kualitas SDM menjadi tujuan pertama yang harus diperhatikan. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki inovasi yang dapat membantu meningkatkan kemajuan dan produktivitas daerah, terlebih pada aspek pertumbuhan ekonomi. Aspek yang diperhatikan pada tahap ini adalah kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas dan terpelajar, serta terlindungi dan sejahtera.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap ke dua, transformasi sosial Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Percepatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing”** dan **“Percepatan kehidupan masyarakat yang layak dan berkualitas”**. Tahap ini menjadi tahapan lanjutan pada pembangunan transformasi sosial yang berfokus pada percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Pada aspek kesehatan, kebijakan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penambahan sarana dan prasarana kesehatan dilakukan untuk memenuhi pemerataan fasilitas kesehatan untuk semua. Pada aspek pendidikan, dilakukan penguatan pembelajaran berbasis digital dan pemerataan akses serta sarana prasarana pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses dan diterima oleh siapapun di Kabupaten Pemalang. Selain itu, peningkatan daya saing masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai keterampilan.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ke tiga, transformasi sosial Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pemantapan sumber daya manusia yang berdaya saing”** dan **“Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”**. Tahap ini memiliki fokus untuk mengembangkan ekonomi daerah melalui sumber daya manusia yang berdaya saing sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan pelatihan sehingga diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan produktivitas masyarakat. Masyarakat yang produktif dapat membantu roda perekonomian daerah sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang. Sehingga, kehidupan masyarakat menjadi lebih layak, sejahtera, dan berkeadilan.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan, transformasi sosial Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Perwujudan sumber daya manusia yang**

berdaya saing” dan “Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”. Keberhasilan pada tahap ini dapat dilihat melalui keterwujudan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia serta kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Pemalang. Masyarakat yang berdaya saing mampu memiliki inovasi dan mendorong diri mereka untuk produktif sehingga memiliki kompetensi. Peningkatan daya saing masyarakat akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup ekonomi masyarakat di Kabupaten Pemalang.

5.1.3. Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata

Infrastruktur menjadi hal yang penting dalam memajukan suatu wilayah. Adanya infrastruktur memberikan kemudahan akses yang dapat memajukan perekonomian suatu wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat pada suatu wilayah. Kabupaten Pemalang mengupayakan peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pemalang. Dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata tersebut, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar V.5.
Arah Kebijakan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kabupaten Pemalang diarahkan pada “Peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai”. Infrastruktur yang memadai dapat membantu pergerakan masyarakat di Kabupaten Pemalang. Hal ini didukung dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang tepat.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap ke dua, dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kabupaten Pemalang diarahkan pada “Percepatan peningkatan kapasitas infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai”. Peningkatan kapasitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Kabupaten Pemalang.

Konektivitas antar wilayah dapat mendorong produktivitas masyarakat dalam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara efisien.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ke tiga, dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pemantapan kualitas dan kapasitas infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai”**. Pembangunan infrastruktur yang merata dan memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang. Pembangunan kawasan potensial dan strategis pada suatu wilayah didukung dengan konektivitas dan sarana prasarana akan mempengaruhi aspek ekonomi. Selain itu, wilayah-wilayah layak huni dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pemalang.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Perwujudan infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai”**. Perwujudan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pemalang yang merata dan memadai dapat dilihat melalui kualitas konektivitas dan sarana prasarana yang memberikan kepuasan atas pelayanan yang diberikan.

5.1.4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan jangka panjang suatu daerah. Pengendalian terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada Kabupaten Pemalang, pengendalian terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas memperhatikan ketahanan energi, air serta kemandirian pangan di wilayah tersebut. Dalam mewujudkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar V.6.
Arah Kebijakan Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup



A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, dalam mewujudkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup”**. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Pemalang memperhatikan aspek-aspek lingkungan dengan upaya melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Peningkatan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap ke dua, dalam mewujudkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Percepatan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup”**. Dalam memperhatikan kualitas lingkungan hidup, diperlukan peningkatan dalam pengelolaan limbah yang terintegrasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ke tiga, dalam mewujudkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pemantapan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup”**. Lingkungan hidup yang berkualitas memiliki potensi berkelanjutan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menekan potensi kerugian ekonomi.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, dalam mewujudkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Perwujudan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup”**. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang memiliki peningkatan untuk dapat menyokong kegiatan masyarakat.

5.1.5. Kondusivitas Wilayah dan Ketahanan Bencana

Kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana sangat diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan jangka panjang suatu daerah. Kondisi wilayah yang kondusif serta pengelolaan terhadap potensi bencana alam dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pengendalian terhadap bencana alam juga memperhatikan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi Kabupaten Pemalang. Dalam mewujudkan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana di Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar V.7.
Arah Kebijakan Kondusivitas Wilayah dan Ketahanan Bencana

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, dalam mewujudkan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **"Pemenuhan kondusivitas wilayah dan pembangunan daerah yang tahan bencana"**. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Pemalang memperhatikan aspek-aspek agar wilayah yang ada menjadi kondusif dan melakukan upaya mengurangi risiko bencana. Peningkatan kondusivitas wilayah dapat dilakukan dengan perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang berkelanjutan. Selain itu, penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik daerah Kabupaten Pemalang sehingga dapat menyusun program mitigasi bencana.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap ke dua, dalam mewujudkan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **"Percepatan kondusivitas wilayah dan pembangunan daerah yang tahan bencana"**. Dalam memperhatikan kondusivitas wilayah, diperlukan peningkatan pengetahuan penduduk yang terintegrasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, dalam mewujudkan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **"Pemantapan kondusivitas wilayah dan pembangunan daerah yang tahan bencana"**. Kondusivitas wilayah memiliki potensi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pembangunan yang berketahanan dari bencana dan perubahan iklim untuk menekan potensi kerugian ekonomi.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, dalam mewujudkan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana di Kabupaten Pemalang

diarahkan pada **“Perwujudan kondusivitas wilayah dan pembangunan daerah yang tahan bencana”**. Kondusivitas wilayah di Kabupaten Pemalang memiliki peningkatan untuk dapat menyokong kegiatan masyarakat. Adanya program-program mitigasi bencana memberikan peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana di Kabupaten Pemalang.

5.1.6. Ketahanan Budaya

Kemajuan dan kelestarian budaya dapat membantu memperkuat karakter masyarakat. Kebudayaan berperan dalam memperkuat jati diri masyarakat pada suatu daerah. Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan, peran, dan posisi masyarakat dalam mengembangkan karakter suatu daerah. Dalam mewujudkan ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar V.8.
Arah Kebijakan Ketahanan Budaya

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, dalam mewujudkan ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Penguatan ketahanan budaya sebagai landasan dan modal dasar pembangunan”**. Masyarakat di Kabupaten Pemalang memiliki pendidikan karakter dan tradisi kebudayaan yang ditanamkan sejak dini sebagai landasan spiritual, beretika, dan moral sebagai modal dasar dalam pembangunan.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, dalam mewujudkan ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Percepatan ketahanan budaya sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif”**. Untuk mempercepat ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang dapat dilakukan penguatan terhadap ketahanan keluarga serta penguatan pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini. Adanya pembangunan kehidupan beragama yang inklusif dan rukun sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang penuh toleransi sehingga mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang setara pada setiap lapisan masyarakat.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, dalam mewujudkan ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **“Pemantapan perwujudan masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika budaya asing yang**

negatif". Dalam memperkuat masyarakat untuk menghadapi masuknya budaya asing diperlukan penguatan terhadap pendidikan karakter dan pemantapan tradisi kebudayaan di Kabupaten Pemalang. Hal ini dilakukan untuk melestarikan kebudayaan sebagai jati diri masyarakat dalam menghadapi perubahan dan masuknya budaya asing yang sangat cepat.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, dalam mewujudkan ketahanan budaya di Kabupaten Pemalang diarahkan pada **"Perwujudan masyarakat Kabupaten Pemalang yang memiliki ketahanan budaya"**. Pemajuan dan pelestarian budaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memantapkan peran masyarakat Kabupaten Pemalang dalam mempengaruhi perubahan. Hal ini dapat dilihat melalui kemajuan kebudayaan pada suatu daerah.

5.1.7. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan memungkinkan adanya pengelolaan sektor pemerintahan dan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Transformasi ini memungkinkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel yang didasarkan atas pertukaran informasi yang lebih terbuka dan transparan. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik mendorong pelayanan terhadap publik yang lebih optimal dan munculnya regulasi yang adaptif. Dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pemalang, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Gambar V.9.
Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

A. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan pada **"Pemenuhan pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan"**. Pelayanan terhadap publik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam mewujudkan pemenuhan pemerintahan yang adaptif dan inovatif dibutuhkan sumber daya yang cakap dan profesional melalui manajemen ASN untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.

B. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan pada **“Percepatan implementasi kinerja pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan”**. Implementasi tata kelola pemerintahan yang berbasis pelayanan dapat ditingkatkan dengan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan melalui pengembangan kelembagaan dan pelayanan berbasis teknologi dan digitalisasi.

C. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan pada **“Pemantapan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan”**. Adanya penyederhanaan regulasi dapat membantu memantapkan perwujudan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi. Kemudahan regulasi dan pelayanan terhadap pelaku bisnis dapat meningkatkan stabilitas perekonomian daerah di Kabupaten Pemalang.

D. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan pada **“Perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan”**. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan dibutuhkan peran serta berbagai pihak agar tercapai kesinambungan transformasi tata kelola. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat sipil. Hal ini dilihat melalui peningkatan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel V.1.
Arah Kebijakan RPJPD

MISI	TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)
	PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN PEMALANG "MULYA"
	Arah Kebijakan Tahap I	Arah Kebijakan Tahap II	Arah Kebijakan Tahap III	Arah Kebijakan Tahap IV
Transformasi Ekonomi	Pengembangan ekonomi unggulan daerah	Percepatan transformasi ekonomi unggulan daerah	Pemantapan ekonomi unggulan daerah yang inklusif	Perwujudan ekonomi unggulan daerah yang inklusif
Transformasi Sosial	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Percepatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Pemantapan Sumber Daya Manusia Pemalang yang berdaya saing	Perwujudan Sumber Daya Manusia Pemalang yang berdaya saing
	Pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dan berkualitas	Percepatan kehidupan masyarakat yang layak dan berkualitas	Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai	Percepatan peningkatan kapasitas infrastruktur pembangunan	Pemantapan kualitas dan kapasitas infrastruktur pembangunan	Perwujudan infrastruktur pembangunan yang merata dan memadai



MISI	TEMA TAHAP I (2025-2029)	TEMA TAHAP II (2030-2034)	TEMA TAHAP III (2035-2039)	TEMA TAHAP IV (2040-2045)
	PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PEMANTAPAN TRANSFORMASI	PERWUJUDAN PEMALANG "MULYA"
	Arah Kebijakan Tahap I	Arah Kebijakan Tahap II	Arah Kebijakan Tahap III	Arah Kebijakan Tahap IV
		yang merata dan memadai	yang merata dan memadai	
Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Percepatan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Pemantapan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Perwujudan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup
Kondusivitas Wilayah Dan Ketahanan Bencana	Pemenuhan kondusivitas wilayah dan pembangunan daerah yang tahan bencana	Percepatan kondusivitas wilayah dan pembangunan daerah yang tahan bencana	Pemantapan kondusivitas wilayah dan pembangunan daerah yang tahan bencana	Perwujudan kondusivitas wilayah dan pembangunan daerah yang tahan bencana
Ketahanan Budaya	Penguatan ketahanan budaya sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Percepatan ketahanan budaya sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Pemantapan perwujudan masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika budaya asing yang negatif	Perwujudan masyarakat Kabupaten Pemalang yang memiliki ketahanan budaya
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemenuhan pemerintahan yang adaptif, inovatif dan berorientasi pelayanan	Percepatan implementasi kinerja pemerintahan yang adaptif, inovatif dan berorientasi pelayanan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif dan berorientasi pelayanan	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif dan berorientasi pelayanan

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan.

Sasaran pokok RPJPD merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 ditetapkan 7 (tujuh) sasaran pokok. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator utama pembangunan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok dan indikatornya dijelaskan sebagai berikut:



5.2.1. Sasaran Pokok 1. Terwujudnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Daerah

Perwujudan sasaran pokok tersebut dilakukan secara bertahap dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, dan juga dilakukan dengan menggerakkan sumber daya manusia agar lebih produktif dan inovatif agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Upaya yang dilakukan fokus pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah yang dilakukan dengan mendorong hilirisasi didukung dengan digitalisasi ekonomi, serta berbasis pada riset dan inovasi. Selain itu juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi sampai ke generasi berikutnya, maka diterapkan pembangunan ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Upaya perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan produktivitas yang semakin meningkat dan menerapkan prinsip ekonomi hijau, diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan difokuskan pada empat arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut:

PM 1. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Salah satu upaya perwujudan perekonomian yang berdaya saing adalah meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah Kabupaten Pemalang dan memberikan nilai tambah produksi agar mampu lebih bersaing di pasar global maupun nasional. Peningkatan produktivitas salah satunya dengan mendorong hilirisasi produk berbasis riset, teknologi, dan inovasi, serta didukung dengan digitalisasi ekonomi yang memadai dan terjangkau.

Pertanian

Sektor pertanian (dalam arti luas) menjadi salah satu sektor unggulan daerah Kabupaten Pemalang yang sampai 20 tahun ke depan masih akan menjadi unggulan untuk menopang perekonomian Kabupaten Pemalang. Kondisi saat ini, sektor pertanian masih fokus pada sisi produksi yang belum optimal memberikan nilai tambah produk pertanian dan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu ke depan peningkatan produktivitas sektor pertanian terutama hilirisasi sektor pertanian menjadi salah satu kebijakan penting untuk transformasi ekonomi Kabupaten Pemalang. Kebijakan ini diharapkan juga akan berdampak pada kesejahteraan pelaku sektor pertanian terutama petani/nelayan. Kebijakan jangka panjang dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha sektor pertanian diarahkan antara lain melalui: 1) modernisasi dalam pembangunan sektor pertanian berbasis riset, teknologi, dan inovasi baik di sisi hulu maupun hilir, 2)

pengembangan pertanian terintegrasi (hulu hilir), 3) pengembangan pertanian berkelanjutan, 4) penguatan kemandirian pengelolaan pertanian, 4) perbaikan di sisi hulu atau produksi terutama dalam menjamin biaya produksi pertanian tidak lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh para petani/nelayan, 5) regenerasi pelaku sektor pertanian, 6) perluasan diversifikasi produk pertanian, 7) pengembangan pertanian berbasis korporasi, 8) penguatan sistem distribusi produk pertanian, 9) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian, 10) penguatan perlindungan terhadap pelaku usaha sektor pertanian.

Industri pengolahan

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Pemalang menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar pada perekonomian Kabupaten Pemalang. Untuk itu, dalam 20 tahun ke depan kebijakan peningkatan produktivitas sektor ini menjadi penting dalam upaya akselerasi peningkatan perekonomian daerah yang memiliki daya saing global maupun nasional. Arah kebijakan peningkatan produktivitas industri pengolahan di Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan antara lain meliputi: 1) penguatan industri kecil dan menengah agar memiliki nilai tambah tinggi, 2) pengembangan industri berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan (*green investment*), 3) pengembangan industri bahan baku lokal, 4) penguatan integrasi rantai pasok antarindustri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri, 5) peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan, 6) penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, 7) digitalisasi industri pengolahan, 8) penciptaan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan, serta 9) peningkatan penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru.

Perdagangan

Salah satu sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian daerah Kabupaten Pemalang adalah sektor perdagangan. Kebijakan penguatan sektor perdagangan Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan diarahkan pada 1) penguatan ekspor produk unggulan daerah, 2) pengurangan ketergantungan impor, 3) penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional, 4) pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat, 5) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan memasarkannya di pasar global maupun nasional, 6) penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, 7) penguatan sistem distribusi produk perdagangan, serta 8) penyederhanaan regulasi, penguatan kapasitas hukum, persaingan persaingan usaha, termasuk kelembagaan persaingan usaha.

UMKM dan Koperasi

Perekonomian Kabupaten Pemalang mampu tumbuh dan berkembang salah satunya ditopang oleh sektor UMKM dan koperasi yang dinilai mampu menghadapi goncangan pasar global dan nasional maupun dinamika global

lainnya. Sektor ini juga mampu banyak menyerap tenaga kerja baik yang berpendidikan rendah sampai berpendidikan tinggi. Untuk itu, agar sektor ini ke depan tetap mampu berkontribusi tinggi pada perekonomian daerah didorong untuk lebih meningkatkan produktivitas agar memiliki nilai tambah lebih dan mampu bersaing secara global dan nasional. Arah Kebijakan yang diterapkan untuk penguatan sektor UMKM dan koperasi dalam jangka panjang antara lain meliputi: 1) peningkatan kualitas produk unggulan UMKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi, 2) fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, 3) akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM disertai dengan penyediaan akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau, 4) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM untuk mampu mengembangkan produk UMKM yang memiliki standar pasar, berbasis riset, inovasi, dan teknologi, 5) pengembangan wirausaha baru, 6) penguatan koperasi produksi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil, 7) perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, dan 8) peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

Pariwisata

Kabupaten Pemalang memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi yang mampu menarik kunjungan wisatawan sehingga mampu memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah. Untuk itu, pembangunan pariwisata ke depan menjadi penting sebagai bentuk upaya mewujudkan ekonomi Kabupaten Pemalang yang berdaya saing. Arah kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan antara lain meliputi: 1) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan, 2) penguatan promosi pariwisata berbasis digital, 3) peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata, 4) penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital, 5) peningkatan infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, 6) penguatan integrasi antardestinasi wisata, 7) penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, serta 8) penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu menjadi kekuatan baru untuk peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Pemalang. Sektor ekonomi kreatif mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang ditengah pelambatan pertumbuhan ekonomi secara global terutama pasca pandemi Covid-19. Pengembangan sektor ekonomi kreatif akan mampu menciptakan nilai tambah tinggi berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Arah kebijakan di sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan antara lain mencakup: 1) peningkatan kualitas sumber

daya manusia ekonomi kreatif, 2) pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa, 3) peningkatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif, 4) pengembangan sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif, 5) penyediaan infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas, 6) peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, 7) pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, 8) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, 9) pengembangan dan penguatan jejaring kabupaten/kota kreatif, 10) pengembangan dan penguatan desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan, serta 11) penguatan standarisasi produk dan praktek usaha ekonomi kreatif.

Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas semua sektor ekonomi daerah didukung dengan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompeten, adaptif, inovatif dan mampu menguasai pasar kerja. Guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu berkontribusi dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah, arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam dua puluh tahun ke depan antara lain: 1) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, 2) penguatan keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, 3) penguatan sistem perlindungan tenaga kerja, 4) penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta 5) penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri.

PM 2. Penerapan Ekonomi Hijau

Perwujudan nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah di Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan diarahkan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Dengan menerapkan ekonomi hijau diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap tinggi dan tetap sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Penerapan *green economy* di Kabupaten Pemalang dilakukan dengan tujuan Pembangunan Rendah Karbon/*Low Carbon Development* (PRK/LCD) yang berketahanan iklim. PRK yang berketahanan iklim merupakan serangkaian strategi dan rencana kerja untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas dengan emisi GRK maupun intensitas emisi GRK yang rendah, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Kebijakan penerapan *green economy* dibagi dalam empat kelompok sebagai berikut: 1) penerapan *circular economy* secara bertahap dengan mentransformasikan dari *brown industry* menuju *green industry* baik untuk perusahaan besar, menengah, UMKM dan IKM, dengan mengadopsi prinsip-prinsip *circular economy* (R0-R9), yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: a) membuat dan

menggunakan produk dengan lebih cerdas (R0: *refuse*, R1: *rethink*, R2: *reduce*); b) memperpanjang usia pakai produk (R3: *reuse*, R4: *repair*, R5: *refurbish*, R6: *remanufacture*, R7: *repurpose*); dan c) mengambil manfaat dari material (R8: *recycle*, R9: *recover*), 2) penerapan konservasi energi agar lebih efisien dan mendorong transisi energi ke sumber energi terbarukan yang dicapai melalui pembangunan infrastruktur EBT, gerakan penghematan energi, desa mandiri energi berbasis potensi lokal yang terjangkau, inklusif, dan pendampingan energi, 3) pengembangan sistem transportasi umum massal yang andal, berkualitas, merata, terintegrasi dan terjangkau serta rendah emisi secara bertahap untuk meningkatkan peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk mendukung peningkatan efisiensi penggunaan energi, 4) pengelolaan hutan lestari, lahan pertanian, lahan budidaya perikanan dan kelautan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung hilirisasi sektor pertanian, serta 5) pengembangan *green financing* dan penerapan *carbon pricing* untuk mendukung investasi dan produk-produk hijau.

PM 3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global diharapkan akan semakin mendorong perekonomian daerah Kabupaten Pemalang lebih produktif dan tumbuh semakin optimal. Kebijakan terkait integrasi ekonomi domestik dan global di Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan diarahkan pada: 1) penguatan ekspor produk unggulan daerah, 2) pengurangan ketergantungan impor, 3) penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional, 4) pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat, 5) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan memasarkannya di pasar global maupun nasional, 6) penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, 7) penguatan sistem distribusi produk perdagangan, serta 8) penyederhanaan regulasi, penguatan kapasitas hukum, persaingan persaingan usaha, termasuk kelembagaan persaingan usaha. Kebijakan ini didukung dengan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang handal yang akan mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi.

PM 4. Stabilitas Ekonomi Makro

Perwujudan stabilitas ekonomi makro daerah Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan diarahkan pada kebijakan meliputi: 1) peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah, 2) penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, 3) sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, 4) penguatan pengendalian inflasi daerah, serta 5) perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

Terwujudnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.2.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama
Pembangunan, dan Target Terwujudnya Nilai Tambah Sektor
Ekonomi Unggulan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I 2025- 2029	TAHAP II 2030- 2034	TAHAP III 2035- 2039	TAHAP IV 2040- 2045
Terwujudnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah	PM 1. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	23,28	24,28	25,78	26,78	27,79
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,76	6,76	8,16	8,76	9,23
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	13	15	20	22	24
		Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,30	2,74	3,44	4,29	5,59
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	22,55- 22,70	42,55 - 61,35	82,55 - 101,35	95,05 - 113,85	107,73- 126,53
		Rasio kewirausahaan daerah (%)	7,47	9,47	11,97	13,67	15,44
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	4,19	6,19	8,69	10,49	12,29
		Kapabilitas Inovasi (Angka)	2,22	2,30	2,40	2,50	2,62
	PM 2. Penerapan Ekonomi Hijau	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (TonCO2eq)	209.123,35	1.336.470,361	3.730.377,397	8.025.136,780	17.907.793,18
	PM 3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	13,63	13,67	13,71	13,75	13,79
		Disparitas Harga (%)	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
	PM 4. Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,71	0,73	0,77	0,79	0,81
		Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB (%)	11,55	12,00	12,50	13,00	13,60
		Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB (%)	11,55	12,03	12,59	13,14	13,80

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

5.2.2. Sasaran Pokok 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing Yang Inklusif

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Kabupaten Pemalang yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing dan semakin sejahtera. Dalam



rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif difokuskan pada empat arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

PM 5. Kesehatan untuk Semua

Hidup sehat adalah hak setiap individu masyarakat dan menjadi penting untuk dimiliki oleh setiap individu karena sehat menjadi salah satu prasyarat individu untuk mampu melakukan aktivitas baik aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif dalam perlindungan sosial yang berkesinambungan. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif dilaksanakan sebagai perwujudan kesehatan untuk semua. Arah kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan untuk semua di Kabupaten Pemalang 20 tahun ke depan adalah: 1) perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, 2) pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal, 3) peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, 4) pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya, 5) penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, 6) pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, 7) perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, 8) pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, 9) percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting, 10) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, 11) percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, 12) penyediaan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, 13) penguatan riset, data, dan informasi, serta penerapan inovasi dan teknologi di bidang kesehatan, serta 14) penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif akan dicapai jika prasyaratnya dipenuhi yaitu tersedianya sumber daya kesehatan yang kuat, terlaksananya upaya kesehatan yang komprehensif, tersedianya regulasi untuk mendukung penyempurnaan sistem kesehatan, serta tersedianya ekosistem yang mampu memfasilitasi tumbuhnya industri kesehatan. Dampak peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat secara merata di seluruh Daerah. Penerapan *health in all policies*, pemerataan kapasitas daerah, serta partisipasi masyarakat menjadi strategi kunci untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh penduduk.

PM 6. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan menjadi hal penting yang berperan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, inovatif dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam mewujudkan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan diarahkan pada mewujudkan pendidikan berkualitas

yang merata. Pada tahun 2025 Pemerintah Pusat telah menetapkan wajib belajar selama 13 tahun yang artinya ada penambahan satu tahun untuk jenjang PAUD sebelum masuk pendidikan dasar. Guna mewujudkan Pendidikan berkualitas dan merata dalam rangka mendukung wajib belajar 13 tahun dapat ditempuh dengan 1) konsolidasi kelembagaan dengan lebih menekankan pada perbaikan pola koordinasi internal institusi pendidikan, melibatkan sektor lain, serta dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, 2) solidasi *stakeholder* pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan peran serta *stakeholder* dalam penyelenggaraan pendidikan dalam upaya membangun aliansi antara pendidikan, bisnis, dan pemerintah, 3) penguatan sinergi penyelenggaraan pendidikan, 4) perwujudan penyelenggaraan pendidikan berbasis tata kelola yang baik dari tingkat PAUD hingga pendidikan dasar, 5) penguatan pendataan berbasis wilayah dan analisis kebutuhan yang dilakukan dengan menyusun data berbasis analisis situasi dan identifikasi pemetaan layanan pendidikan secara kewilayahan, 6) perluasan cakupan akses layanan pendidikan diarahkan pada penyediaan akses layanan pendidikan dengan penambahan prasarana sarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan maupun keterjangkauan pembiayaan pendidikan, 7) pemerataan akses layanan pendidikan yang diarahkan untuk pencegahan putus sekolah dan penanganan anak tidak sekolah termasuk penguatan sekolah inklusi, 8) perwujudan pendidikan inklusif 9) peningkatan digitalisasi pendidikan, dengan mendorong metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan 10) pencapaian hasil pembelajaran semakin berkualitas dengan peningkatan kemampuan numerasi, literasi dan pembinaan karakter.

PM 7. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif meliputi: 1) peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, 2) penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, 3) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, serta 4) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

PM 8. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Perlindungan sosial ditujukan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan perlindungan sosial untuk masyarakat Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan diarahkan pada: 1) perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) agar tepat

sasaran, tepat guna, dan efisien, 2) perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan pemasangan instalasi listrik bersubsidi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, 3) perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, 4) pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, 5) percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, 6) percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga, serta 7) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.

Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.3.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	PM 5. Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,17	75,55	77,05	78,55	80,22
		Jumlah Kasus Kematian Ibu (Kasus)	10	8	6	4	2
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,12	10,22	8,32	6,42	4,71
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	92	94	97	100
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	92	93	94	95
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,00	98,38	98,76	99,14	99,50
	PM 6. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat					



SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		nasional (seluruh jenjang) :					
		a. Literasi Membaca SD/Sederajat (%)	61,71	67,71	75,21	82,71	91,71
		b. Literasi Membaca SMP/Sederajat (%)	74,87	78,87	83,87	88,87	94,87
		c. Numerasi SD/Sederajat (%)	48,91	53,59	59,44	65,29	72,49
		d. Numerasi SMP/Sederajat (%)	67,33	71,33	76,33	81,33	87,33
		Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	84,39	100	100	100	100
		Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	7,9	8,34	8,88	9,43	10,08
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,80	13,40	14,15	14,89	15,79
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	5,72	6,66	7,8	8,996	10,40
	PM 7. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Angka)	63,6-64,81	66,63-67,9	70,42-71,76	74,2-75,62	78,75-80,25
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Angka)	0,400-0,390	0,369 - 0,324	0,315 - 0,279	0,270 - 0,234	0,230 - 0,180
	PM 8. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	14,31 - 13,64	14,31-10,66	9,75 - 6,10	5,18 - 1,53	0,62 - 0,00
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,19-5,89	5,69 - 5,39	4,89 - 4,59	4,05 - 3,75	3,21-2,91
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,19	62,19	68,19	71,19	74,23
		Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	20,66 - 20,86	20,66 - 21,46	21,66 - 22,46	21,66 - 23,46	23,66 - 24,66
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	8,95	7,61	5,94	4,27	2,27
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	56,03	58,58	64,10	70,14	78,15

Sumber: Analisis Penyusun, 2024



5.2.3. Sasaran Pokok 3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata mendukung Kabupaten Pemalang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Infrastruktur yang terdiri dari konektivitas dan sarana prasarana dapat menjadi daya tarik investasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Kemudahan akses juga mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata difokuskan pada dua arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi.

PM 9. Transformasi Digital

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata dapat terwujud didukung dengan transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan. Kebijakan transformasi digital dilaksanakan dengan membangun ekosistem digital tangguh yang diarahkan pada: 1) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok, 2) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis, serta 3) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi serta kepemimpinan digital).

PM 10. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu upaya untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi daerah adalah pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan secara umum pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terutama diarahkan pada: 1) pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa, 2) peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pemantapan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan, 3) penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dilengkapi dengan akses sanitasi aman, serta 4) penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang. Selanjutnya untuk semakin memperkuat pembangunan perdesaan terutama dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri, kebijakannya diarahkan pada: 1) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM lokal, 2) pemenuhan dan pemerataan kebutuhan akses layanan dasar perdesaan, 3) penguatan peran lembaga perekonomian desa melalui optimalisasi potensi lokal desa, 4) penguatan kerjasama kawasan perdesaan sebagai upaya pemerataan pusat

pertumbuhan, serta 5) penguatan peran supra desa dalam penyelarasan pembangunan desa sesuai pembagian kewenangan.

Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.4.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan	PM 9. Transformasi Digital	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (%)	77,46	81,11	85,93	91,03	97,55
	PM 10. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Desa Mandiri (%)	14,76	24,76	37,26	49,76	64,76
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	69,48	75,77	83,5	91,08	100
		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	70,00	74,00	79,00	84,00	90,00
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	66,53	66,93	67,43	67,93	68,53
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	55,77	61,37	68,37	75,37	84,00
		Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	54,00	58,48	66,80	72,00	74,83

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

5.2.4. Sasaran Pokok 4. Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan akan terus berjalan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup difokuskan pada dua arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.



PM 11. Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Kebijakan dalam upaya terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dalam 20 tahun ke depan diarahkan pada: 1) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati, sumber daya hutan, pesisir dan laut yang berkelanjutan, 2) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah, serta 3) penguatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

PM 12. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Upaya perwujudan ketahanan energi dan air di Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan diarahkan pada kebijakan: 1) peningkatan akses terhadap listrik kepada masyarakat tidak mampu, 2) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi, 3) mendorong percepatan aksi konservasi energi dari sisi pemanfaatan energi melalui penerapan manajemen energi di daerah, serta 4) penguatan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, arah kebijakan untuk mewujudkan kemandirian pangan meliputi: 1) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan, 2) penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan, 3) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*), serta 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu.

Terwujudnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.5.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
Terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana	PM 11. Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Angka)	76,78	76,95	77,17	77,39	77,66
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	29,80	41,84	56,89	71,94	90,00
	PM 12. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Angka)	81,49	83,13	84,17	85,23	86,52
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	28,51	42,52	60,02	77,52	100

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

5.2.5. Sasaran Pokok 5. Terwujudnya Kondusivitas Wilayah dan Ketahanan Bencana

Kabupaten Pemalang mewujudkan kondusivitas wilayah dalam rangka mencapai transformasi secara menyeluruh. Penguatan terhadap keamanan dan ketertiban pada masyarakat dilakukan sebagai modal dasar pembangunan. Ketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim



juga harus ditingkatkan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana difokuskan pada satu arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

PM 13. Kondusivitas Wilayah dan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Dalam rangka memperkuat kondusivitas wilayah dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, kebijakan Kabupaten Pemalang dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan konflik SARA 2) pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi, serta 3) penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim.

Terwujudnya kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana di Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.6.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Terwujudnya Kondusivitas Wilayah dan Ketahanan Bencana Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	PM 13. Kondusivitas Wilayah dan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Jumlah Kejadian Konflik SARA (kali)	n/a	0	0	0	0
		Indeks Risiko Bencana (IRB) (Angka)	113	109	95	89	84

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

5.2.6. Sasaran Pokok 6. Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah

Kabupaten Pemalang mewujudkan ketahanan budaya dalam menghadapi globalisasi. Penguatan terhadap nilai agama dan budaya pada masyarakat dilakukan sebagai modal dasar pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai agama, etika, dan norma yang berlaku dalam menghadapi arus perubahan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya ketahanan budaya daerah difokuskan pada satu arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

PM 14. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter

Masyarakat yang berbudaya dan memiliki pendidikan karakter dapat menjadi identitas pada suatu wilayah. Kemajuan dan kelestarian budaya dapat dilakukan untuk memperkuat karakter masyarakat di Kabupaten Pemalang dalam memperkuat jati diri dan meningkatkan kesejahteraan melalui ketahanan budaya. Pendidikan karakter mampu menciptakan kerukunan serta toleransi antar umat beragama.



Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter di Kabupaten Pemalang meliputi: 1) peningkatan strategi pemajuan kebudayaan, 2) penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa mulai dari dalam keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terkecil, 3) internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa pada anak-anak sekolah, 4) edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas Jawa Tengah melalui tutur kata sehari-hari, termasuk melakukan *parenting* untuk para orang tua terkait pembelajaran karakter masyarakat Jawa Tengah dalam kehidupan sehari-hari, 5) pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, 6) penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, 7) penguatan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter masyarakat yang salah satunya tercermin dari politik kebudayaan untuk memprioritaskan pendidikan kebudayaan dan kesenian untuk masyarakat serta 8) pemantapan kohesi sosial melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini.

Terwujudnya ketahanan budaya daerah di Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.7.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah	PM 14. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar muak bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	100	100	100	100	100
		Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	21,76	25,47	31,35	36,53	40,09
		Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%)	50	53	55	58	60
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah (orang)	88.559	101.843	122.212	134.433	147.876
		Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	2,60	3,20	3,90	4,70	5,50

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

5.2.7. Sasaran Pokok 7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Transformasi tata kelola menjadi penting dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih

efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, dengan integritas yang semakin kuat. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih difokuskan pada satu arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

PM 15. Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas dan Adaptif

Kebijakan dalam rangka perwujudan regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif di Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan meliputi: 1) penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (*open government*), 2) penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko, 3) penguatan kelembagaan yang efektif, 4) penguatan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pembiayaan alternatif lainnya, 5) digitalisasi tata kelola pemerintahan, 6) akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien, 7) penyederhanaan regulasi dan penguatan penegakan hukum, 8) penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, 9) penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah, serta 10) penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat termasuk partai politik.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel V.8.
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	PM 15. Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	71,00	74,2	79,4	84,2	90
		Indeks Reformasi Hukum (Angka)	60	75	85	92	98
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Angka)	3,00	3,25	3,5	4,10	5,00
		Indeks Pelayanan Publik (Angka)	4,51	4,60	4,70	4,80	5,00
		Indeks Integritas Nasional (Angka)	69,97	74,20	78,27	82,34	86,42

Sumber: Analisis Penyusun, 2024



BAB VI

PENUTUP

RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD menjadi instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan Nasional, pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan Kabupaten Pemalang. RPJPD merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini, penyusunan RPJPD harus mengacu kepada RPJPN agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan menjamin keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan *platform* RPJPN.

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan. RPJPD Tahun 2025-2045 juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pemalang untuk turut andil dalam pembangunan daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 20 tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045, maka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

1. konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
2. kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko;
3. sistem insentif untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya;
4. mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; serta
5. komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi jangka panjang didukung dengan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dilakukan melalui

pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif serta optimalisasi layanan jasa sektor keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, peran aktif serta komitmen berbagai pihak di Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang 20 tahun ke depan. Harapan ke depan dengan terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 yaitu “Pemalang Mulya (Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya)” akan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Jawa Tengah dan Indonesia Emas 2045.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT